

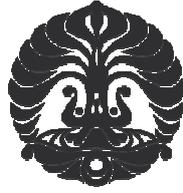
UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH PNPM DAN ALOKASI BELANJA DAERAH UNTUK
PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN PEKERJAAN UMUM TERHADAP
PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDI KASUS
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2007-2009)**

TESIS

**LUKMAN ADI SANTOSO
NPM: 0906586612**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH PNPM DAN ALOKASI BELANJA DAERAH UNTUK
PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN PEKERJAAN UMUM TERHADAP
PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDI KASUS
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2007-2009)**

TESIS

**LUKMAN ADI SANTOSO
NPM: 0906586612**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Ekonomi**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH
JAKARTA
JULI 2011**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggungjawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta. 20 Juli 2011



(Lukman Adi Santoso)

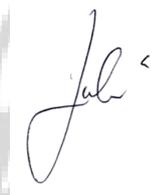
PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Lukman Adi Santoso

NPM : 0906586612

Tanda Tangan :



Tanggal : 20 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Lukman Adi Santoso
NPM : 0906586612
Program Studi : Magister Perencanaan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Pengaruh PNPM dan Alokasi Belanja Daerah untuk Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum Terhadap Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2009)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Sartika Djamaluddin

Penguji : Iman Rozani, SE., MSoc.Sc

Penguji : Dr. Vivi Yulaswati



(Sartika)
(Iman)
(Vivi)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 20 Juli 2011

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Master Ekonomi Jurusan Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini secara khusus penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Sartika Djamaluddin selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.

Disamping itu saya juga menyadari sepenuhnya tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ketua Program Studi Magister dan Perencanaan Kebijakan Publik (MPKP) FEUI beserta staf administrasi program yang telah banyak memberikan kemudahan dalam proses perkuliahan.
2. Para dosen pengajar yang telah memberikan wawasan selama mengikuti perkuliahan.
3. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Indonesia.
4. *My little family* Indri Giovanni dan kedua anakku Keisha Azzahra Sakhi dan Arsyah Ramadhan Zaki yang menjadi motivator sekaligus dinamisator bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
5. Ibunda tercinta dan kedua kakakku Mas Memed dan Mbak Dina yang tak pernah lelah mendoakan dan memberikan dukungan moral dan material.
6. Rekan-rekan MPKP Angkatan XX kelas Pagi yaitu Sigit, Ryo, Dhita, Vinda, Saddam, Mas Gribik, Mas Arinto, Mas Yudi, Mas Arief, dan Dody yang telah banyak memberikan bantuan baik selama masa perkuliahan maupun dalam penyelesaian tesis ini.

7. Rekan-rekan di kantor yang memberikan dukungan ketika penulis mendapatkan hambatan dalam mencari data, ide, atau memecahkan masalah dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan bagi kita semua, kemudahan dalam mengarungi kehidupan dan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Salemba, 20 Juli 2011



Lukman Adi Santoso



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lukman Adi Santoso
NPM : 0906586612
Program Studi: Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Departemen : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Pengaruh PNPM dan Alokasi Belanja Daerah untuk Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum Terhadap Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2009)”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Juli 2011

Yang menyatakan,



(Lukman Adi Santoso)

ABSTRAK

Nama : Lukman Adi Santoso
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : Pengaruh PNPM dan Alokasi Belanja Daerah untuk Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum Terhadap Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2009)

Kemiskinan adalah masalah multidimensi yang menjadi masalah utama di negara ini. Penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan PNPM yang melibatkan partisipasi masyarakat dan melibatkan masyarakat langsung dan Pemerintah Daerah dengan anggaran pro orang miskin melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia, selain itu menjadi daerah penerima dana PNPM dan dana perimbangan terbesar. Hal ini menarik karena daerah yang memperoleh alokasi dana yang besar ternyata mempunyai penduduk miskin yang besar. Studi ini meneliti tentang seberapa besar pengaruh pendanaan secara bersama-sama melalui PNPM dan anggaran belanja daerah untuk pengentasan kemiskinan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk penanggulangan kemiskinan dapat berhasil dilakukan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan daerah. PNPM dan belanja daerah untuk kesehatan berpengaruh negatif terhadap Indeks kemiskinan sedangkan belanja daerah untuk pendidikan dan pekerjaan umum tidak berpengaruh terhadap indeks kemiskinan. PNPM dan belanja daerah untuk pendidikan berpengaruh negatif terhadap indeks kedalaman kemiskinan sedangkan belanja daerah untuk pekerjaan umum berpengaruh positif sementara belanja daerah untuk kesehatan tidak berpengaruh terhadap indeks kedalaman kemiskinan. PNPM dan belanja daerah untuk pendidikan berpengaruh negatif terhadap indeks keparahan kemiskinan sedangkan belanja daerah untuk kesehatan dan pekerjaan umum tidak berpengaruh terhadap indeks keparahan kemiskinan.

Kata kunci : Penanggulangan Kemiskinan, PNPM, APBD, Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum

ABSTRACT

Name : Lukman Adi Santoso
Study Program : Master of Planning and Public Policy
Title : The Effect of PNPM and Regional Budget for Education, Health, and Infrastructure to Poverty Alleviation (Case study Municipality/City in Province of East Java on 2007-2009)

Poverty is multidimension problem that being the main problem in this country. Poverty alleviation done by Central Government with PNPM that joining community participation and Regional Government with pro poor budget in education, health, and infrastructure. East Java Province is province that have the biggest poor people in Indonesia, beside that east java is region with the biggest PNPM and transfer fund. This is interesting because region with a lot of fund nevertheless become region with a lot of poor people. This study is to analyze relationship between fund from PNPM and regional budget for education, health, and infrastructure in East Java. The result of this study is poverty alleviation can succeed if done by cooperation between central and regional government. PNPM and regional budget for health have negative effect for poverty index however regional budget for education and infrastructure don't have relationship to poverty index. PNPM and regional budget for education have negative effect but regional budget for infrastructure have positive effect for poverty gap index however regional budget for health don't have relationship with poverty gap index. PNPM and regional budget for education have negative effect for distributionally sensitive index however regional budget for health and infrastructure don't have relationship with distributionally sensitive index.

Key term: poverty alleviation, PNPM, regional budget, education, health, infrastructure

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Perumusan masalah	7
1.3 Tujuan penelitian	8
1.4 Manfaat penelitian	9
1.5 Perumusan Hipotesis	9
1.6 Ruang Lingkup	9
1.7 Kerangka Pikir Pemecahan Masalah	10
1.8 Sistematika penulisan	10
2. TINJAUAN LITERATUR	12
2.1 Definisi Kemiskinan	12
2.2 Pengukuran Kemiskinan	17
2.3 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	18
2.4 Ruang Fiskal	22
2.5 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	22
2.6 Karakteristik Wilayah Penelitian	26
2.7 Penelitian Sebelumnya	31
3. METODE PENELITIAN	35

3.1 Tahapan Penelitian	35
3.2 Spesifikasi Model.....	36
3.3 Metode Estimasi.....	41
3.4 Pengujian Asumsi Dasar OLS	45
3.5 Jenis dan Sumber Data	48
3.6 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	48
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Identifikasi Daerah	49
4.2 Hasil Analisis Regresi	51
4.2.1 Pendahuluan.....	51
4.2.2 Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel.....	53
4.2.3 Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t).....	56
4.2.4 Pengujian Model Secara Keseluruhan (uji F)	57
4.2.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	59
4.2.6 Uji Multikolinearitas	60
4.2.7 Uji Autokorelasi.....	61
4.2.8 Uji Heteroskedastisitas	62
4.3 Pembahasan	62
4.3.1 Interpretasi Model	62
4.3.2 Evaluasi kebijakan.....	65
5. KESIMPULAN DAN SARAN	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSAKA	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Program Penanggulangan Kemiskinan Nasional dan Sasarannya	23
Tabel 4.1.	Daftar Ruang Fiskal Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009	49
Tabel 4.2.	Hasil analisa menggunakan AIC, SIC, dan HQ	52
Tabel 4.3.	Hasil Uji Chow	54
Tabel 4.4.	Hasil Uji Hausman.....	54
Tabel 4.5.	Hasil Pendugaan Model Persamaan dengan Indikator Kemiskinan...	56
Tabel 4.6.	Korelasi Matrik Semua Variabel dalam model	61
Tabel 4.7.	Nilai Intercept Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur berdasarkan model Indeks Kemiskinan (P0).....	66
Tabel 4.8.	Nilai Intercept Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur berdasarkan model Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1).....	67
Tabel 4.9.	Nilai Intercept Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur berdasarkan model Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).....	69
Tabel 4.10.	Perbandingan Karakteristik Kota Malang, Kabupaten Sampang, Kota Batu, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Bangkalan Tahun 2009	70

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Grafik Lima Daerah Penerima Alokasi Dana Perimbangan dan Lima Daerah dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbesar pada Tahun 2007-2009	3
Grafik 1.2. Grafik Daerah Penerima PNPB Tahun 2007-2009 dan Jumlah Penduduk Miskin Rata-rata selama Tahun 2007-2009.....	4
Grafik 1.3. Grafik Lima Penerima PNPB Tahun 2007-2009 dan Lima Daerah dengan Pengurangan Persentase Kemiskinan Terbesar selama Tahun 2007-2010	5
Grafik 1.4. Grafik Ruang Fiskal dalam APBD Kabupaten/Kota Tahun 2007-2009 dan Jumlah Penduduk Miskin Rata-rata selama Tahun 2007-2009 berdasarkan Wilayah.....	6
Grafik 1.5. Grafik Anggaran Belanja Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum) dalam APBD Kabupaten/Kota dan Ruang Fiskal Tahun 2008 berdasarkan Wilayah.....	7
Grafik 2.1 Grafik Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada Tahun 2007-2009	28
Grafik 2.2 Grafik Jumlah Penduduk Miskin dan Indeks P0 Tahun 2008.....	29
Grafik 3.1. Durbin-Watson d statistik	46
Grafik 4.1 <i>Scattered Plot</i> Ruang Fiskal Tahun 2009 Kabupaten/Kota di Jawa Timur	51
Grafik 4.2 Diagram Alur Pengujian Signifikansi Model.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data untuk Regresi Data Panel.....	78
Lampiran 2. Estimasi model Indeks Kemiskinan (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dengan Metode <i>Common Effect</i>	81
Lampiran 3. Estimasi model Indeks Kemiskinan (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dengan Metode <i>Fixed Effect</i>	84
Lampiran 4. Estimasi model Indeks Kemiskinan (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dengan Metode <i>Random Effect</i>	86
Lampiran 5. Uji Chow untuk memilih teknik estimasi yang cocok antara Model <i>Common Effect</i> dengan Model <i>Fixed Effect</i>	88
Lampiran 6. Uji Hausman untuk memilih teknik estimasi yang cocok antara Model <i>Fixed Effect</i> dengan Model <i>Random Effect</i>	91
Lampiran 7. Estimasi model Indeks Kemiskinan (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dengan menggunakan Metode <i>Fixed Effect</i> yang telah disembuhkan dari multikolinearitas	94
Lampiran 8. Realisasi APBD Kabupaten Jember, Kabupaten Bangkalan, dan Kota Mojokerto Tahun 2008 berdasarkan Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan menurut jenis belanja per program.	98
Lampiran 9. Realisasi APBD Kabupaten Jember, Kabupaten Bangkalan, dan Kota Mojokerto Tahun 2007 berdasarkan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan menurut jenis belanja langsung dan tidak langsung.	104

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan sejak presiden pertama sampai saat ini masalah kemiskinan tetap menjadi masalah utama. Banyak strategi yang dilakukan di Indonesia saat ini, baik melalui kebijakan yang langsung ke masyarakat miskin melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun yang melalui program yang lebih dikenal dengan PNPM Mandiri atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, yang ternyata sampai saat ini menjadi program andalan pemerintah, tetapi ternyata belum terlalu efektif untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, terutama BLT yang digunakan sebagai alat bantu mencegah bertambahnya angka kemiskinan karena kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga BBM atau listrik. Sedangkan PNPM yang merupakan program baru yang melibatkan partisipasi masyarakat dengan banyaknya program yang menyentuh dan melibatkan masyarakat langsung.

Menurut François Bourguignon, dalam tulisannya “Segitiga Kemiskinan-Pertumbuhan-Ketimpangan pada tahun 2003”, terdapat dilema dalam setiap upaya mencari solusi masalah kemiskinan. Di satu sisi pengentasan kemiskinan adalah tujuan mulia dari pembangunan, dan di sisi lain pengentasan kemiskinan tersebut membutuhkan kombinasi yang kuat antara kebijakan pertumbuhan dan distribusi. Pertumbuhan ekonomi akan memberikan tambahan pendapatan terhadap suatu populasi dan kemudian distribusilah yang mempengaruhi munculnya kemiskinan. Distribusi sebagai salah satu fungsi dari pemerintah menjadi kunci dari arah pertumbuhan ekonomi. Distribusi pendapatan yang baik akan membuat pertumbuhan dirasakan oleh semua rakyat sedangkan distribusi yang buruk akan membuat pertumbuhan hanya dirasakan segelintir orang dan tentu akan menciptakan peningkatan golongan kaya dan miskin baru.

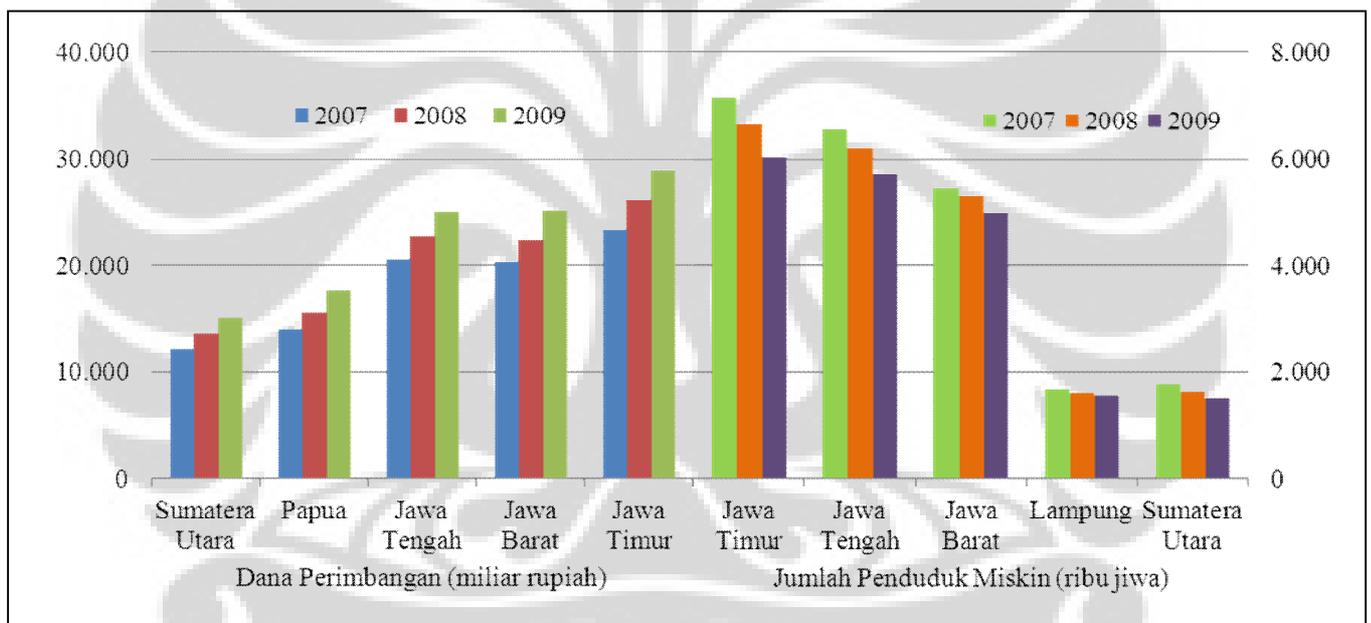
Selanjutnya, lagi menurut Todaro dan Smith, setidaknya ada lima alasan mengapa kebijakan penanggulangan kemiskinan diharapkan tidak memperlambat

tingkat pertumbuhan. *Pertama*, kemiskinan yang meluas akan mencetak kondisi dimana orang miskin tidak mempunyai akses kepada kredit, tidak bisa membiayai pendidikan anaknya, dan tidak akan ikut kesempatan melakukan investasi, mempunyai banyak anak sebagai sumber jaminan keuangan mereka. Faktor-faktor ini menyebabkan pertumbuhan per kapita lebih kecil dibandingkan ketika ketimpangan rendah. *Kedua*, secara umum, dengan dukungan data empiris berdasarkan pengamatan fakta orang kaya di negara miskin tidak dicatat tentang pentingnya mereka atau mengenai keinginan mereka untuk menyimpan dan menginvestasikan dengan porsi yang besar terhadap ekonomi lokal. *Ketiga*, pendapatan yang rendah dan tingkat kehidupan untuk orang miskin yang rendah menunjukkan rendahnya investasi untuk kesehatan, nutrisi, dan pendidikan orang miskin yang dapat menurunkan produktivitas ekonomi mereka dan secara langsung maupun tidak langsung akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. *Keempat*, peningkatan tingkat pendapatan orang miskin akan menstimulus peningkatan permintaan produk yang diproduksi lokal seperti makanan dan pakaian. Peningkatan permintaan untuk barang lokal akan menjadi stimulus yang besar bagi produksi lokal, tenaga kerja lokal, dan investasi lokal. Dan permintaan tersebut akan menciptakan kondisi untuk pertumbuhan ekonomi. *Kelima*, penanggulangan kemiskinan dapat menstimulasi ekspansi ekonomi yang sehat. Sebaliknya, disparitas pendapatan yang lebar akan menjadi disinsentif bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan penanggulangan kemiskinan tidak merupakan tujuan yang bertolakbelakang.

Desentralisasi fiskal sebagai salah satu instrumen kebijakan Pemerintah mempunyai prinsip dan tujuan, antara lain, untuk (1) mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antardaerah (*horizontal fiscal imbalance*); (2) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (3) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; (4) tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran, tepat waktu, efisien, dan adil; dan (5) mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro. Di samping

itu, untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepada daerah diberikan kewenangan memungut pajak (*taxing power*).

Sedangkan dana perimbangan secara keseluruhan mengalami perkembangan sangat signifikan yaitu dari hanya 125 triliun rupiah pada tahun 2005 menjadi 320 triliun rupiah pada tahun 2011 atau mencapai kenaikan 250 persen. Daerah yang mendapatkan alokasi dana perimbangan terbesar sejak tahun 2007-2009 adalah provinsi yang sebagian besar memiliki sumber daya alam dan tentu daerah yang mempunyai penduduk dan kabupaten/kota yang besar. Jawa Timur adalah provinsi yang menerima dana perimbangan terbesar pada tahun 2007-2009 yang lebih disebabkan oleh banyaknya jumlah kabupaten/kota di sana dan juga jumlah penduduk yang sangat besar.

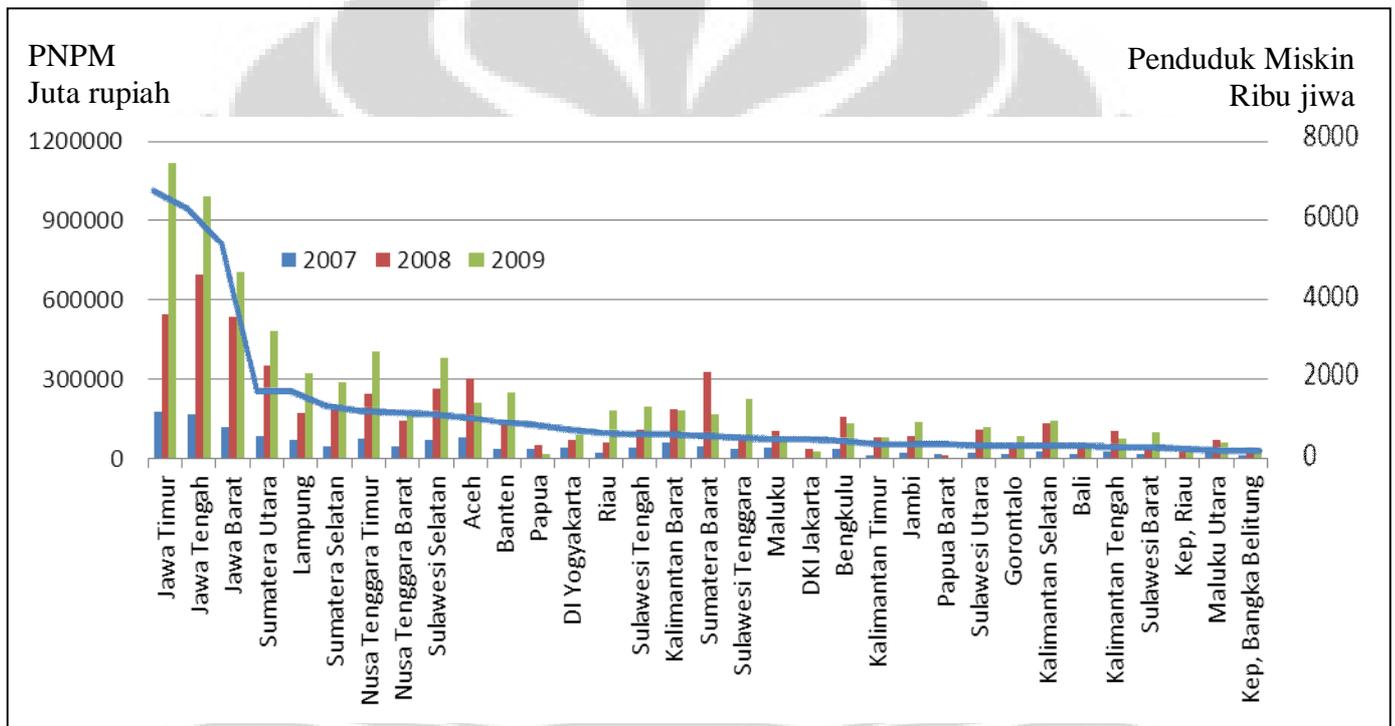


Grafik 1.1. Grafik Lima Daerah Penerima Alokasi Dana Perimbangan dan Lima Daerah dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbesar pada Tahun 2007-2009

Dari Grafik 1.1 kita melihat ternyata alokasi dana perimbangan terbesar adalah di pulau jawa dan jumlah penduduk miskin terbesar adalah juga di pulau jawa. Tiga provinsi terbesar penerima dana perimbangan yaitu Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah ternyata memperoleh 24-30 persen dari total seluruh dana perimbangan yang dibagi kepada 33 provinsi. Sungguh hal yang bertolak belakang bagaimana alokasi dana yang begitu besar ternyata tidak dapat

membuat dampak yang nyata terhadap jumlah penduduk miskin di daerah tersebut.

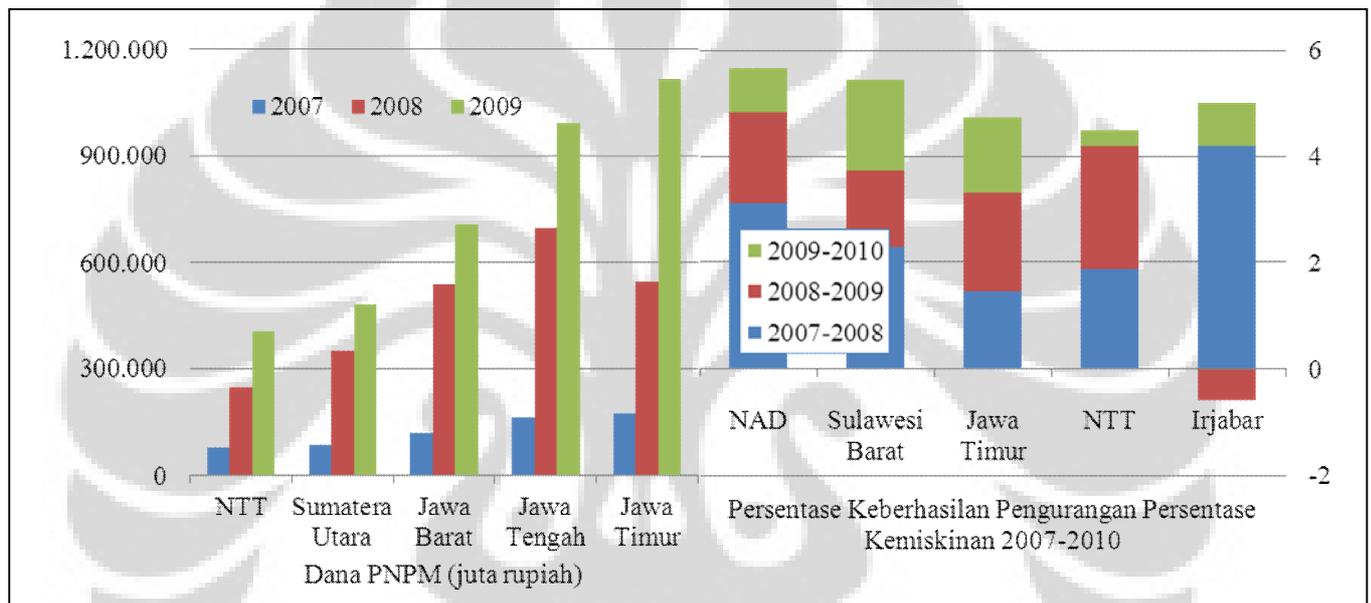
Sedangkan lima provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar pada tahun 2007-2009 juga dipimpin oleh Jawa Timur. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar maka tidak mengherankan jika Jawa timur juga mempunyai angka kemiskinan tertinggi. Walaupun jawa merupakan pusat perekonomian di Indonesia, angka tersebut menunjukkan bahwa pusat dari kemiskinan di Indonesia ternyata di pulau Jawa.



Grafik 1.2. Grafik Daerah Penerima PNPM Tahun 2007-2009 dan Jumlah Penduduk Miskin Rata-rata selama Tahun 2007-2009

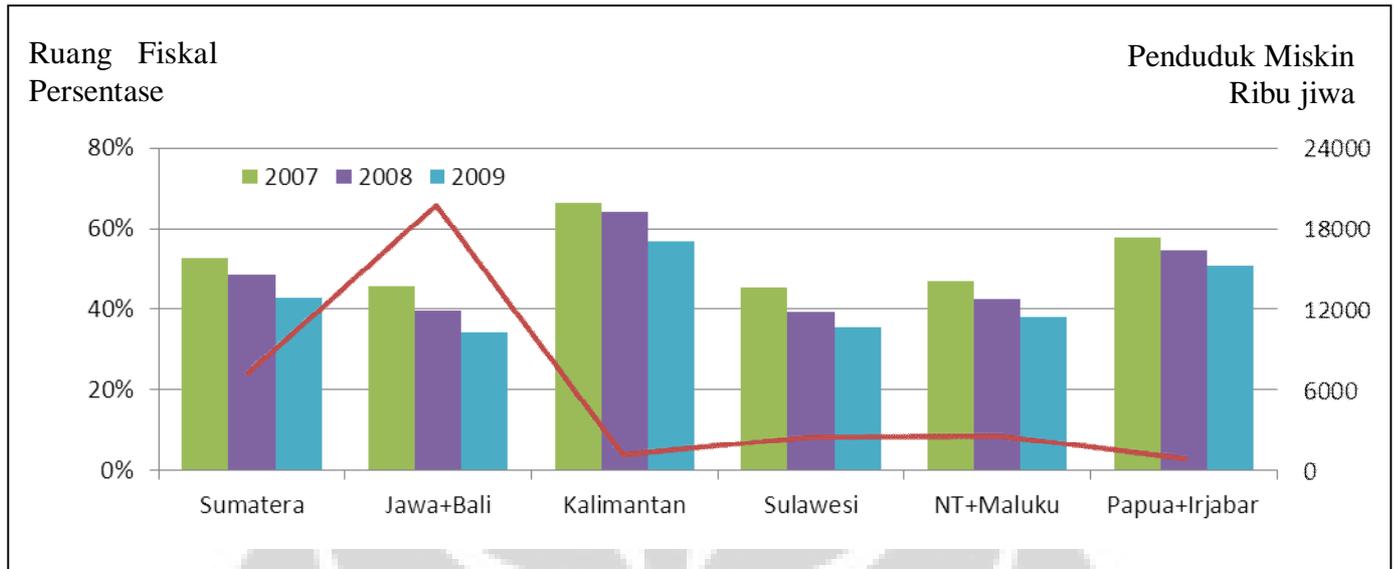
Selain dana perimbangan yang mengalir ke daerah, ternyata terdapat dana lain yang diperuntukkan untuk program kemiskinan, yaitu PNPM yang berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Program ini diluncurkan oleh Pemerintah Pusat yaitu pada tahun 2007 dan mulai berjalan dengan landasan hukum yang jelas pada tahun 2010 melalui jalur Dana Urusan Bersama bagi pemerintah pusat dan Dana Daerah untuk Urusan Bersama bagi Pemerintah Daerah. Walau pada awalnya program ini menuai kritikan mengenai efektif dan banyaknya kasus

penyalahgunaan dana program ini di masyarakat, namun ternyata dampak positifnya juga mulai terlihat dengan banyaknya program yang langsung melibatkan masyarakat dan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada grafik 1.2 menunjukkan bahwa secara umum besarnya dana PNPM yang mengalir ke daerah tergantung pada jumlah penduduk miskin yang ada di daerah tersebut. Namun ada beberapa daerah yang mendapatkan dana PNPM yang tidak sesuai dengan jumlah penduduknya, seperti terjadi pada Provinsi Sumatera Barat yang terlihat menonjol pada tahun 2008 di saat terjadi gempa bumi di sana.



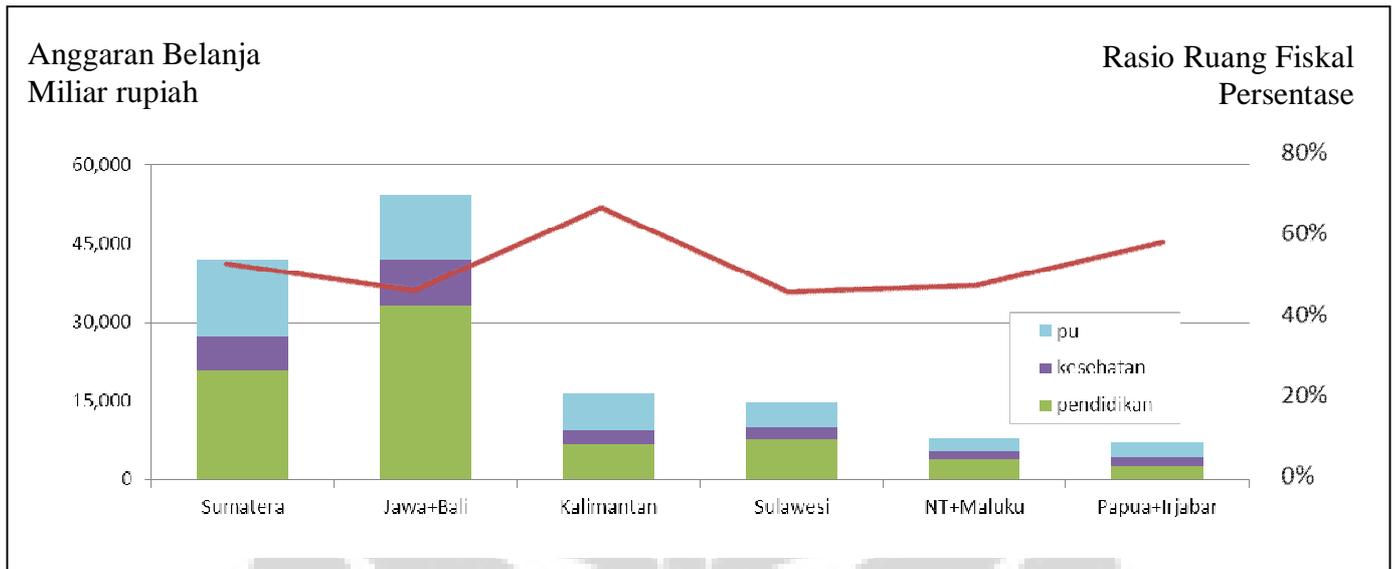
Grafik 1.3. Grafik Lima Penerima PNPM Tahun 2007-2009 dan Lima Daerah dengan Pengurangan Persentase Kemiskinan Terbesar selama Tahun 2007-2010

Dari data pada grafik 1.3 menunjukkan bahwa walaupun Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah dan persentase penduduk miskin terbesar di Indonesia tetapi selama tahun 2007 sampai 2010 mereka telah mengalami penurunan yang sangat besar yaitu 4,72 persen dibawah Nangroe Aceh Darussalam dengan 5,67 persen dan Sulawesi Barat dengan 5,45 persen. Hal ini merupakan prestasi yang sangat bagus dengan penurunan sekitar 1,5 juta jiwa selama tiga tahun dibandingkan daerah lain.



Grafik 1.4. Grafik Ruang Fiskal dalam APBD Kabupaten/Kota Tahun 2007-2009 dan Jumlah Penduduk Miskin Rata-rata selama Tahun 2007-2009 berdasarkan Wilayah

Sementara itu dalam analisa APBD kabupaten/kota di Indonesia terdapat gambaran bahwa daerah di pulau jawa dan bali memiliki ruang fiskal terendah dibandingkan wilayah yang lain namun memiliki jumlah penduduk miskin yang terbesar. Ruang fiskal yang tersedia dapat menunjukkan seberapa besar kemampuan daerah dalam mengalokasikan dana untuk kegiatan atau program kemiskinan. Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah maka semakin besar dana yang dapat digunakan untuk penanggulangan kemiskinan. Dalam buku Analisa APBD tahun 2010 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyebutkan bahwa ruang fiskal adalah ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah. Dan semakin beratnya beban belanja pegawai (terutama gaji PNSD), maka kemampuan keuangan daerah pada dasarnya semakin turun. Hal ini menyebabkan ruang fiskal daerah semakin turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan persentase ruang fiskal terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Penurunan ruang fiskal ini tentu membuat kemampuan kabupaten/ kota untuk melakukan pengentasan kemiskinan sangat terbatas.



Grafik 1.5. Grafik Anggaran Belanja Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum) dalam APBD Kabupaten/Kota dan Ruang Fiskal Tahun 2008 berdasarkan Wilayah

Dengan ruang fiskal yang rendah ternyata berdasarkan grafik 1.4 wilayah jawa dan bali menganggarkan belanja pelayanan dasar lebih tinggi dari pada wilayah lainnya. Tentu ini menunjukkan bagaimana pengelolaan anggaran di wilayah jawa dan bali menitikberatkan pada pelayanan dasar yang diharapkan juga dapat menurunkan jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut.

1.2 Perumusan masalah

Dengan adanya dua hal yang dilaksanakan untuk menanggulangi pengentasan kemiskinan yaitu dengan menggunakan APBN melalui program PNPM dan APBD melalui anggaran bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum menjadikan pendanaan dalam pengentasan kemiskinan ini menjadi perhatian Pemerintah Pusat dan Daerah. Oleh karena itu penulis mencoba melihat bagaimana sebenarnya pengaruh dari alokasi PNPM dan alokasi anggaran belanja daerah untuk pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum terhadap kemiskinan di Indonesia.

Pemilihan program PNPM dalam penelitian dari beberapa program pengentasan kemiskinan lain seperti jamkesmas, raskin, atau program keluarga harapan karena sasaran program ini adalah kelompok masyarakat umum.

Sehingga diharapkan dapat disandingkan dengan program APBD untuk pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum yang juga sasarannya adalah masyarakat umum bukan dikhususkan kepada penduduk miskin.

Dari dua saluran dana dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah apakah mempunyai dampak yang signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan menjadi isu utama dalam penilaian kinerja pemerintahan yang membuat pemerintah pusat dan daerah menjadikan kemiskinan menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintahannya. Namun apakah benar ketertarikan pemerintah pusat dan daerah ini berdampak terhadap masyarakat miskin.

Penentuan Jawa Timur sebagai objek penelitian disebabkan oleh faktor bahwa Jawa Timur sebagai daerah dengan dana perimbangan terbesar dan jumlah penduduk miskin terbesar pada tahun 2007-2009. Selanjutnya, kenapa kabupaten/kota yang menjadi objek penelitian? Ada dua alasan. Pertama, sesuai dengan semangat yang terkandung dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten/kota merupakan ujung tombak otonomi daerah dalam rangka melayani masyarakat. Kedua, program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Sementara jika Pemerintah Provinsi, program pembangunannya bersifat koordinatif.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan garis besar permasalahan yang terjadi yaitu seberapa besar pengaruh pendanaan secara bersama-sama melalui PNPM dan anggaran belanja daerah untuk pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum terhadap kemiskinan di Jawa Timur?

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendanaan secara bersama-sama melalui PNPM dan anggaran belanja daerah untuk pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum terhadap kemiskinan di Jawa Timur.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu dengan mengetahui dampak pendanaan baik secara bersama-sama melalui APBN dan APBD terhadap kemiskinan di Jawa Timur maupun secara sendiri-sendiri maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan yang lebih terarah dan efektif mengenai program pengentasan kemiskinan di Jawa Timur.

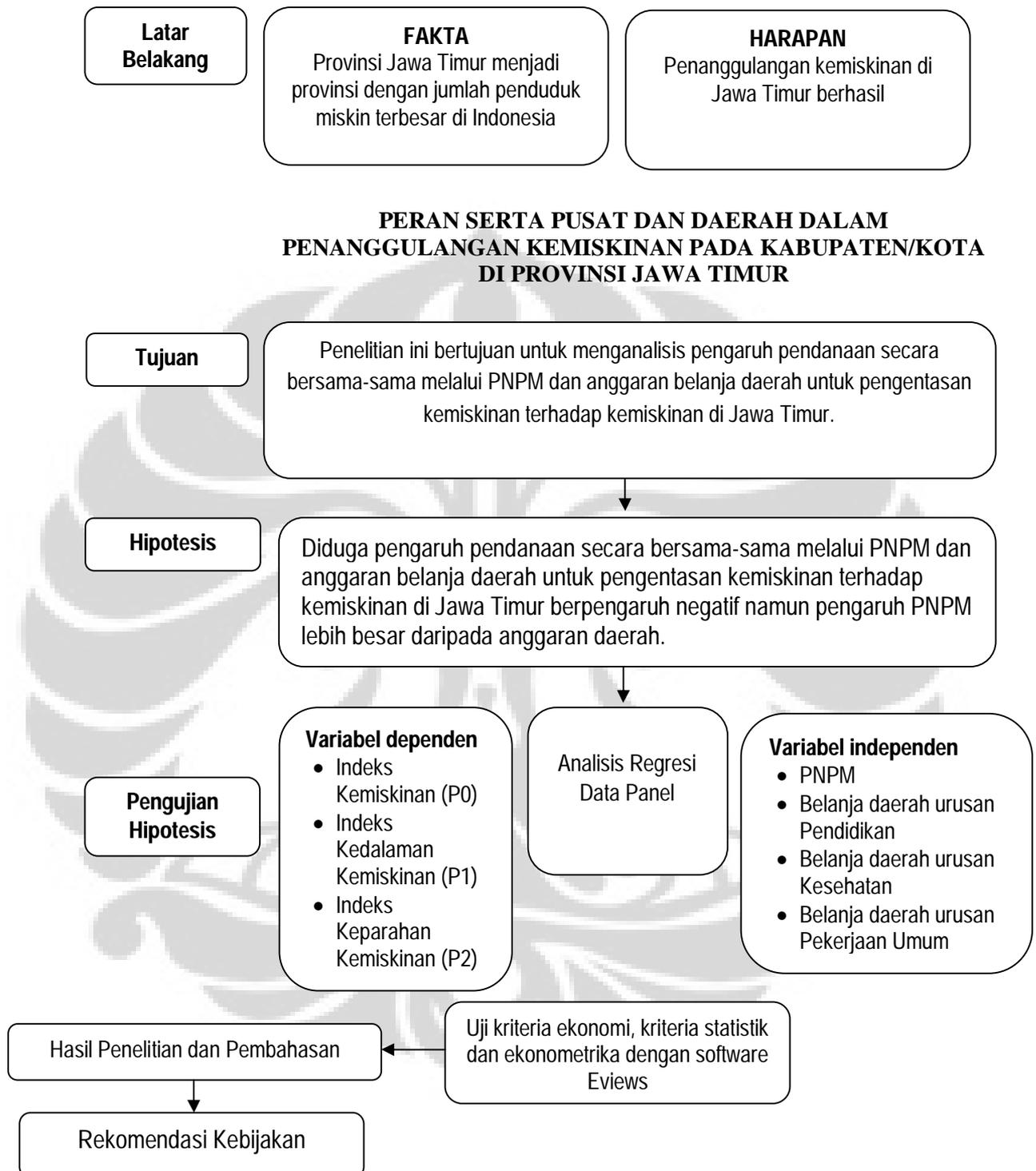
1.5 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut: Diduga pengaruh pendanaan secara bersama-sama melalui PNPM dan anggaran belanja daerah untuk pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum terhadap kemiskinan di Jawa Timur berpengaruh negatif dan pengaruh PNPM lebih besar daripada anggaran daerah.

1.6 Ruang Lingkup

Penelitian ini dibatasi pada pendanaan mengenai pengentasan kemiskinan yang berasal dari PNPM dan anggaran daerah untuk pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun mulai dari Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009. Periode pengambilan data tersebut seiring dengan dimulainya program PNPM pada tahun 2007 dan keterbatasan data terakhir mengenai kemiskinan yaitu tahun 2009.

1.7 Kerangka Pikir Pemecahan Masalah



1.8 Sistematika penulisan

Penulisan penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I : **Pendahuluan**

Memaparkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, kerangka pikir pemecahan masalah serta ruang lingkup dan batasan.

Bab II : Tinjauan Literatur

Kajian literatur tentang kemiskinan, anggaran pendapatan dan belanja daerah, program penanggulangan kemiskinan, dan penelitian sebelumnya. Dalam bab ini juga dipaparkan tentang gambaran kemiskinan di wilayah penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Memaparkan tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang analisis atau pembahasan terhadap hasil penelitian. Selain itu, pada bab ini memaparkan sumbangan pemikiran dan penilaian dari pengamatan dan analisis data.

Bab V : Kesimpulan

Berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, akan diberikan juga rekomendasi kebijakan terhadap hal-hal yang menjadi masalah.

BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Definisi Kemiskinan

Dalam publikasinya dengan judul *Understanding Poverty*, World Bank (2005) menjelaskan bahwa kemiskinan memiliki bariyak wajah dan pengertian. Dan semua wajah itu, World Bank menyimpulkan bahwa kemiskinan adalah kondisi dimana orang ingin lepas darinya (World Bank, 2005). Dalam publikasi yang lain, yaitu *World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty*, World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai ketercabutan dari kehidupan yang layak. Miskin adalah keadaan kelaparan, kurang tempat tinggal, kurang sandang, dan kurang pendidikan. Menurut definisi ini, orang menjadi miskin bukan karena kelemahan mereka, namun karena hal itu terjadi di luar kendali mereka. Biasanya, karena kebijakan yang buruk dari Institusi negara atau masyarakat yang tidak memperhikan suara mereka (World Bank, 2001).

Selanjutnya dalam *World Development Report 2004: Making Services Work for Poor People*, World Bank mendefinisikan masyarakat miskin sebagai mereka yang hidup dalam keluarga yang kemampuan konsumsinya di bawah garis tertentu, seperti di bawah \$1 atau \$2 per hari, atau di bawah level yang ditetapkan negara masing-masing (World Bank, 2004).

Ada banyak hal yang rnyebabkan seseorang masuk dalam kategori miskin. Namun, menurut World Bank, setidaknya ada tiga faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu: (i) Rendahnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti: makanan, tempat tinggal, pakaian, dan kesehatan dan pendidikan; (ii) Ketidakmampuan untuk bersuara dan ketiadaan kekuatan di depan institusi negara dan masyarakat; (iii) Rentan terkena guncangan ekonomi, terkait dengan ketidakmampuan untuk menanggulangnya.

Sementara itu, terdapat juga banyak faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung tingkat kemiskinan, mulai dan produktivitas tenaga kerja, tingkat upah netto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja

(termasuk jenis pekerjaan yang tersedia), tingkat inflasi, pajak dan subsidi, investasi, alokasi serta kualitas sumber daya alam, ketersediaan fasilitas umum (seperti pendidikan dasar, kesehatan, informasi, transportasi, listrik, air bersih, dan lokasi pemukiman), penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi fisik dan alam suatu wilayah, etos kerja dan motivasi pekenja, budaya atau tradisi, politik, bencana alam, dan peperangan. Sebagian besar dan faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, tingkat pajak yang tinggi menyebabkan tingkat upah netto rendah, ini bisa mengurangi motivasi kerja seseorang rendah hingga produktivitasnya menurun. Produktivitas yang turun selanjutnya menyebabkan tingkat upah nettonya berkurang lagi, dan seterusnya. Jadi, tidak mudah untuk memastikan apakah penyebab langsung dan kemiskinan (Tambunan, 2001).

Teori yang lain adalah Todaro (2000) yang menyatakan tinggi-rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yakni: (1) tingkat pendapatan nasional rata-rata, dan (2) lebar-sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Bila pendapat Todaro tersebut diterapkan pada wilayah yang lebih sempit, yaitu daerah, maka tinggi-rendahnya tingkat kemiskinan di suatu daerah juga tergantung pada dua faktor utama tersebut, yaitu: (1) tingkat pendapatan daerah rata-rata, dan (2) lebar-sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Jadi, setinggi apapun tingkat pendapatan daerah per kapita yang dicapai suatu daerah, selama distnbusi pendapatannya tidak merata, maka tingkat kemiskinan di daerah tersebut pasti akan tetap parah. Demikian pula sebaliknya, semerata apapun distribusi pendapatan di suatu daerah, jika tingkat pendapatan daerah rata-ratanya tidak mengalami perbaikan, maka kemelaratan juga akari semakin meluas.

Todaro juga menjelaskari bahwa adanya variasi kemiskinan disebabkan oleh: (1) perbedaan geografis, penduduk, dan pendapatan; (2) perbedaan sejarah; (3) perbedaan kekayaan SDA dan kualitas SDM; (4) perbedaan peranan sektor swasta dan negara; (5) perbedaan struktur perindustrian; (6) perbedaan pada ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik dañ negara lain; dan (7) perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik, dan kelembagaan dalam negeri.

Terminologi lain yang pernah dikemukakan sebagai wacana atau kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi dua macam yaitu kemiskinan struktural dan kultural. Soetandyo Wignjosoebroto dalam “Kemiskinan Struktural: Masalah dan Kebijakan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan “Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan”. Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkan akan tetapi (lebih lanjut dari itu) juga melanggengkan kemiskinan di masyarakat. Dalam kondisi struktur yang demikian itu kemiskinan menggejala bukan oleh sebab-sebab yang alami atau oleh sebab-sebab yang pribadi, melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tak adil. Tatanan yang tak adil ini menyebabkan banyak warga masyarakat gagal memperoleh peluang atau akses untuk mengembangkan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga mereka yang malang dan terperangkap ke dalam perlakuan yang tidak adil ini menjadi serba kekurangan, tak setara dengan tuntutan untuk hidup yang layak dan bermartabat sebagai manusia. Salah satu contoh adalah kemiskinan karena lokasi tempat tinggal yang terisolasi, misalnya, orang Mentawai di Kepulauan Mentawai, orang Melayu di Pulau Christmas, dan suku Tengger di pegunungan Tengger Jawa Timur.

Sedangkan kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Padahal indikator kemiskinan tersebut seyogjanya bisa dikurangi atau bahkan secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kemiskinan karena tradisi sosio-kultural terjadi pada suku-suku terasing, seperti halnya suku Badui di Cibeo Banten Selatan, suku Dayak di pedalaman Kalimantan, dan suku Kubu di Jambi.

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi

pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Kemiskinan secara konseptual dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Mengukur kemiskinan dengan mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut, sedangkan konsep kemiskinan yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif (Tambunan, 2001). Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dan distribusi yang dimaksud. Di negara-negara maju, kemiskinan relatif diukur sebagai suatu proporsi dan tingkat pendapatan rata-rata per kapita. Sebagai suatu ukuran relatif, kemiskinan relatif dapat berbeda menurut negara atau periode di dalam suatu negara.

Kemiskinan relatif ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan oleh masyarakat setempat sehingga proses penentuannya sangat subjektif. Mereka yang berada di bawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Ukuran atau definisi tersebut sering membantu kita untuk menentukan program sasaran yang ditujukan untuk membantu penduduk miskin. Dalam praktek, negara kaya mempunyai garis kemiskinan yang lebih tinggi daripada negara miskin seperti pernah dilaporkan oleh Ravallion (1998:26). Tatkala negara menjadi lebih kaya, negara tersebut cenderung merevisi garis kemiskinannya menjadi lebih tinggi. Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan, dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Misalnya, garis kemiskinan US \$1 per hari mungkin bermanfaat di Vietnam, dimana 27 persen penduduk tergolong miskin dengan standar ini (Haughton, 2000), akan tetapi di Amerika Serikat hampir tidak ada orang yang akan tergolong miskin dengan standar ini.

Sementara itu, kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang menggambarkan kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi. Ini adalah ukuran tetap, misalnya dalam bentuk kebutuhan kalori minimum ditambah

komponen-komponen non makanan yang juga sangat diperlukan untuk bertahan hidup. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan absolut “tetap (tidak berubah)” dalam hal standar hidup, garis kemiskinan absolut mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Garis kemiskinan absolut sangat penting jika seseorang akan mencoba menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu. Angka kemiskinan akan terbanding antara satu negara dengan negara lain hanya jika garis kemiskinan absolut yang sama digunakan di kedua negara tersebut. Bank Dunia memerlukan garis kemiskinan absolut agar dapat membandingkan angka kemiskinan antar negara. Hal ini bermanfaat dalam menentukan ke mana menyalurkan sumber daya finansial yang ada, juga dalam menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan. Pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan, yaitu: a) US \$ 1 per hari dimana diperkirakan ada sekitar 1,2 miliar penduduk dunia yang hidup di bawah ukuran tersebut pada tahun 2005; b) US \$ 2 per hari di mana lebih dari 2 miliar penduduk yang hidup kurang dari batas tersebut. Kedua batas ini adalah garis kemiskinan absolut.

Di Indonesia, untuk mengukur kemiskinan absolut, BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dan sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non-makanan yang bersifat mendasar (BPS, 2003). BPS menggunakan ukuran pengeluaran atau konsumsi untuk menghitung jumlah penduduk miskin, yaitu didasarkan pada data Sensus Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi. BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita (garis kemiskinan makanan) ditambah kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang, yaitu papan, sandang, sekolah, dan transportasi serta kebutuhan individu dan rumah tangga dasar lainnya (garis kemiskinan non makanan).

Pada tahun 2000 BPS melakukan studi Penentuan Kriteria Penduduk Miskin (SPKPM 2000) untuk mengetahui karakteristik-karakteristik rumah tangga yang mampu mencirikan kemiskinan secara konseptual (pendekatan kebutuhan dasar/garis kemiskinan). Hal ini menjadi sangat penting karena pengukuran makro (basic needs) tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi rumah tangga/penduduk miskin di lapangan. Informasi ini berguna untuk penentuan sasaran rumah tangga program pengentasan kemiskinan (intervensi program). Dari hasil SPKPM 2000 tersebut, diperoleh delapan variabel yang dianggap layak dan operasional untuk penentuan rumah tangga miskin di lapangan. Kedelapan variabel tersebut adalah luas lantai per kapita ($\leq 8 \text{ m}^2$), jenis lantai (tanah), air minum/ ketersediaan air bersih (air hujan/sumur tidak terlindung), jenis jamban/WC (tidak ada), kepemilikan aset (tidak punya aset), pendapatan (total pendapatan per bulan ≤ 350.000), pengeluaran persentase pengeluaran untuk makanan (>80 persen), dan konsumsi lauk pauk (daging, ikan, telur, ayam tidak ada).

2.2 Pengukuran Kemiskinan

Ada tiga indeks yang digunakan sebagai ukuran kemiskinan oleh BPS yaitu Indeks Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Pertama, *Head Count Index* (P0) yang biasa disebut Indeks Kemiskinan. Indeks ini merupakan manifestasi dan *the incidence of poverty* yang menggambarkan persentase populasi yang hidup di dalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi per kapita di bawah garis kemiskinan. Semakin kecil angka ini menunjukkan semakin berkurangnya jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Demikian juga sebaliknya, bila angka P0 besar maka menunjukkan tingginya jumlah persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.

Kedua, adalah *Poverty Gap Index* (P1) disebut juga Indeks Kedalaman Kemiskinan. Indeks ini merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Angka ini memperlihatkan jurang (gap) antara pengeluaran atau pendapatan rata-rata yang diterima penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin tinggi angka ini maka semakin besar kesenjangan pengeluaran/pendapatan penduduk miskin

terhadap garis kemiskinan atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk.

Ketiga, adalah *Distributionally Sensitive Index* (P2) disebut juga Indeks Keperlahan Kemiskinan. Indeks ini dapat memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin dan dapat pula digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Angka ini memperlihatkan sensitivitas distribusi pendapatan antar kelompok miskin. Semakin kecil angka ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan diantara penduduk miskin akan semakin merata.

2.3 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah dalam penyusunan rancangan APBD menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. APBD Perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi. Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. Surplus APBD dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Daerah tahun anggaran berikutnya (UU No.33 tahun 2004).

APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Anggaran pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Penimbangan, dan Lain-lain Pendapatan. Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Anggaran belanja diklasifikasikan menurut

organisasi, fungsi, program, kegiatan. dan jenis belanja. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Anggaran pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Dalam klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdapat dua jenis belanja utama yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Untuk belanja tidak langsung, dipergunakan untuk belanja pegawai, sedangkan belanja langsung dipergunakan untuk pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Rincian anggaran belanja tidak langsung adalah gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, khusus pada SKPD Sekretariat DPRD dianggarkan juga Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sedangkan rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan

Dalam penyusunan APBD terdapat klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan yaitu terdiri atas belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Klasifikasi belanja menurut **urusan wajib** mencakup: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum; d. perumahan rakyat; e. penataan ruang; f. perencanaan pembangunan; g. perhubungan; h. lingkungan hidup; i. pertanahan; j. kependudukan dan catatan sipil; k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; m. sosial; n. ketenagakerjaan; o. koperasi dan usaha kecil dan menengah; p. penanaman modal; q. kebudayaan; r. kepemudaan dan olah raga; s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; u. ketahanan pangan; v. pemberdayaan masyarakat dan desa; w. statistik; x. kearsipan; y. komunikasi dan informatika; dan z. perpustakaan. Klasifikasi belanja menurut **urusan pilihan** mencakup: a. pertanian; b. kehutanan; c. energi dan sumber daya mineral; d. pariwisata; e. kelautan dan perikanan; f. perdagangan; g. industri; dan h. ketransmigrasian.

Secara umum penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan meningkatkan pendapatan mereka dan pada saat yang sama mengurangi beban pengeluaran mereka terutama dalam memperoleh pelayanan dasar. Pendapatan dapat

ditingkatkan melalui pemberian bantuan sosial atau meningkatkan keterlibatan mereka dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan beban pengeluaran seperti pendidikan, kesehatan, air bersih serta sanitasi, dapat dikurangi melalui peningkatan akses terhadap pelayanan dasar.

Akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Di sisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (*human capital*).

Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang ia merupakan cara yang efektif bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya.

Selain pendidikan, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan juga merupakan kunci investasi modal manusia. Status kesehatan yang lebih baik, akan dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan keluar dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak merupakan unsur penting dalam mencapai derajat kesehatan yang tinggi yang merupakan bagian dari infrastruktur daerah. Konsumsi air minum yang tidak layak dan buruknya sanitasi perumahan meningkatkan kerentanan individu dan kelompok masyarakat terhadap penyakit.

Salah satu studi yang pernah dilakukan Jasmina, et al. (2001) dengan menggunakan data gabungan APBD Kabupaten/Kota TA 1999/2000 (288 kabupaten/kota), SUSENAS dan Podes 2000,) menganalisis alokasi belanja pembangunan di masing-masing kabupaten/kota tersebut, apakah bersifat pro

orang miskin, netral atau pro orang kaya. Sektor pembangunan yang dijadikan indikator adalah Sektor Pertanian dan Kehutanan, Transportasi, Pendidikan, Kesehatan dan Sektor Perumahan dan Pemukiman. Secara singkat hasil studi ini menunjukkan rata-rata pembelanjaan untuk sektor pertanian, pendidikan dan perumahan lebih banyak dinikmati oleh kelompok 20 persen masyarakat miskin. Untuk sektor transportasi dan kesehatan manfaat yang dinikmati oleh 20 persen kelompok masyarakat miskin relatif sama dengan yang dinikmati oleh 20 persen kelompok masyarakat terkaya. Tetapi jika digunakan variable binary, secara rata-rata prosentase penerima manfaat untuk sektor transportasi dan sektor kesehatan relatif lebih kecil untuk kelompok masyarakat miskin dibandingkan dengan kelompok masyarakat kaya. Dengan kata lain, pengeluaran untuk sektor transportasi dan kesehatan cenderung bersifat regresif sampai dengan netral.

Sedangkan Usman, Bonar M. Sinaga, dan Hermanto Siregar (2006) dalam penelitian yang berjudul Analisis Determinan Kemiskinan Sebelum dan Sesudah Desentralisasi Fiskal menyimpulkan bahwa Secara keseluruhan, yang harus menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah dalam penanggulangan kemiskinan adalah sektor-sektor yang berhubungan dengan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan keluarga, kesejahteraan keluarga, dan infrastruktur.

Kartasmita (1996) menjelaskan penyebab kemiskinan merupakan akibat dari beberapa faktor yang terdiri dari: pertama, rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan pengembangan diri yang terbatas. Kedua, rendahnya tingkat kesehatan dimana tingkat kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan daya tahan fisik, daya pikir serta prakarsa menjadi rendah pula. Dengan demikian produktivitas yang dihasilkan menjadi berkurang, baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Akibat dari hal ini adalah *bargaining position* mereka dalam hampir seluruh kegiatan ekonomi menjadi lemah. Ketiga, terbatasnya lapangan kerja. Selama lapangan pekerjaan atau kegiatan usaha masih ada, harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan masih dapat dilakukan. Keempat, kondisi keterisolasian. Dalam kondisi terpencil atau terisolasi penduduk akan kurang mampu menjalankan roda perekonomiannya.

2.4 Ruang Fiskal

Dalam mengalokasikan anggaran terdapat istilah ruang fiskal yang pada dasarnya merupakan ukuran besarnya dana daerah dalam satu tahun anggaran yang bisa digunakan secara bebas oleh daerah sesuai dengan kebutuhannya. Ukuran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar pendapatan daerah harus dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bisa dihindari, seperti gaji PNS, dan selain itu terdapat berbagai jenis pendapatan yang bersifat *earmarked* (ditentukan penggunaannya). Semakin besar dana yang masih bisa digunakan secara bebas oleh daerah ditunjukkan dengan Ruang Fiskal yang semakin besar.

Indikator Ruang Fiskal menunjukkan jumlah dana netto yang masih bisa digunakan oleh Pemda setelah pendapatan *non earmarked* dikurangkan dengan belanja pegawai tidak langsung. Secara agregat nasional, maupun di tingkat Provinsi dan Kab./Kota terjadi penurunan ruang fiskal, utamanya dalam persentase (terhadap pendapatan). Penurunan Ruang Fiskal daerah menunjukkan bahwa kemampuan dan fleksibilitas daerah untuk menggunakan anggaran mereka untuk kebutuhan belanja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil mereka menjadi semakin sempit. Ruang Fiskal merupakan Total Pendapatan dikurangi DAK, Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Penyesuaian/otsus, dan Belanja Pegawai Tidak langsung.

2.5 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Strategi Pemerintah dalam mengurangi kemiskinan ini difokuskan melalui 3 klaster program penanggulangan kemiskinan, yaitu:

Klaster Pertama

Terdiri dari kelompok program bantuan dan perlindungan sosial terpadu berbasis keluarga, yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, dan perbaikan kualitas hidup keluarga miskin dengan sasaran rumah tangga sangat miskin (RTSM), rumah tangga miskin (RTM) dan rumah tangga hampir miskin (RTHM). Program utamanya adalah Raskin, Jamkesmas, PKH dan Beasiswa Miskin.

Klaster Kedua

Merupakan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui program PNPM Mandiri yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat melalui usaha dan bekerja bersama untuk mencapai keberdayaan dan kemandirian dengan sasaran kelompok masyarakat/kecamatan miskin.

Klaster Ketiga

Adalah kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (UMK) yang bertujuan untuk membuka dan memberikan akses permodalan dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Tabel 2.1 Program Penanggulangan Kemiskinan Nasional dan Sasarannya

Program	Sasaran
1. Program Keluarga Harapan (PKH)	Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
2. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)	Rumah Tangga Hampir Miskin, Miskin dan Sangat Miskin
3. Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin)	Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
4. Program Beasiswa Pendidikan untuk Keluarga Miskin	Siswa dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
5. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri	Kelompok Masyarakat Umum
a. PNPM Mandiri Perdesaan	Kelompok Masyarakat Perdesaan
b. PNPM Mandiri Perkotaan	Kelompok Masyarakat Perkotaan
c. PNPM Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Wilayah (PISEW)	Kelompok Masyarakat Perdesaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah program pembangunan berbasis masyarakat atau *Community Driven Development*

(CDD), dirumuskan untuk membangun kemandirian masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Program ini dimulai pada tahun 2006 untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan beberapa program pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh berbagai kementerian teknis. Integrasi program berbasis pemberdayaan masyarakat ke dalam PNPM Mandiri, memperkuat kemampuan masyarakat untuk merumuskan dan melaksanakan kegiatan pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui fasilitasi dan pelatihan. Hibah langsung diberikan sebesar Rp1,5 sampai Rp3,0 miliar per kecamatan per tahun. Hibah tersebut disalurkan ke masyarakat di tingkat desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah disepakati sebagai hasil proses pengambilan keputusan yang partisipatif. Bagian terbesar dari hibah desa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur transportasi desa.

Selain membangun kemandirian masyarakat, pelaksanaan PNPM Mandiri juga mencerminkan pergeseran dari pendekatan proyek ke pendekatan program. Harmonisasi berbagai proyek ke dalam PNPM Mandiri telah mengurangi tumpang tindih kegiatan di tingkat lokal. Untuk mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri, telah disusun pedoman umum serta petunjuk pelaksana khusus. Pedoman ini memberikan fondasi dasar dan mekanisme untuk memberdayakan masyarakat dan mengelola pelaksanaan semua kegiatan. Program ini juga akan memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terintegrasi yang menghubungkan MIS dari berbagai sub-program PNPM Mandiri dan mendukung analisis efektivitas pelaksanaan PNPM Mandiri.

Pada tahun 2009 pelaksanaan PNPM Mandiri Inti telah mencapai 6.408 kecamatan, semua kecamatan di Indonesia. Pada tahun 2010 PNPM Mandiri mencakup 6.328 kecamatan. Sekitar 17.890 fasilitator masyarakat telah dimobilisasi untuk mendukung pelaksanaan di tingkat masyarakat dan total Rp 10,35 triliun dari sumber pemerintah daerah dan pusat sedang disalurkan sebagai hibah (*block grant*) kepada masyarakat (Tabel 2.1). Di samping program inti PNPM Mandiri, terdapat juga beberapa program PNPM pendukung yang sedang dilaksanakan. Ini termasuk: (i) PNPM Generasi sebagai inisiatif untuk

meningkatkan kapasitas generasi mendatang, yang selama 2009 diterapkan di 164 kecamatan di 21 kabupaten di lima provinsi dan pada tahun 2010 akan dilaksanakan di 189 kecamatan di 25 kabupaten di lima provinsi, (ii) PNPM Kegiatan Perikanan dan Kelautan yang dilaksanakan di 133 kecamatan di 120 kabupaten pada 33 provinsi; dan (iii) PNPM Agribisnis (PUAP) yang dilaksanakan pada tahun 2009 di 9.884 desa dan pada tahun 2010 akan mencapai 10.000 desa untuk mendukung pengembangan dan perluasan agribisnis.

Hingga kini, PNPM telah menciptakan kesempatan kerja bagi 21.800 dukungan staf (termasuk fasilitator). Sekitar 62 juta hari kerja dari kegiatan telah dilaksanakan dan menyediakan lapangan kerja sementara bagi anggota masyarakat yang secara langsung terlibat dalam kegiatan pembangunan. Selain itu, sekitar 650.000 kegiatan ekonomi mikro telah menerima pinjaman mikro. Lebih dari itu, berbagai infrastruktur telah dihasilkan dari PNPM Mandiri, termasuk perbaikan jalan desa, fasilitas kesehatan, fasilitas air bersih dan sanitasi.

Sebuah evaluasi dampak PNPM Mandiri tahun 2007 menunjukkan bahwa program telah memberikan manfaat yang signifikan, antara lain: i) Tingkat pengangguran di lokasi PNPM adalah lebih rendah daripada di daerah kontrol; ii) Konsumsi rata-rata per rumah tangga meningkat; iii) kemiskinan berkurang dan rumah tangga miskin yang berpartisipasi di kecamatan memiliki kesempatan untuk meningkat di atas garis kemiskinan nasional; dan iv) akses terhadap fasilitas kesehatan meningkat di daerah PNPM.

Dalam pendanaan program PNPM terdapat dana pendamping yang diwajibkan kepada Daerah penerima yang disebut dengan Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) dan dana yang berasal dari APBN yaitu Dana untuk Urusan Bersama (DUB). Besarnya dana pendamping yang dikeluarkan oleh daerah didasarkan oleh kemampuan fiskal daerah dan kondisi kemiskinan daerah yang telah dipetakan oleh Kementerian Keuangan dalam Indeks Ruang Fiskal dan Kemiskinan Daerah (IRFKD). Dalam IRFKD menghasilkan empat kluster/ kelompok daerah yaitu daerah dengan kriteria pendamping sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Daerah dengan kriteria sangat tinggi atau dengan Kuadran I adalah daerah yang mempunyai ruang fiskal tinggi dan kemiskinan tinggi. Daerah

dengan kriteria tinggi atau dengan Kuadran IV adalah daerah yang memiliki ruang fiskal tinggi dan kemiskinan rendah. Daerah dengan kriteria sedang atau dengan Kuadran II adalah daerah yang memiliki ruang fiskal rendah dan kemiskinan tinggi. Dan daerah dengan kriteria rendah atau dengan Kuadran I adalah daerah yang memiliki ruang fiskal rendah dan kemiskinan rendah.

Kabupaten dan kota di Jawa Timur termasuk dalam tiga kluster yaitu kluster I, II, dan III. Tidak ada daerah di Jawa Timur termasuk dalam kluster IV. Sebagian besar daerah di Jawa Timur masuk dalam kluster III dan II dan sebagian kecil yang masuk dalam kluster I. Daerah yang masuk dalam kluster I hanya dua daerah yaitu Kota Blitar dan Kota Mojokerto. Sedangkan yang masuk dalam kluster II ada 17 daerah antara lain Kabupaten Blitar, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Magetan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, dan Kota Batu. Sedangkan daerah yang termasuk dalam kluster III ada 19 daerah antara lain Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Nganjuk.

2.6 Karakteristik Wilayah Penelitian

Jawa Timur adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Ibukotanya adalah Surabaya. Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Secara administratif, Jawa Timur terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota, menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia.

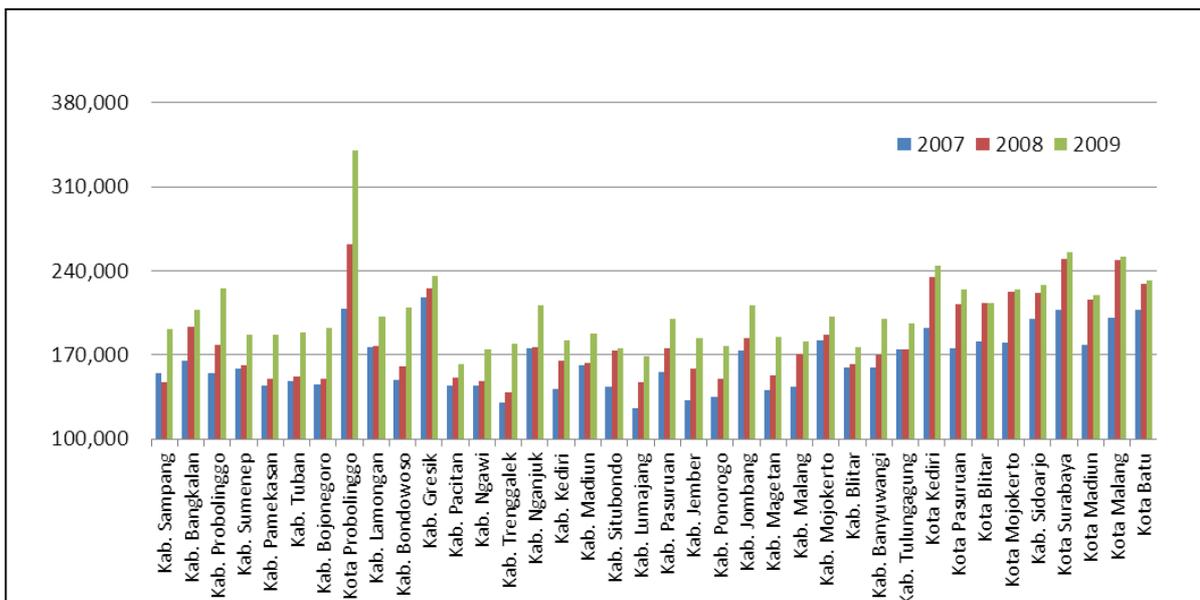
Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur, hierarki perkotaan di Jawa Timur terdiri atas perkotaan metropolitan, perkotaan menengah, dan perkotaan kecil.

1. **Perkotaan metropolitan** meliputi Perkotaan Surabaya Metropolitan Area (Kota Surabaya, perkotaan Sidoarjo dan sekitarnya, perkotaan Gresik dan sekitarnya, serta perkotaan Bangkalan dan sekitarnya) dan Perkotaan

Malang Raya (Kota Malang, Kota Batu, dan perkotaan Kepanjen dan sekitarnya).

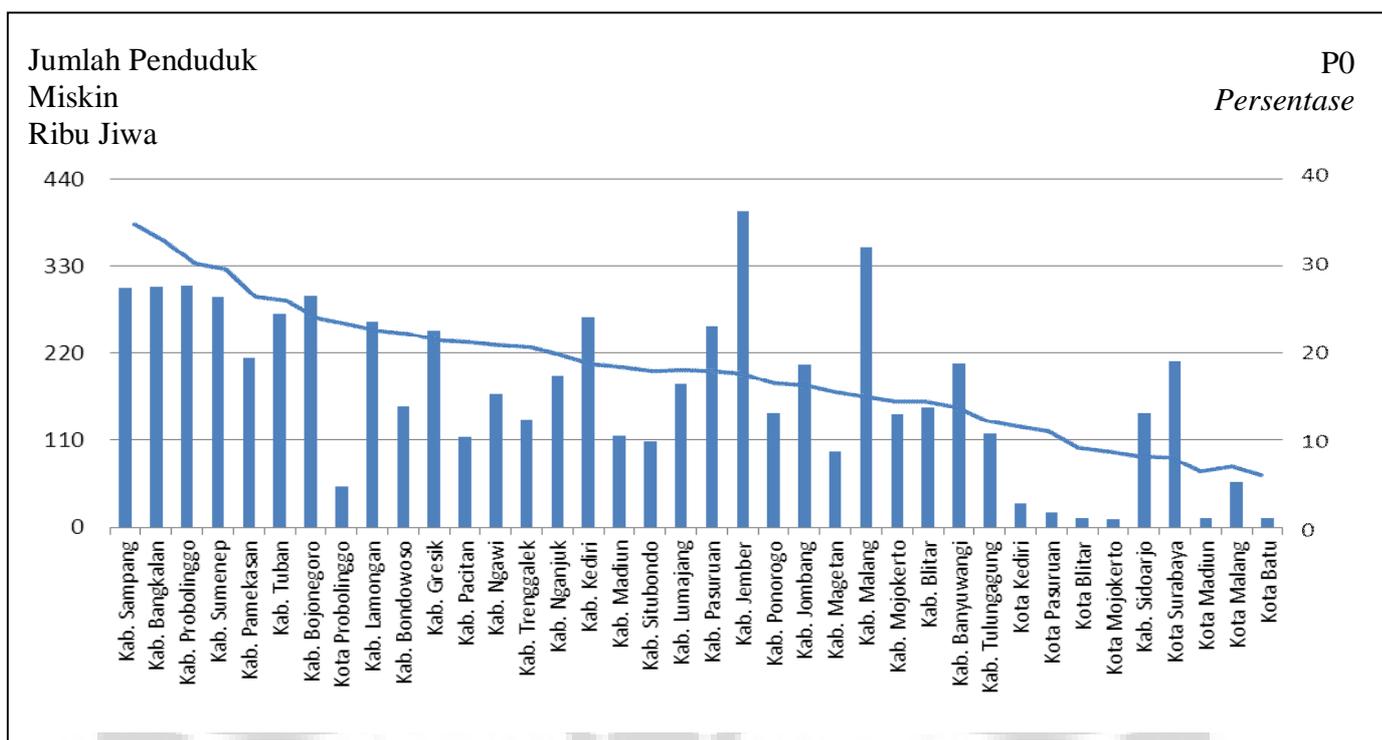
2. **Perkotaan menengah** terdiri atas: Perkotaan Tuban, Perkotaan Lamongan, Perkotaan Jombang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Perkotaan Bojonegoro, Kota Madiun, Kota Kediri, Perkotaan Jember, Perkotaan Banyuwangi, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Perkotaan Pamekasan dan Kota Batu.
3. **Perkotaan Kecil** terdiri atas: Perkotaan Sampang, perkotaan Sumenep, Perkotaan Ngawi, Perkotaan Magetan, Perkotaan Nganjuk, Perkotaan Bondowoso, Perkotaan Tulungagung, Perkotaan Trenggalek, Perkotaan Ponorogo, Perkotaan Situbondo, Perkotaan Pacitan, Perkotaan Lumajang, Perkotaan Kepanjen, Perkotaan Kraksaan dan Perkotaan Caruban.

Penduduk miskin di Jawa Timur adalah terbesar di Indonesia. Sebagian besar penduduk miskin tersebut terletak di wilayah selatan dan pulau Madura yaitu Kabupaten Jember (348.068), Kabupaten Malang (318.948), Kabupaten Bangkalan (287.648), Kabupaten Sampang (285.017), dan Kabupaten Probolinggo (280.103) yang mencapai 1,5 juta jiwa atau sekitar 26 persen dari penduduk miskin di Jawa Timur, sedangkan daerah yang mempunyai sedikit penduduk miskin adalah sebagian besar kota yang ada di Jawa Timur antara lain Kota Pasuruan (15.756), Kota Madiun (10.316), Kota Blitar (9.779), Kota Batu (8.842), dan Kota Mojokerto (7.892) yang hanya memiliki sekitar 52 ribu jiwa atau 0,9 persen dari jumlah penduduk miskin di Jawa Timur yang mencapai 5,9 juta pada tahun 2009. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Berikut ini ditampilkan tabel garis kemiskinan Propinsi Jawa Timur periode tahun 2007 sampai 2009.



Grafik 2.1 Grafik Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada Tahun 2007-2009

Jika dilihat dari Indeks Kemiskinan (PO) atau persentase penduduk miskin, dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu pertama adalah daerah dengan persentase penduduk miskin kurang dari 10 persen, kedua antara 10-30 persen, dan yang ketiga adalah lebih dari 30 persen. Kondisi di Jawa Timur mengalami pergeseran selama tiga tahun yaitu 2007 sampai 2009. Pada tahun 2007 komposisi kelompok pertama empat daerah, kelompok kedua 30 daerah, dan kelompok tiga empat daerah dan semua ada di pulau Madura yaitu Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Bangkalan. Sedangkan pada tahun 2008 kelompok pertama meningkat menjadi tujuh daerah, kelompok kedua menjadi 28 daerah, dan kelompok ketiga berkurang menjadi tiga daerah yaitu Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Probolinggo. Dan pada tahun 2009 kelompok pertama meningkat menjadi sembilan daerah, kelompok kedua tetap 28 daerah, sedangkan kelompok ketiga menjadi dua daerah yaitu Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan.



Grafik 2.2 Grafik Jumlah Penduduk Miskin dan Indeks P0 Tahun 2008

Dari indeks P0 tersebut terlihat adanya perubahan perbaikan komposisi daerah yang terjadi selama tiga tahun dari tahun 2007 sampai 2009. Perbaikan itu antara lain adalah berkurangnya jumlah daerah yang berada di kelompok ketiga yaitu kelompok yang memiliki persentase jumlah penduduk miskin lebih dari 30 persen dari empat daerah pada tahun 2007 menjadi tiga dan terakhir dua daerah pada tahun 2009. Dan untuk dua daerah terakhir yang masih memiliki persentase di atas 30 persen ini juga mengalami perbaikan yaitu Kabupaten Sampang yang pada tahun 2007 sebesar 39,42 persen menjadi 31, 94 persen, sedangkan Kabupaten Bangkalan berubah dari 31,56 persen menjadi 30,45 persen.

Sedangkan berdasarkan indeks Kedalaman Kemiskinan yaitu P1, rata-rata P1 daerah kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2009 adalah 2,55 turun dari tahun sebelumnya yaitu 3,85 dan kondisi ini cukup baik dibandingkan dengan rata-rata nasional pada tahun 2009 yaitu 2,86. Tertinggi didominasi oleh daerah di pulau Madura yaitu Kabupaten Sampang (5,67), Kabupaten Bangkalan (5,34), Kabupaten Probolinggo (4,74), Kabupaten Sumenep (3,89), dan Kabupaten Pamekasan (3,51). Sedangkan daerah dengan indeks P1 yang terendah didominasi kota-kota besar di Jawa Timur seperti Kota Madiun (0,68), Kota Batu (0,78), Kota

Mojokerto (0,81), dan Kota Sidoarjo (0,96). Dari 38 kabupaten/kota ada 24 daerah berada di bawah rata-rata nasional sedangkan 14 daerah diatas rata-rata nasional. Dengan demikian kondisi kemiskinan di Jawa Timur tidak terlalu buruk dengan lebih banyak daerah yang berada di atas rata-rata nasional yang berarti jarak pengeluaran/pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan tidak terlalu jauh.

Untuk indeks P2 yang menunjukkan penyebaran atau distribusi pengeluaran/pendapatan di antara penduduk miskin di Jawa Timur pada tahun 2009 masih di bawah rata-rata nasional yaitu 0,64 sedangkan rata-rata nasional adalah 0,85. Pada tahun 2009 daerah yang memiliki nilai tertinggi di Jawa Timur adalah Kota Mojokerto (1,41), Kabupaten Banyuwangi (1,35), Kabupaten Sidoarjo (1,21), Kabupaten Kediri (0,98), dan Kabupaten Jombang (0,91). Sedangkan yang memiliki nilai terendah adalah Kabupaten Bojonegoro (0,17), Kabupaten Lamongan (0,19), Kabupaten Jember (0,21), Kabupaten Nganjuk (0,22), dan Kabupaten Tuban (0,33).

Dari tiga indeks kemiskinan di atas terlihat bahwa daerah di pulau Madura menjadi pusat penduduk miskin di Jawa Timur diikuti dengan daerah di bagian Selatan. Namun karakteristik daerah miskin di Jawa Timur adalah memiliki jumlah penduduk miskin yang banyak dan jarak pengeluaran/pendapatan dengan garis kemiskinan jauh dan distribusi pendapatan merata.

Penduduk di Jawa Timur pada tahun 2009 sebagian besar mempunyai pekerjaan di bidang pertanian yaitu 60,18 persen, sedangkan 37,22 persen di bidang non pertanian dan 2,60 persen tidak bekerja. Daerah-daerah dengan jumlah penduduknya bekerja di bidang pertanian terbesar yang adalah Kabupaten Pacitan (83,92 persen), Kabupaten Pamekasan (83,90), Kabupaten Ponorogo (77,99), Kabupaten Sampang (77,72), dan Kabupaten Sumenep (76,71). Sedangkan daerah dengan penduduk yang mempunyai pekerjaan di bidang pertanian terendah adalah Kota Surabaya (0,00), Kota Malang (4,29), Kota Mojokerto (4,69), Kota Madiun (7,34), dan Kota Blitar (9,42). Daerah-daerah yang mempunyai jumlah penduduk yang tidak bekerja terbesar adalah Kota Mojokerto (14,06), Kota Pasuruan (9,85), Kota Blitar (9,46), Kota Batu (9,03), dan Kota Malang (8,57).

Pada tahun 2009, sebesar 77,51 persen penduduk di Jawa Timur bekerja di sektor informal sedangkan 19,89 persen bekerja di sektor formal. Daerah yang penduduknya sebagian besar bekerja di sektor informal adalah Kabupaten Ponorogo (94,65), Kabupaten Probolinggo (92,81), Kabupaten Pamekasan (89,67), Kabupaten Pacitan (89,42), dan Kabupaten Trenggalek (87,39). Sedangkan daerah dengan penduduk yang sebagian besar bekerja di bidang formal adalah Kota Madiun (60,33), Kota Surabaya (50,49), Kota Pasuruan (49,39), Kota Kediri (46,51), dan Kota Malang (42,85).

Jumlah pengeluaran rata-rata yang dikeluarkan untuk konsumsi oleh penduduk di Jawa Timur baik miskin ataupun yang tidak miskin pada Tahun 2009 adalah 58,74 persen, sementara untuk penduduk miskin mengeluarkan 66,66 persen dari penghasilannya untuk konsumsi sedangkan untuk penduduk yang tidak miskin mencapai 57,21 persen. Daerah yang penduduk miskinnya mengeluarkan yang mempunyai angka tertinggi untuk mencukupi konsumsinya adalah Kabupaten Bangkalan (73,00), Kabupaten Situbondo (72,47), Kabupaten Pamekasan (71,11), Kabupaten Sumenep (70,58), dan Kabupaten Ngawi (70,25). Sementara daerah yang penduduk miskinnya mempunyai angka konsumsi terendah adalah Kabupaten Sidoarjo (60,22), Kabupaten Malang (59,20), Kabupaten Mojokerto (56,36), Kabupaten Surabaya (55,44), dan Kabupaten Probolinggo (47,97).

Di bidang pendidikan, angka partisipasi sekolah (APS) untuk usia 12-15 tahun di Jawa Timur pada tahun 2009 relatif tinggi yaitu 73,98 persen. Daerah yang mempunyai angka APS yang tinggi antara lain Kota Mojokerto (94,67), Kota Batu (94,59), Kabupaten Sidoarjo (94,54), Kabupaten Magetan (94,10, dan Kabupaten Madiun (93,39). Sedangkan daerah yang memiliki angka APS yang rendah antara lain Kabupaten Banyuwangi (64,43), Kabupaten Sampang (60,01), Kabupaten Bangkalan (57,95), Kabupaten Jember (56,11), Kabupaten Tulungagung (47,22).

2.7 Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang pengaruh APBD terhadap Kemiskinan pernah dilakukan oleh Hasibuan (2005) dengan mengambil data kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Hasibuan mengambil data APBD dari sisi penerimaan (pendapatan) untuk diperbandingkan dengan Kemiskinan. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa anggaran pendapatan daerah memiliki hubungan negatif dengan angka kemiskinan. Artinya, jika anggaran pendapatan daerah naik, maka angka kemiskinan akan turun. Sebaliknya, jika anggaran pendapatan daerah turun, maka angka kemiskinan akan naik. Penelitian ini menggunakan data APBD dan kemiskinan tahun 2002-2003.

Selain itu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Nadhif Alawi (2006) dengan mengambil sisi pengeluaran (belanja), khususnya belanja pembangunan realisasi APBD Jawa Tengah untuk diperbandingkan dengan kemiskinan. Penelitian ini untuk menyelidiki apakah benar Anggaran Belanja Pembangunan Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini melihat pola anggaran belanja untuk kebutuhan pembangunan yang dilokasikan ke dalam tiga jenis pengeluaran. pertama, pengeluaran untuk kebutuhan pertumbuhan ekonorni dalam rangka penciptaan lapangan kerja. Kedua, pengeluaran untuk *human capital investment* dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Ketiga, pengeluaran dalam rangka menyediakan jaminan kesejahteraan sosial. Temuan utama dan penetitlan ini adalah pembuktian bahwa ketiga jenis pengeluaran pembangunan tersebut berpengaruh terhadap ketiga jenis ukuran kemiskinan, yaitu: tingkat kemiskinan, tingkat kedalaman kemiskinan, dan tingkat keparahan kemiskinan di Jawa Tengah.

Muhammad Nova Andika (2004) menulis tentang Pengaruh Anggaran Belanja Pemerintah Daerah DKI Jakarta terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Kota. Penelitian tersebut mengambil lokasi DKI Jakarta dan objek masyarakat miskin kota. Beliau mengamati dampak meningkatnya alokasi anggaran belanja DKI Jakarta terhadap kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan oleh tingkat pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perumahan dengan menggunakan data disaggregasi anggaran belanja, yaitu alokasi anggaran beanja untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitiannya menyimpulkan adanya pengaruh positif APBD terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin kota.

Selain itu juga terdapat penelitian mengenai pengaruh PDRB, pendidikan (melek huruf), dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah di tahun 2005 – 2008 oleh Ravi Dwi Wijayanto (2010) yang menyimpulkan bahwa variabel PDRB mempunyai pengaruh negatif tetapi tidak signifikan mempengaruhi kemiskinan. Sedangkan pendidikan dan pengangguran mempunyai pengaruh negatif dan signifikan mempengaruhi kemiskinan.

Sementara James Erik Siagian (2007) mencoba menganalisis dampak pemberdayaan masyarakat melalui program pengembangan kecamatan terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang. Dalam penelitian itu dihasilkan Hasil penelitian menunjukkan kemungkinan keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan adanya program penyediaan sarana sosial dasar sebesar 7 kali lebih besar dibandingkan tanpa adanya program penyediaan sarana sosial dasar. Demikian juga dengan variabel penyediaan sarana ekonomi mempunyai kemungkinan sebesar 14 kali berhasil mengentaskan kemiskinan, serta variabel lapangan kerja mempunyai kemungkinan sebesar 24 kali berhasil mengentaskan kemiskinan dibandingkan tanpa adanya program penyediaan lapangan kerja di Kecamatan Pantai Labu.

Penelitian itu menyimpulkan bahwa penyediaan sarana sosial dasar melalui program pengembangan kecamatan memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan STM Hulu dan Kecamatan Pantai Labu. Penyediaan sarana ekonomi melalui program pengembangan kecamatan memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan STM Hulu dan Kecamatan Pantai Labu. Penyediaan lapangan kerja melalui program pengembangan kecamatan memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan STM Hulu dan Kecamatan Pantai Labu.

Dalam melihat partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan penanggulangan kemiskinan dapat dilihat melalui penelitian yang dilakukan oleh Agustri Hestiana (2010). Penelitian yang merupakan studi kasus PNPM P2KP di Desa Batu Kuning dan Desa Tebat Kubu Kabupaten Bengkulu Selatan menghasilkan informasi partisipasi masyarakat Desa Batu Kuning pada pra pelaksanaan PNPM P2KP berbentuk partisipasi paksaan, dengan inisiatif dari

atas. Artinya masyarakat Desa Batu Kuning ingin berpartisipasi lebih karena paksaan yang berasal dari atas (Birokrasi daerah ataupun dari pusat). Sedangkan bentuk partisipasi masyarakat Desa Tebat Kubu adalah partisipasi sukarela, dengan inisiatif dari atas atau bersama. Artinya, partisipasi masyarakat muncul secara sendiri, tanpa ada desakan atau paksaan dari pihak manapun. Pada pelaksanaan program PNPM partisipasi sudah ada, tapi masih belum aktif dan dinamis sama sekali. Partisipasi dalam pelaksanaan ini berbentuk paksaan dengan inisiatif dari atas. Sedangkan di Desa Tebat Kubu, partisipasi masyarakat sangat aktif untuk menyelesaikan proyek PNPM P2KP. Bentuk partisipasi masyarakat Desa Tebat Kubu adalah partisipasi sukarela dengan inisiatif dari atas atau bersama (baik itu dari pemerintah ataupun masyarakat).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengambil sisi pengeluaran (belanja) APBD untuk pelayanan dasar serta APBN melalui PNPM yang kemudian diperbandingkan dengan kemiskinan. Penelitian ini ingin menyelidiki apakah benar APBD dan APBN memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Merumuskan spesifikasi model

Langkah ini meliputi:

- a. Penentuan variabel, baik variabel dependen maupun variabel independen yang akan dimasukkan dalam model;
- b. Perumusan persamaan yang membentuk model;
- c. Pengumpulan data yang sesuai; dan
- d. Verifikasi konsistensi data;

2. Estimasi model

Langkah ini meliputi:

- a. Menentukan metode estimasi model yang tepat;
- b. Penyelidikan dan penanganan adanya masalah asumsi dasar ekonometrika yaitu: otokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinieritas dalam persamaan, sehingga diperoleh persamaan yang terbaik berdasarkan kriteria ekonometrika.

3. Mengevaluasi model

Langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah parameter-parameter dalam model yang telah dihasilkan sudah “bermakna secara teoritis” (*theoretically meaningful*) dan ‘nyata secara statistik’ (*statistically significant*). Kriteria bermakna secara teoritis ditentukan dengan melihat nilai maupun tanda taksiran parameter. Sedangkan kriteria nyata secara statistik ditentukan oleh tiga faktor, yaitu:

- a. Adjusted R Square (*goodness of fit*), untuk melihat kemampuan model dalam menjelaskan perilaku variabel dependent;
- b. F-stat, untuk melihat apakah variabel independent secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel dependent;
- c. T-stat, untuk menguji apakah masing-masing variabel independent berpengaruh nyata terhadap variabel dependent.

3.2 Spesifikasi Model

Analisis pada penelitian ini menggunakan model ekonometrika untuk menguji keterkaitan antara PNPM dan belanja daerah untuk penanggulangan kemiskinan dengan kemiskinan. Variabel-variabel yang akan digunakan adalah:

1. **Variabel dependent Kemiskinan**, data yang digunakan yaitu:

- Variabel Indeks Kemiskinan (Po);
- Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1); dan
- Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

BPS melakukan penghitungan penduduk miskin pada tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan data Susenas Kor. Metode yang digunakan adalah berdasarkan Hukum Engel yang menyatakan semakin miskin seseorang maka akan semakin tinggi proporsi pengeluarannya untuk makanan. Langkah-langkah penghitungannya adalah sebagai berikut:

- a. Mencari garis kemiskinan (GK) provinsi dan Susenas Modul.
- b. Menghitung GK provinsi dan Susenas Kor dengan dasar perubahan IHK selama satu tahun.
- c. Menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin provinsi.
- d. Menghitung rata-rata proporsi konsumsi makanan per provinsi (PMp) untuk penduduk miskin.
- e. Menghitung interval estimasi PMp dengan tingkat keyakinan 99 persen.
- f. Dari butir e, diperoleh koefisien Engel untuk provinsi (Ep).

- g. Hitung rasio proporsi konsumsi makanan kabupaten/kota (PMk) terhadap provinsi: $RPM=PMk/PMp$.
- h. Menghitung koefisien Engel urituk kabupaten/kota sebagai batas kemiskinan, yaitu: $Ek=Ep \times RPI4$.
- i. Berdasarkan butir h, dilakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin. Catatan: pada tahap ini dilakukan penyesuaian dimana apabila proporsi makanan di atas batas Ek, namun pengeluaran per kapitanya di atas batas interval GK pada tingkat keyakinan 99%, maka dikategorikan tidak miskin.
- j. Melakukan pro-rate jumlah/persentase penduduk miskin kabupaten/kota terhadap jumlah penduduk miskin provinsi.
- k. Dari hasil butir j, maka dihitung GK kabupaten/kota dan seluruh kabupaten/kota. Penghitungan GK kabupaten/kota dilakukan sebagai dasar penghitungan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1).

Indeks Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbeck (FGT, 1984) sebagai berikut:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^{\alpha}$$

dimana: $\alpha = 0, 1, 2$

z = garis kemiskinan

y_i = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i= 1, 2, 3, \dots, q$)

q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = jumlah penduduk

Jika $\alpha = 0$, maka diperoleh *Head Count Index* (P0); Jika $\alpha = 1$, maka diperoleh *Poverty Gap Index* (P1); dan Jika $\alpha = 2$, maka diperoleh *Distributionally Sensitive Index* (P2).

Data jumlah penduduk miskin dan data jumlah penduduk penerima bantuan sosial (Raskin dan Jamkesmas) merupakan dua jenis data yang berbeda yang disediakan BPS, masing-masing adalah data makro dan mikro kemiskinan. Penjelasan terhadap kedua jenis data tersebut dapat dilihat dari: 1) Metodologi penentuan data kemiskinan, dan 2) Penggunaan data mikro untuk penerima program bantuan sosial.

Kedua data jenis tersebut diperoleh dengan menggunakan metodologi yang berbeda dengan tujuan pemanfaatan yang berbeda pula. Jumlah penduduk miskin sebesar 31,023 juta jiwa adalah Data Makro Kemiskinan yang diukur dengan menggunakan garis kemiskinan. Data ini dihasilkan dari Survey Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas). Data makro kemiskinan adalah data yang hanya menunjukkan jumlah agregat. Data ini dihasilkan dengan menggunakan nilai garis kemiskinan, dimana penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran makanan dan non makanan per kapita pada kelompok referensi yang telah ditetapkan. Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marjinal.

Komponen Garis Kemiskinan: $GK = GKM + GKNM$, dimana GKM adalah Garis Kemiskinan Makanan yaitu nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi. Sedangkan GKNM adalah Garis Kemiskinan Non Makanan, yaitu kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Berdasarkan data kemiskinan yang bersifat makro ini, angka kemiskinan pada tahun 2010 adalah sebesar 31 juta jiwa atau sekitar 13,33% penduduk nasional.

Data kemiskinan makro ini digunakan sebagai dasar untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan secara makro yang dapat digunakan antara lain untuk: 1) Mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin, *poverty gap*,

dan *severity index* (absolute); dan 2) Mengetahui ketimpangan/disparitas akses antar golongan masyarakat: urban/rural, kelompok pendapatan *Quintile* (relative).

Keunggulan data makro kemiskinan adalah dapat digunakan untuk melihat perkembangan jumlah penduduk dengan berbagai karakteristiknya dari waktu ke waktu berikutnya (*time series*). Dengan demikian, perencanaan penurunan tingkat kemiskinan dapat dikaitkan dengan perencanaan pembangunan dalam bidang lainnya seperti perencanaan tingkat pertumbuhan, investasi dan peningkatan kesempatan kerja.

Kelemahan data makro adalah tidak dapat menunjukkan identitas individu dan keberadaan/alamat mereka, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan program-program pembangunan yang bersifat langsung ditujukan kepada masyarakat miskin (*targeting*), terutama untuk program-program yang ditujukan untuk memenuhi akses terhadap pelayanan dasar (kemiskinan non pendapatan). Untuk tujuan tersebut, dan dalam rangka meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, pada tahun 2005 Pemerintah melengkapi data kemiskinan dengan data mikro kemiskinan.

Sedangkan data yang digunakan untuk pemberian bantuan sosial adalah Data Mikro Kemiskinan yang dihasilkan melalui survey Pendataan Sosial Ekonomi tahun 2005 (PSE-05) dan telah diupdate dengan Survey Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2008 (PPLS-08). Survey PSE-05 dan PPLS-08 mengidentifikasi keluarga miskin sampai pada identitas kepala rumah tangga dan alamat tempat tinggalnya.

Data mikro kemiskinan diperoleh melalui survey PSE-05 dan diperbaharui melalui PPLS-08, yang dilakukan dengan menggunakan kriteria akses terhadap kebutuhan dasar yang tercermin dalam 16 Kriteria Rumah Tangga Miskin.

Untuk mengetahui intensitas kemiskinan dari Rumah Tangga Sasaran (RTS), RTS dikelompokkan menjadi rumah tangga sangat miskin (RTSM), rumah tangga miskin (RTM) dan rumah tangga hampir miskin/*near poor* (RTHM). Dasar pengelompokkan tersebut adalah nilai Indeks skor RTS (IRM), yang dihitung dari bobot variabel dan nilai skor variabel terpilih.

2. **Variabel Independen Utama**, yaitu dikelompokkan menjadi:

- APBN (PNPM).

Alokasi ini mewakili upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pusat untuk pengentasan kemiskinan yang dikeluarkan melalui anggaran PNPM. Pemilihan PNPM diantara program pengentasan kemiskinan lainnya yang dilakukan pemerintah pusat seperti jamkesmas, raskin, keluarga harapan, dan beasiswa pendidikan karena PNPM adalah program yang sarasanya adalah kelompok masyarakat umum tidak mengkhususkan kepada penduduk miskin sehingga dapat dibandingkan dengan APBD yang sarasanya juga adalah masyarakat umum. Alokasi PNPM yang digunakan adalah PNPM yang berasal dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Urusan Bersama (DUB) sehingga mengeluarkan faktor APBD sebagai dana pendamping PNPM atau Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB).

- APBD

APBD yang dibagi atas tiga kelompok belanja, yaitu:

Pendidikan (PEND)

Alokasi ini mewakili upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan *human capital investment* melalui belanja daerah dalam urusan pendidikan;

Kesehatan (KES)

Alokasi ini mewakili upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan pelayanan kesehatan melalui belanja daerah dalam urusan kesehatan.

Pekerjaan Umum (PU)

Alokasi ini mewakili upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan infrastruktur melalui belanja daerah dalam urusan pekerjaan umum.

Guna menetralkan perbedaan jumlah penduduk antardaerah, alokasi belanja daerah di atas ditransformasikan menjadi data per kapita dengan cara membaginya dengan jumlah penduduk kabupaten/kota masing-masing.

Adapun fungsi persamaan model yang akan diregresi adalah sebagai berikut:

$$PO_{it} = f(PNPM_{it}, PEND_{it}, KES_{it}, PU_{it})$$

$$P1_{it} = f(PNPM_{it}, PEND_{it}, KES_{it}, PU_{it})$$

$$P2_{it} = f(PNPM_{it}, PEND_{it}, KES_{it}, PU_{it})$$

Sumber data yang digunakan adalah data panel kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur. Untuk data yang berasal dari APBN, APBD, dan data kemiskinan digunakan data periode 2007 sampai 2009. Selanjutnya, data-data yang telah diverifikasi dimasukkan dalam database Eviews. Pemilihan data akan didasarkan pada tingkat ruang fiskal dari APBD kabupaten/kota di Jawa Timur sehingga terdapat kesamaan kemampuan keuangan daerahnya.

3.3 Metode Estimasi

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi parameter model adalah pendekatan data panel. Dalam pendekatan ini, data disusun dalam bentuk kombinasi data *time series* dan data *cross section*. Penggunaan data panel memberikan hasil yang lebih menyeluruh dibandingkan hasil estimasi data *time series* atau *cross section*. Di samping itu, menurut Baftagi (1995), pendekatan ini memberi keuntungan antara lain:

1. untuk mengendalikan keheterogenan individu;
2. memberikan informasi yang lebih kaya, mengurangi kolinieritas di antara variabel-variabel independent, memperbesar derajat bebas (*degree of freedom*), dan lebih efisien;
3. lebih baik dalam mengidentifikasi dan mengukur efek yang tidak bisa dideteksi dalam model data *time series* atau *cross section*;
4. sangat sesuai untuk mempelajari dan menguji perilaku model yang lebih kompleks dibanding model data *time series* atau data *cross section*.

Persamaan regresi, data panel memiliki persamaan dasar sebagai berikut:

$$y_{it} = \alpha + x_{it}\beta + u_{it} \quad (3.1)$$

$$i=1, \dots, N; t=1, \dots, T$$

Dalam penelitian ini, i menunjukkan dimensi *cross section* yaitu urutan kabupaten/kota. Sedangkan t menunjukkan dimensi *time series* yaitu periode tahun.

Berbeda dengan model regresi *time series*, aplikasi data panel yang menggunakan *one-way error component* model seperti dalam penelitian mendeskripsikan *disturbance*-nya sebagai berikut:

$$u_{it} = \mu_i + v_{it} \quad (3.2)$$

Dimana μ_i merupakan *unobservable specific effect* dan v_{it} merupakan sisa *disturbance*.

Berkenaan dengan μ_i terdapat dua model panel data, yaitu *fixed effect* dan *random effect*. Spesifikasi model *fixed effect* digunakan jika *cross-sectional unit* yang digunakan dalam penelitian mencakup seluruh populasi. Sementara itu, spesifikasi *random effect* digunakan jika *cross-sectional unit* yang digunakan dalam penelitian merupakan sampel yang diambil dan populasi yang besar (Baltagi, 1995).

Dalam analisis model panel data dikenal, dua macam pendekatan yang terdiri dari pendekatan efek tetap (*fixed effect*), dan pendekatan efek acak (*random effect*). Kedua pendekatan yang dilakukan dalam analisis panel data dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendekatan efek tetap (*Fixed effect*)

Salah satu kesulitan prosedur panel data adalah bahwa asumsi intersep dan slope yang konsisten sulit terpenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut, yang dilakukan dalam panel data adalah dengan memasukkan variabel boneka (*dummy variable*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik lintas unit (*cross section*) maupun antar waktu (*time-series*).

Pendekatan dengan memasukkan variabel boneka ini dikenal dengan sebutan model efek tetap (*fixed effect*) atau *Least Square Dummy Variable* (LSDV).

2. Pendekatan efek acak (*Random effect*)

Keputusan untuk memasukkan variabel boneka dalam model efek tetap (*fixed effect*) tak dapat dipungkiri akan dapat menimbulkan konsekuensi (*trade off*). Penambahan variabel boneka ini akan dapat mengurangi banyaknya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Model panel data yang di dalamnya melibatkan korelasi antar error term karena berubahnya waktu karena berbedanya observasi dapat diatasi dengan pendekatan model komponen error (*error component model*) atau disebut juga model efek acak (*random effect*).

Menurut Judge ada empat pertimbangan pokok untuk memilih antara menggunakan pendekatan efek tetap (*fixed effect*), dan pendekatan efek acak (*random effect*) dalam data panel :

1. Apabila jumlah time-series (T) besar sedangkan jumlah *cross-section* (N) kecil, maka hasil *fixed effect* dan *random effect* tidak jauh berbeda sehingga dapat dipilih pendekatan yang lebih mudah untuk dihitung yaitu *fixed effect model* (FEM).
2. Apabila N besar dan T kecil, maka hasil estimasi kedua pendekatan akan berbeda jauh. Jadi, apabila kita meyakini bahwa unit *cross-section* yang kita pilih dalam penelitian diambil secara acak (*random*) maka *random effect* harus digunakan. Sebaliknya, apabila kita meyakini bahwa unit *cross-section* yang kita pilih dalam penelitian tidak diambil secara acak maka kita harus menggunakan *fixed effect*.
3. Apabila komponen error ϵ_i individual berkorelasi maka penaksir *random effect* akan bias dan penaksir *fixed effect* tidak bias.
4. Apabila N besar dan T kecil, dan apabila asumsi yang mendasari *random effect* dapat terpenuhi, maka *random effect* lebih efisien dibandingkan *fixed effect*.

Penelitian mengenai pengaruh variabel variabel alokasi dana PNPm, Pendidikan (PEND), Kesehatan (KES), dan Pekerjaan Umum (PU) terhadap indeks kemiskinan (P0, P1, dan P2) menggunakan data time-series selama tiga tahun yang diwakili data tahunan dari 2007 - 2009 dan data *cross-section* sebanyak 35 data mewakili kabupaten/kota di Jawa Timur yang menghasilkan 105 observasi.

Gujarati (2003) menjelaskan bahwa estimasi model regresi panel data dengan pendekatan *fixed effect* tergantung pada asumsi yang digunakan pada intersep, koefisien slope, dan error term, dimana ada beberapa kemungkinan asumsi yaitu :

- a. Asumsi bahwa intersep dan koefisien slope adalah konstan antar waktu (time) dan ruang (space) dan error term mencakup perbedaan sepanjang waktu dan individu.
- b. Koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu.
- c. Koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu dan waktu.
- d. Seluruh koefisien (intersep dan koefisien slope) bervariasi antar individu.
- e. Intersep sebagaimana koefisien slope bervariasi bervariasi antar individu dan waktu.

Dalam penelitian ini, pengaruh variabel-variabel PNPm, Pendidikan (PEND) dan kesehatan (KES) dan pekerjaan umum (PU) terhadap kemiskinan digunakan asumsi FEM dikarenakan N besar dan T kecil selain itu bahwa unit *cross-section* yang kita pilih dalam penelitian tidak diambil secara acak maka kita harus menggunakan *fixed effect*. Asumsi FEM yang digunakan dalam penelitian ini adalah asumsi FEM yang kedua, yaitu koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu.

Dalam model *fixed effect*, μ_i diasumsikari sebagai parameter tetap yang diestimasi dan sisa *disturbance* v_{it} adalah independen dan *identically distributed*. X_{it} diasumsikan independen atas v_{it} untuk sernua i dan t. Eviews menghitung *fixed effect* dan mengestimasi GIS dengan mengurangkan setiap variabel dengan rata-

ratanya sendiri. Substitusi persamaan (3.1) dan (3.2) di atas menghasilkan persamaan baru sebagai berikut:

$$y_{it} = \alpha + x_{it}\beta + u_i + v_{it} \quad (3.3)$$

Sementara, rata-rata berdasarkan waktu t adalah:

$$\bar{y}_t = \alpha + \bar{x}_t\beta + u_i + \bar{v}_t \quad (3.4)$$

Sehingga, pengurangan persamaan (3.3) dengan (3.4) menghasilkan persamaan baru:

$$y - \bar{y}_t = \alpha + \beta(x_{it} - \bar{x}_t) + u_i + (v_{it} - \bar{v}_t)$$

Adanya perbedaan dalam satuan dan besaran variabel bebas dalam persamaan menyebabkan persamaan regresi harus dibuat dengan model logaritma natural. Alasan pemilihan model logaritma natural (Imam Ghozali, 2005) adalah sebagai berikut :

- a. Menghindari adanya heteroskedastisitas
- b. Mengetahui koefisien yang menunjukkan elastisitas
- c. Mendekatkan skala data

3.4 Pengujian Asumsi Dasar OLS

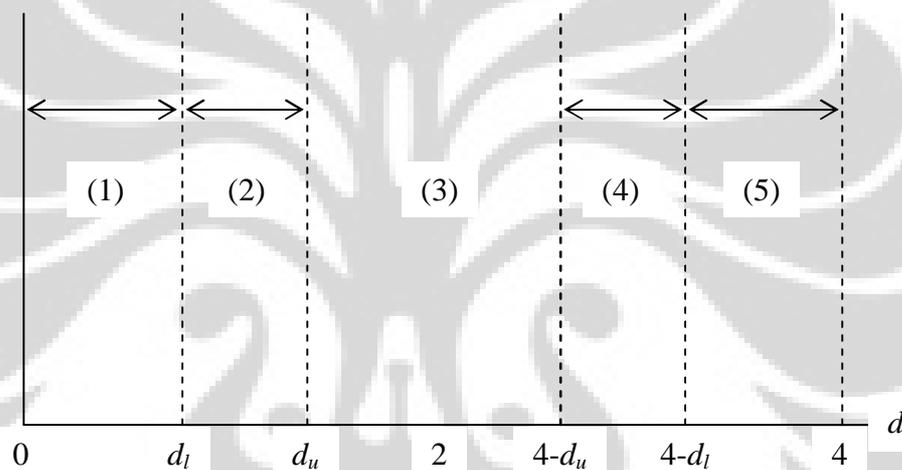
Permasalahan yang sering timbul pada penelitian terhadap data ekonomi adalah adanya pelanggaran asumsi dasar OLS, yaitu: serial korelasi, heteroskedastisitas, dan kolinieritas berganda (multikolinieritas). Pelanggaran-pelanggaran tersebut menyebabkan model yang estimasi menjadi tidak efisien.

1. Masalah Serial Korelasi

Asumsi dasar yang pertama adalah tidak adanya korelasi antar *disturbance* (serial korelasi), yaitu adanya hubungan antara data lag pada data time series itu sendiri, misalnya $u_1, u_2, u_3, \dots, u_{10}$ dengan $u_1, u_2, u_3, \dots, u_{10}$. Adanya serial korelasi akan menyebabkan koefisien estimasi konsisten dan tidak bias, tetapi variannya besar, Dengan kata lain, hasil estimasi menjadi tidak efisien. Estimasi yang tidak

efisien ini menyebabkan nilai t_{stat} cenderung kecil dan hasil pengujiannya cenderung tidak signifikan.

Cara yang digunakan untuk mendeteksi adanya serial korelasi adalah dengan Uji DW (*Durbin-Watson*). Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t_{stat} yang dihitung dengan nilai batas atas (d_u) dan nilai batas bawah (d_l) dan tabel DW, dengan memperhatikan jumlah observasi (n) dan jumlah variabel bebas ditambah satu (k). Selang kepercayaan yang didapat dan hasil pengujian mencakup lima daerah, yaitu: (1) kurang dari d_l ; (2) antara d_l dan d_u ; (3) antara d_u dan $4 - d_u$; (4) antara $4 - d_u$ dan $4 - d_l$; dan (5) lebih dan $4 - d_l$.



Grafik 3.1. Durbin-Watson d statistik

Jika d_{stat} terletak pada selang (1) atau (5) maka model menunjukkan adanya masalah serial korelasi. Sedangkan, apabila nilai d_{stat} terletak pada selang (3) maka model tidak memiliki masalah serial korelasi. Bila d_{stat} terletak pada selang (2) atau (4) maka hasil pengujian tidak dapat disimpulkan apakah ada atau tidak masalah serial korelasi.

Di samping dengan menggunakan Uji DW, adanya otokorelasi dapat pula dilihat melalui *Correlogram of Residual* yang dihasilkan dan *Residual Test*. Jika dalam *Correlogram of Residual* terdapat batang-batang yang melewati batas garis putus kiri dan kanan, maka persamaan itu sudah dapat dipastikan mengandung otokorelasi. Untuk mengatasi atau menghilangkan serial korelasi, cara yang dilakukan adalah dengan memasukkan variabel autoregresive (memasukkan *lag*).

Autokorelasi pada umumnya terjadi pada data runtut waktu (*time series*) sedangkan data *cross section* diduga jarang ditemui adanya unsur autokorelasi. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dapat digunakan Metode Durbin-Watson (DW). Sebagai aturan kasar (*rule of thumb*) dari metode ini adalah jika nilai d adalah 2 (dua), maka kita bisa mengatakan bahwa tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif.

Namun dalam penelitian ini digunakan model *fixed effect* yang tidak perlu mengasumsikan bahwa komponen gangguan tidak berkorelasi dengan variabel independen yang mungkin sulit dipenuhi atau dengan kata lain model ini tidak membutuhkan asumsi terbebasnya model dari serial korelasi, sehingga uji tentang autokorelasi dapat diabaikan. (Nachrowi, 2006)

2. Masalah Heteroskedastisitas

Asumsi dasar yang kedua yaitu varian dan setiap *disturbance* adalah konstan. Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana asumsi tersebut tidak tercapai. Dampak adanya heteroskedastisitas adalah tidak efisiennya proses estimasi, sementara hasil estimasinya sendiri tetap konsisten dan tidak bias. Adanya masalah heteroskedastisitas mengakibatkan hasil Uji t dan Uji F dapat menjadi *misleading* (Gujarati, 1995).

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas, dapat digunakan Uji *White* dan *residual plot*. Dalam Uji *White*, apabila probabilitas $Obs \cdot R\text{-squared}$ lebih besar daripada α yang ditetapkan, maka tidak ada masalah heteroskedastisitas.

3. Masalah Multikolinieritas

Asumsi dasar yang ketiga adalah tidak adanya multikolinieritas, yaitu hubungan linier yang signifikan antara beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi. Indikasi adanya multikolinieritas adalah tingginya R^2 , nilai Uji F signifikan, namun Uji t tidak signifikan. Multikolinieritas juga dapat dideteksi dengan melihat *correlation matrix*, yaitu bila dalam *correlation matrix* terdapat korelasi antar variabel independen yang tinggi (*rule of thumb*: korelasi $\geq 0,8$).

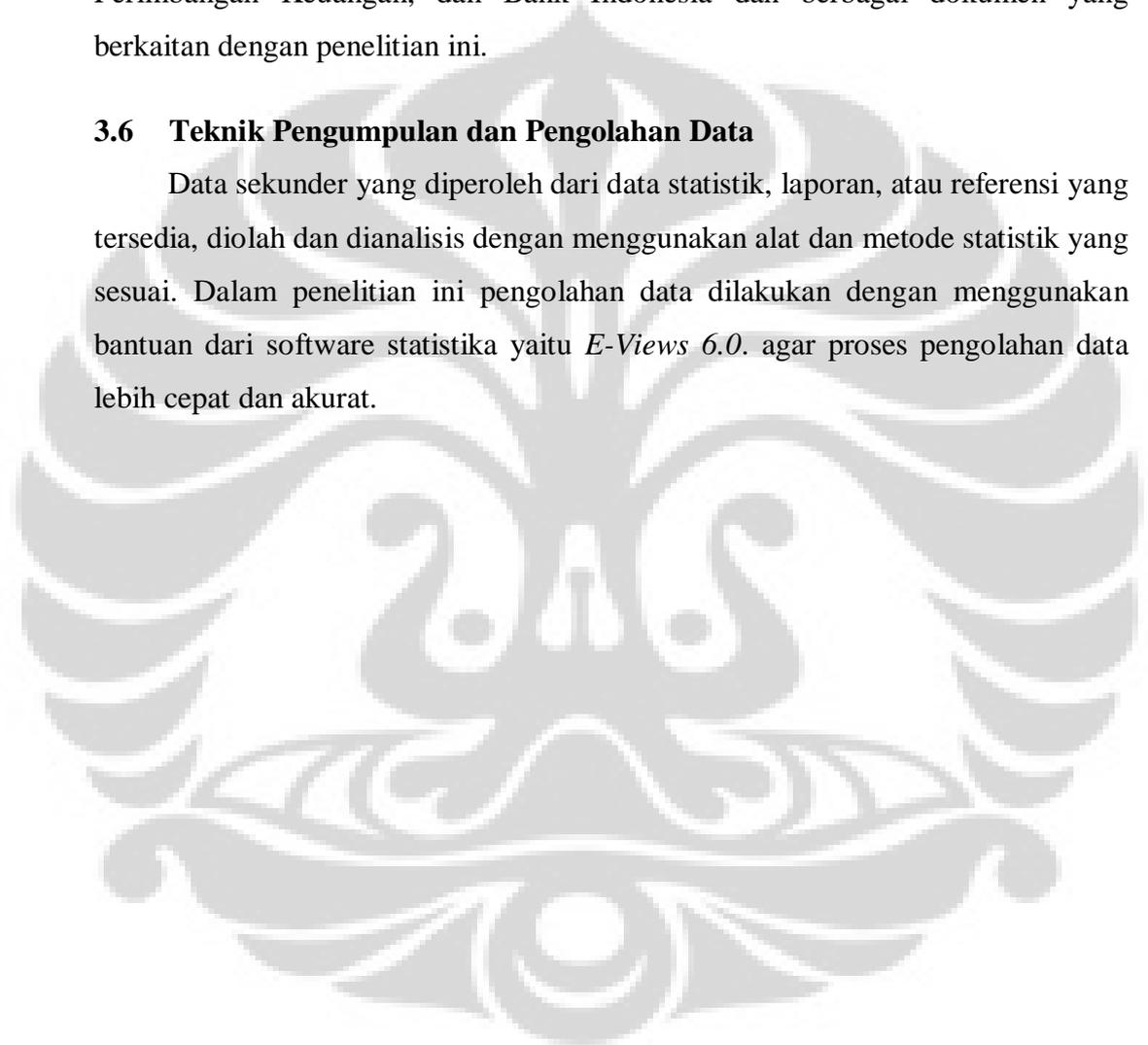
Cara untuk mengatasi atau menghilangkan multikolinieritas adalah dengan mengurangi variabel bebas atau menambah jumlah observasi.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Bank Indonesia dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.6 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data sekunder yang diperoleh dari data statistik, laporan, atau referensi yang tersedia, diolah dan dianalisis dengan menggunakan alat dan metode statistik yang sesuai. Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan dari software statistika yaitu *E-Views 6.0*. agar proses pengolahan data lebih cepat dan akurat.



BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Identifikasi Daerah

Untuk memberikan batasan terhadap kemampuan keuangan daerah di Jawa Timur, digunakan indikator ruang fiskal tahun 2009 yang menggambarkan ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah. Dengan adanya indikator ini diharapkan penelitian akan mendapatkan gambaran kabupaten/kota yang digunakan sebagai penelitian tidak terlalu jauh jarak kemampuan fiskalnya. Berdasarkan analisa ruang fiskal tahun 2009 di Jawa Timur, rata-rata ruang fiskal kabupaten/kota di Jawa Timur adalah 34,74 persen dan nilai tengahnya adalah 31,17 persen dengan nilai tertinggi adalah Kota Surabaya dengan 63,14 persen dan terendah Kabupaten Tulungagung dengan 21,33 persen.

Tabel 4.1. Daftar Ruang Fiskal Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009

No.	Daerah	Ruang Fiskal	No.	Daerah	Ruang Fiskal
1	Kota Surabaya	63,14*	20	Kab. Sampang	30,59
2	Kab. Sidoarjo	52,98	21	Kab. Situbondo	30,57
3	Kota Kediri	50,51	22	Kab. Madiun	30,29
4	Kota Mojokerto	50,17	23	Kab. Tuban	30,07
5	Kota Batu	49,13	24	Kab. Pamekasan	30,03
6	Kab. Gresik	45,08	25	Kab. Ngawi	29,05
7	Kota Blitar	44,67	26	Kab. Trenggalek	29,00
8	Kota Pasuruan	43,13	27	Kab. Sumenep	28,54
9	Kota Malang	42,86	28	Kota Madiun	28,41
10	Kab. Bojonegoro	42,72	29	Kab. Lumajang	27,52
11	Kab. Jember	40,15	30	Kab. Malang	26,61
12	Kab. Pasuruan	39,06	31	Kab. Ponorogo	26,22

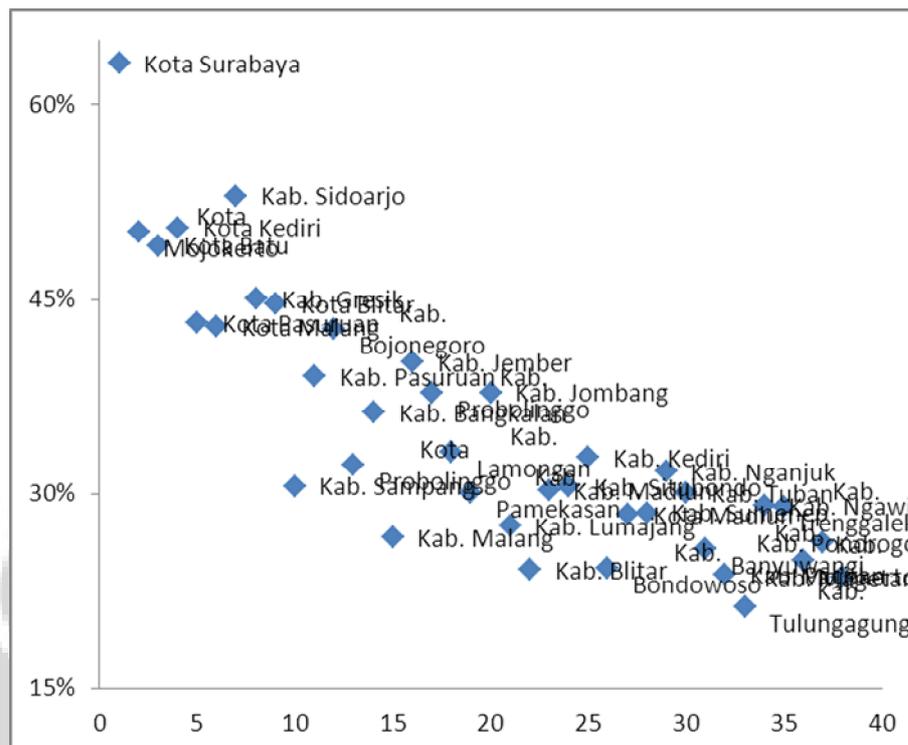
(lanjutan Tabel 4.1)

No.	Daerah	Ruang Fiskal	No.	Daerah	Ruang Fiskal
13	Kab. Jombang	37,79	32	Kab. Banyuwangi	25,77
14	Kab. Probolinggo	37,74	33	Kab. Mojokerto	24,82
15	Kab. Bangkalan	36,30	34	Kab. Bondowoso	24,28
16	Kab. Lamongan	33,25	35	Kab. Blitar	24,15
17	Kab. Kediri	32,85	36	Kab. Pacitan	23,73
18	Kota Probolinggo	32,25	37	Kab. Magetan	23,56
19	Kab. Nganjuk	31,74	38	Kab. Tulungagung	21,33

Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu

Dengan menggunakan metode grafis yaitu *scatter plot* maka kita akan mengeluarkan daerah yang jaraknya terlalu jauh (pencilan). Berdasarkan grafik 4.1 terlihat bahwa Kota Surabaya jaraknya cukup jauh dari rata-rata sebagian besar nilai ruang fiskal Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2009, maka Kota Surabaya dikeluarkan dari penelitian ini. Ruang fiskal Kota Surabaya yang sangat tinggi dapat membuat hasil penelitian menjadi bias. Dengan ruang fiskal yang tinggi maka anggaran Kota Surabaya untuk penanggulangan kemiskinan diduga lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya.

Dalam periode tahun 2007 sampai 2009 ternyata terdapat dua daerah yang tidak memperoleh dana PNPB pada tahun 2007 yaitu Kota Blitar dan Kota Madiun, sehingga kedua kota tersebut juga dikeluarkan dalam penelitian.



Grafik 4.1 *Scattered Plot* Ruang Fiskal Tahun 2009 Kabupaten/Kota di Jawa Timur

4.2 Hasil Analisis Regresi

4.2.1 Pendahuluan

Dalam pengujian model terdapat berbagai permasalahan seperti serial korelasi, heteroskedastisitas, dan kolinieritas berganda atau multikolinieritas. Dalam penelitian ini digunakan model *fixed effect* yang tidak perlu mengasumsikan bahwa komponen gangguan tidak berkorelasi dengan variabel independen yang mungkin sulit dipenuhi atau dengan kata lain model ini tidak membutuhkan asumsi terbebasnya model dari serial korelasi, sehingga uji tentang autokorelasi dapat diabaikan. (Nachrowi, 2006).

Untuk masalah heteroskedastisitas akan dilakukan sesuai pengujian model masing-masing, sedangkan pengujian multikolinieritas dilakukan bersama-sama berdasarkan model pada hipotesis yang pertama dimana didalamnya terdapat semua variabel yang digunakan dalam ketiga hipotesis yaitu, variabel dependen (P0, P1, dan P2), variabel independen (PNPM, PEND, KES, PU). Dalam regresi linier, berlaku asumsi homoskedastik dimana varians error adalah konstan.

Sementara heteroskedastik adalah keadaan dimana asumsi tersebut tidak dapat dicapai. Bila terjadi heteroskedastik pada model regresi OLS, maka estimatornya masih tetap unbiased dan konsisten meski tidak best.

Pada data *cross section*, varian error biasanya tidak konstan. Pada jenis data ini, metode OLS biasanya tidak tepat digunakan untuk melakukan estimasi. Metode estimasi yang sesuai untuk kasus ini adalah *Generalized Least Square* (GLS). Dengan menggunakan EVIEWS, metode GLS tersebut mudah kita terapkan pada model dengan memilih *option cross section weights*. Pada model persamaan logaritmik pengaruh PNPM dan anggaran daerah bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum untuk penanggulangan kemiskinan terhadap kemiskinan tidak memiliki masalah heteroskedastik sehingga tidak melanggar asumsi OLS. (Nadhif, 2006)

Dalam analisa pengaruh pendanaan selama tiga tahun, terdapat dua kemungkinan analisa dampak yang ditimbulkan, yaitu dampak pada tahun berjalan atau lag nol dan dampak pada tahun berikutnya atau lag satu. Untuk mendapatkan model terbaik dalam analisa ini akan digunakan beberapa kriteria yaitu *Akaike info criterion* (AIC), *Schwarz's information criterion* (SIC), dan *Hannan-Quinn* (HQ). Penggunaan kriteria ini dilakukan dengan memasukkan semua variabel independen dengan lag yang sama secara bersamaan pada ketiga model dan dilihat nilai kriteria terkecil dari kedua lag tersebut. Berdasarkan ketiga kriteria tersebut maka diperoleh lag terbaik untuk ketiga model yaitu indeks kemiskinan (P0), indeks kedalaman kemiskinan (P1), dan indeks keparahan kemiskinan (P2) adalah menggunakan lag nol.

Tabel 4.2. Hasil analisa menggunakan AIC, SIC, dan HQ

	P0		P1		P2	
	0	-1	0	-1	0	-1
AIC	1,3428	1,4406	1,5062	1,6466	1,6805	1,7981
SIC	1,4439	1,5691	1,6073	1,7750	1,7816	1,9266
HQ	1,3837	1,4916	1,5471	1,6976	1,7214	1,8491

AIC: Akaike info criterion; SIC: Schwarz's information criterion; HQ: Hannan-Quinn

Berikut ini adalah tiga persamaan logaritmik yang digunakan setelah menggunakan hasil analisa AIC, SIC, dan HQ dalam menentukan lag terbaik dalam masing-masing model.

$$\log(P0_{it}) = \beta_0 + \beta_1 \log(PNPM_{it}) + \beta_2 \log(PEND_{it}) + \beta_3 \log(KES_{it}) + \beta_4 \log(PU_{it})$$

$$\log(P1_{it}) = \beta_0 + \beta_1 \log(PNPM_{it}) + \beta_2 \log(PEND_{it}) + \beta_3 \log(KES_{it}) + \beta_4 \log(PU_{it})$$

$$\log(P2_{it}) = \beta_0 + \beta_1 \log(PNPM_{it}) + \beta_2 \log(PEND_{it}) + \beta_3 \log(KES_{it}) + \beta_4 \log(PU_{it})$$

4.2.2 Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel

Setelah dilakukan pemilihan model dengan lag terbaik menggunakan AIC, SIC, dan HG maka selanjutnya dilakukan *running* pada software Eviews dengan metode *common effect*, *fixed effect* dan *random effect* untuk model dengan lag nol dan satu. Selanjutnya dilakukan pengujian signifikansi untuk memilih metode mana yang lebih cocok untuk kedua model penelitian ini. Pengujian signifikansi ini dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Uji Chow

Uji Chow ini dilakukan untuk memilih model mana yang lebih baik antara model dengan asumsi bahwa slope dan intersep sama (*common effect*) dan model dengan asumsi bahwa slope sama tetapi berbeda intersep (*fixed effect*). Hipotesis nol dari uji ini adalah model *common effect* sedangkan hipotesis alternatifnya adalah model *fixed effect* atau *random effect*. Ringkasan hasil Uji Chow ini dapat dilihat pada tabel 4.3. (uji Chow secara keseluruhan dapat dilihat dalam lampiran 5).

Tabel 4.3. Hasil Uji Chow

	Indeks Kemiskinan (P0)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2)
RSS_1	21,8164	25,6890	30,5808
RSS_2	0,9814	4,2109	9,0275
F_{stat}	428,8593	103,0309	48,2276
F_{tabel}	2,3044	2,3044	2,3044
Keputusan	H_0 ditolak	H_0 ditolak	H_0 ditolak
Metode Dipilih	<i>Fixed/Random</i>	<i>Fixed/Random</i>	<i>Fixed/Random</i>

Keterangan: RSS_1 = residual sum of squares model common effect

RSS_2 = residual sum of squares model fixed effect

Sumber : data diolah

Dari hasil uji Chow diperoleh kesimpulan bahwa model *fixed effect/random effect* lebih baik dibandingkan model *common effect* sehingga asumsi bahwa koefisien intersep dan slope adalah sama tidak berlaku atau dengan kata lain model panel data yang tepat untuk menganalisis perilaku ketigapuluh lima kabupaten/kota dalam penelitian ini adalah model *fixed effect* dengan teknik *least square dummy variable* (LSDV) daripada model *common effect*.

2. Uji Hausman

Langkah selanjutnya adalah melakukan Uji Hausman untuk memilih apakah model *fixed effect* atau model *random effect* yang cocok untuk mengestimasi model kemiskinan. Hipotesis nol dari uji ini adalah model *random effect* sedangkan hipotesis alternatifnya adalah model *fixed effect*. Ringkasan hasil Uji Hausman ini dapat dilihat pada tabel 4.4. (uji Hausman secara keseluruhan dapat dilihat dalam lampiran 6)

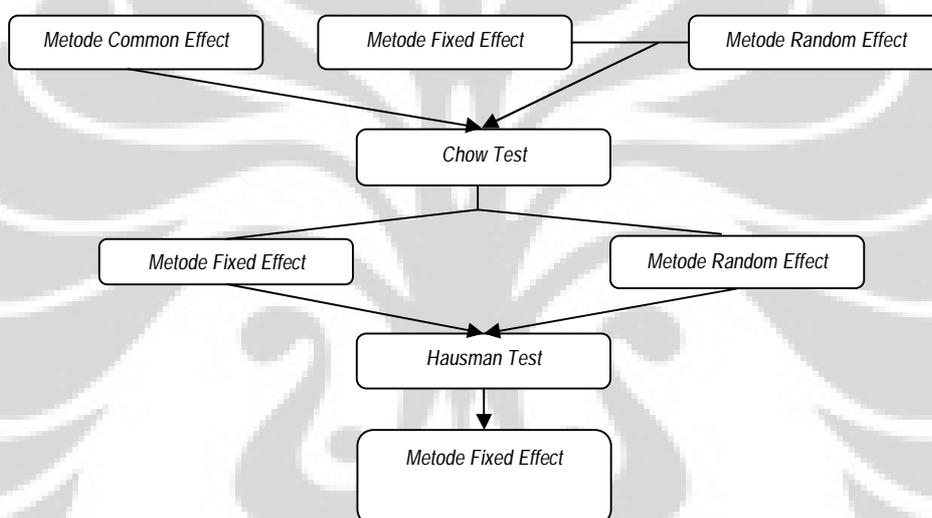
Tabel 4.4. Hasil Uji Hausman

Model	X_{2stat}	X_{2tabel}	Keputusan	Model dipilih
Indeks Kemiskinan (P0)	6,731	9,487	H_0 diterima	Random Effect
Indeks Kedalaman (P1)	2,275	9,487	H_0 diterima	Random Effect
Indeks Keparahan (P2)	1,281	9,487	H_0 diterima	Random Effect

Sumber : data diolah

Dari hasil pengujian signifikansi model yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh hasil yaitu metode *random effect*, namun penelitian ini cenderung tetap menggunakan metode *fixed effect* dengan beberapa pertimbangan. Mengingat penelitian ini akan meneliti data seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur (populasi) termasuk juga karakteristik bawaan dari indikator-indikator kemiskinan yang tercermin dari variasi intersep modelnya, maka metode *fixed effect* yang dipilih.

Diagram alur pengujian signifikansi model diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



Grafik 4.2 Diagram Alur Pengujian Signifikansi Model

Setelah melewati 2 (dua) tahap pengujian signifikansi model maka dilakukan uji hipotesa dan signifikansi untuk model yang terpilih. Dalam penelitian ini dipilih model *fixed effect* dan persamaan model yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$\log(P0_{it}) = 4,7851 - 0,1046\log(PNPM_{it}) + 0,0220\log(PEND_{it}) - 0,1342\log(KES_{it}) + 0,0291\log(PU_{it})$$

$$\log(P1_{it}) = 2,799 - 0,136\log(PNPM_{it}) + 0,072\log(PEND_{it}) - 0,043\log(KES_{it}) + 0,084\log(PU_{it})$$

$$\log(P2_{it}) = 0,978 - 0,193\log(PNPM_{it}) - 0,169\log(PEND_{it}) + 0,134\log(KES_{it}) + 0,104\log(PU_{it})$$

Tabel 4.5. Hasil Pendugaan Model Persamaan dengan Indikator Kemiskinan

Dependent Variable	Independent Variable	Coef.	Std. Error	t-Stat	Prob.	Adj. R ²
LOG(P0)	C	4,7716	0,7448	6,4066	0,0000	0,9178
	LOG(PNPM)	-0,0950	0,0242	-3,9231	0,0002	
	LOG(PEND)	0,0296	0,0269	1,1012	0,2748	
	LOG(KES)	-0,1679	0,0523	-3,2131	0,0020	
	LOG(PU)	0,0438	0,0494	0,8852	0,3793	
LOG(P1)	C	2,7992	1,3281	2,1076	0,0389	0,8600
	LOG(PNPM)	-0,1362	0,0766	-1,7778	0,0800	
	LOG(PEND)	-0,0719	0,0082	-8,7902	0,0000	
	LOG(KES)	-0,0428	0,0558	-0,7664	0,4462	
	LOG(PU)	0,0842	0,0457	1,8418	0,0700	
LOG(P2)	C	0,9780	1,2878	0,7594	0,4503	0,7981
	LOG(PNPM)	-0,1930	0,0423	-4,5620	0,0000	
	LOG(PEND)	-0,1685	0,0677	-2,4882	0,0154	
	LOG(KES)	0,1335	0,0969	1,3778	0,1729	
	LOG(PU)	0,1040	0,0791	1,3134	0,1936	

Keterangan:

- Olah data dengan program Eviews 6.0
- Estimasi menggunakan metode GLS dengan data panel

4.2.3 Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji Hipotesis :

- H_0 : $\beta_n = 0$; $n=1,2,3,4$ (tidak ada hubungan linier)
- H_1 : Lainnya (ada hubungan linier)
- $\alpha = 0,05$
- Signifikan uji

Hasil signifikan uji koefisien regresi secara parsial dirangkum dalam tabel 4.6.

Dalam persamaan model indeks kemiskinan (P0) nilai signifikan uji (β_1, β_3) $< \alpha = 10\%$, maka H_0 ditolak sehingga PNPM per kapita dan belanja kesehatan per kapita dalam APBD signifikan masuk ke dalam persamaan regresi sedangkan β_2 , dan $\beta_4 > \alpha = 10\%$ maka belanja pendidikan per kapita dan belanja pekerjaan

umum per kapita tidak signifikan masuk dalam persamaan regresi. Atau dengan kata lain hanya dua variabel tersebut secara individu berpengaruh terhadap variabel Indeks Kemiskinan.

Sementara dalam model indeks kedalaman kemiskinan (P1) nilai signifikan uji $(\beta_1, \beta_2, \beta_4) < \alpha = 10\%$, maka H_0 ditolak sehingga PNPM per kapita, belanja pendidikan per kapita, dan belanja pekerjaan umum per kapita dalam APBD signifikan masuk ke dalam persamaan regresi sedangkan $\beta_3 > \alpha = 10\%$ maka belanja kesehatan per kapita tidak signifikan masuk dalam persamaan regresi. Atau dengan kata lain ketiga variabel tersebut secara individu berpengaruh terhadap variabel Indeks Kedalaman Kemiskinan.

Sedangkan dalam model indeks keparahan kemiskinan (P2) nilai signifikan uji $(\beta_1 \text{ dan } \beta_2) < \alpha = 10\%$, maka H_0 ditolak sehingga PNPM per kapita dan belanja pendidikan per kapita dalam APBD signifikan masuk ke dalam persamaan regresi sedangkan $\beta_3 \text{ dan } \beta_4 > \alpha = 10\%$, maka belanja kesehatan per kapita dan belanja pekerjaan umum per kapita tidak signifikan masuk dalam persamaan regresi. Atau dengan kata lain hanya dua variabel secara individu berpengaruh terhadap variabel Indeks Keparahannya Kemiskinan.

4.2.4 Pengujian Model Secara Keseluruhan (uji F)

➤ Untuk Model Indeks Kemiskinan (P0)

Uji Hipotesis :

- $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4$ (model tidak signifikan menjelaskan variabel dependen)

$H_1 : \text{minimal ada satu } \beta_1 \neq 0$ (model signifikan menjelaskan variabel dependen)

- $\alpha = 0,05$
- Signifikan uji = 0,0000 atau $F_{hitung} = 31,5691$
- Daerah kritis : H_0 ditolak jika signifikan uji $< \alpha$
- Kesimpulan:

Karena signifikan uji $(0,0000) < \alpha$ atau $F_{hitung} = 31,5691 > F_{tabel} = F_{(0,05;2;105)} = 3,082852$ maka H_0 ditolak sehingga minimal ada satu $\beta_1 \neq 0$

atau dengan kata lain secara bersama-sama PNPM perkapita dan belanja per kapita untuk pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum dalam APBD berpengaruh terhadap indeks kemiskinan (P0).

➤ **Untuk Model Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)**

Uji Hipotesis :

- $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4$ (model tidak signifikan menjelaskan variabel dependen)
- $H_1 : \text{minimal ada satu } \beta_1 \neq 0$ (model signifikan menjelaskan variabel dependen)
- $\alpha = 0,05$
- Signifikan uji = 0,0000 atau $F_{hitung} = 17,8083$
- Daerah kritis : H_0 ditolak jika signifikan uji $< \alpha$
- Kesimpulan:

Karena signifikan uji (0,0000) $< \alpha$ atau $F_{hitung} = 17,8083 > F_{tabel} = F_{(0,05;2;70)} = 3.128$ maka H_0 ditolak sehingga minimal ada satu $\beta_1 \neq 0$ atau dengan kata lain secara bersama-sama PNPM perkapita dan belanja per kapita untuk pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum dalam APBD berpengaruh terhadap indeks kedalaman kemiskinan (P1).

➤ **Untuk Model Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**

Uji Hipotesis :

- $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4$ (model tidak signifikan menjelaskan variabel dependen)
- $H_1 : \text{minimal ada satu } \beta_1 \neq 0$ (model signifikan menjelaskan variabel dependen)
- $\alpha = 0,05$
- Signifikan uji = 0,0000 atau $F_{hitung} = 11,8167$
- Daerah kritis : H_0 ditolak jika signifikan uji $< \alpha$
- Kesimpulan:

Karena signifikan uji $(0,0000) < \alpha$ atau $F_{hitung} = 11,8167 > F_{tabel} = F_{(0,05;2;105)} = 3,082852$ maka H_0 ditolak sehingga minimal ada satu $\beta_1 \neq 0$ atau dengan kata lain secara bersama-sama PNPM perkapita dan belanja per kapita untuk pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum dalam APBD berpengaruh terhadap indeks keparahan kemiskinan (P2).

4.2.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Karena adanya kelemahan bahwa nilai R^2 tidak pernah menurun dengan terus bertambahnya variabel bebas, maka para ahli ekonometrika telah mengembangkan alternatif lain agar R^2 tidak merupakan fungsi dari variabel bebas, yakni adjusted- R^2 . Untuk model Indeks Kemiskinan (P0), dari hasil estimasi model *fixed effect* diperoleh nilai adjusted- R^2 sebesar 0.9178. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variasi variabel-variabel bebas PNPM per kapita, belanja pendidikan per kapita, belanja kesehatan per kapita, dan belanja pekerjaan umum per kapita yang ada dalam model tersebut dapat menjelaskan sebanyak 91,78 persen terhadap variasi variabel Indeks Kemiskinan (P0). Sementara 8,22 persen variasi dalam variabel dependen dijelaskan oleh variasi variabel lainnya yang tidak dijelaskan di dalam model.

Untuk model Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dari hasil estimasi model *fixed effect* diperoleh nilai adjusted- R^2 sebesar 0,8600. Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel-variabel bebas PNPM per kapita belanja pendidikan per kapita, belanja kesehatan per kapita, dan belanja pekerjaan umum per kapita yang ada dalam model tersebut dapat menjelaskan sebanyak 86,00 persen terhadap variasi variabel Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1). Sementara 14,00 persen variasi dalam variabel dependen dijelaskan oleh variasi variabel lainnya yang tidak diuji oleh model.

Sementara untuk model Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2), dari hasil estimasi model *fixed effect* diperoleh nilai adjusted R^2 sebesar 0,7981. Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel-variabel bebas PNPM per kapita belanja pendidikan per kapita, belanja kesehatan per kapita, dan belanja pekerjaan umum per kapita yang ada dalam model tersebut dapat menjelaskan sebanyak 79,81 persen terhadap variasi variabel Indeks Keparahhan Kemiskinan (P0). Sementara

20,19 persen variasi dalam variabel dependen dijelaskan oleh variasi variabel lainnya yang tidak dijelaskan di dalam model.

4.2.6 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah adanya hubungan antara variabel bebas dalam satu regresi. Apabila terdapat masalah tersebut maka akan melanggar salah satu asumsi dalam metode OLS yaitu tidak ada hubungan linier antara variabel independen. Salah satu *rule of thumb* tentang gejala multikolinearitas adalah model mempunyai koefisien determinasi yang tinggi (R^2) katakanlah diatas 0,8 tetapi hanya sedikit variabel bebas yang signifikan mempengaruhi variabel dependen melalui uji t. Namun berdasarkan uji F secara statistik signifikan yang berarti semua variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Dalam hal ini terjadi suatu kontradiktif dimana berdasarkan uji t secara individual variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, namun secara bersama-sama variabel bebas mempengaruhi variabel dependen.

Pada model Indeks Kemiskinan, keempat variabel bebas signifikan dan nilai koefisien determinasi adjusted- R^2 sebesar 0,9178. Untuk model Indeks Kedalaman Kemiskinan, keempat variabel bebas signifikan dan nilai koefisien determinasi adjusted- R^2 sebesar 0,8600. Demikian juga dengan model Indeks Keparahan Kemiskinan, keempat variabel bebas signifikan dan nilai koefisien determinasi adjusted- R^2 sebesar 0,7981. Maka sesuai dengan *rule of thumb* dapat disimpulkan ketiga model regresi tidak mempunyai masalah multikolinearitas.

Namun untuk membuktikan secara statistik maka digunakan matriks korelasi antar variabel bebas untuk melihat apakah ada hubungan linier antara variabel bebas atau gejala multikolinearitas. Dari hasil matriks korelasi antar variabel dalam tabel 4.6. tidak terdapat nilai korelasi yang lebih dari 0,8. Sehingga disimpulkan ketiga model regresi tidak mempunyai masalah multikolinearitas.

Tabel 4.6. Korelasi Matrik Semua Variabel dalam model

	Variabel Dependen			Variabel Independen			
	P0	P1	P2	PNPM	PEND	KES	PU
P0	1,0000	0,8599	0,7041	-0,0648	-0,2245	-0,3105	-0,3151
P1	0,8599	1,0000	0,9626	-0,1624	-0,2454	-0,2811	-0,2164
P2	0,7041	0,9626	1,0000	-0,1919	-0,2183	-0,2296	-0,1215
PNPM	-0,0648	-0,1624	-0,1919	1,0000	0,2214	0,0506	-0,0860
PEND	-0,2245	-0,2454	-0,2183	0,2214	1,0000	0,5783	0,2733
KES	-0,3105	-0,2811	-0,2296	0,0506	0,5783	1,0000	0,3968
PU	-0,3151	-0,2164	-0,1215	-0,0860	0,2733	0,3968	1,0000

Berdasarkan tabel di atas yang berisi mengenai matriks korelasi semua variabel tersebut terlihat bahwa hubungan korelasi antara variabel dependen, independen, dan variabel kontrol tidak ada yang lebih besar dari 0,8. Sehingga salah satu syarat terjadi multikolinieritas pada model yaitu adanya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel dalam model tidak dipenuhi.

4.2.7 Uji Autokorelasi

Secara harfiah, autokorelasi adalah adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi metode OLS, autokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lain. Sedangkan salah satu asumsi penting metode OLS berkaitan dengan variabel gangguan adalah tidak adanya hubungan antara variabel gangguan yang satu dengan variabel gangguan yang lain.

Autokorelasi pada umumnya terjadi pada data runtut waktu (*time series*) sedangkan data *cross section* diduga jarang ditemui adanya unsur autokorelasi. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dapat digunakan Metode Durbin-Watson (DW). Sebagai aturan kasar (*rule of thumb*) dari metode ini adalah jika nilai d adalah 2 (dua), maka kita bisa mengatakan bahwa tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif.

Namun dalam penelitian ini digunakan model *fixed effect* yang tidak perlu mengasumsikan bahwa komponen gangguan tidak berkorelasi dengan variabel

bebas yang mungkin sulit dipenuhi atau dengan kata lain model ini tidak membutuhkan asumsi terbebasnya model dari serial korelasi, sehingga uji tentang autokorelasi dapat diabaikan. (Nachrowi, 2006)

4.2.8 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas muncul jika variabel gangguan mempunyai varian yang tidak konstan. Heteroskedastisitas akan sering ditemui dalam data *cross section*, sementara data *time series* jarang mengandung unsur heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ini masih menghasilkan estimator yang linier dan tidak bias namun tidak lagi efisien karena tidak mempunyai varian yang minimum.

Dalam penelitian ini model *fixed effect* digunakan untuk mengestimasi parameter regresi. Dari model *fixed effect* awal kemudian diuji dengan *White Heteroscedasticity Consistence Variance* pada Eviews 6.0 dan didapatkan output seperti pada lampiran 7. Dari output tersebut terlihat adanya perubahan di mana beberapa variabel bebas sekarang telah signifikan secara statistik. Perubahan yang terjadi akibat dikonsistenskannya *variance error* menunjukkan bahwa pada model awal memang terdapat heteroskedastisitas.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Interpretasi Model

Untuk interpretasi model yang didapat maka model pertama setelah menghilangkan variabel yang tidak signifikan adalah sebagai berikut:

$$\log(P0_{it}) = 5,3146 - 0,0965 \log(PNPM_{it}) - 0,1376 \log(KES_{it})$$

Pada model pertama yang menggambarkan pengaruh variabel PNPM dan KES terhadap indeks kemiskinan pada tahun berjalan dihasilkan bahwa variabel PNPM berpengaruh negatif terhadap persentase penduduk miskin. Hal ini menunjukkan kenaikan PNPM perkapita akan berdampak pada menurunnya persentase penduduk miskin pada tahun berjalan. Dari model dihasilkan koefisien variabel PNPM adalah -0,0965 yang berarti setiap kenaikan satu persen alokasi PNPM per kapita akan menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 0,0965 persen pada tahun berjalan.

Sementara variabel kesehatan menunjukkan pengaruh negatif terhadap persentase penduduk miskin pada tahun berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan belanja kesehatan per kapita akan menurunkan persentase penduduk miskin pada tahun berjalan. Nilai koefisien dari variabel KES adalah -0,1376 yang berarti setiap kenaikan satu persen belanja pendidikan per kapita akan menurunkan persentase penduduk miskin pada tahun berjalan sebesar 0,1376 persen.

Untuk interpretasi model yang didapat maka model kedua setelah menghilangkan variabel yang tidak signifikan adalah sebagai berikut:

$$\log(P1_{it}) = 2,5227 - 0,1433\log(PNPM_{it}) - 0,0912\log(PEND_{it}) + 0,0933\log(PU_{it})$$

Sementara model kedua menjelaskan pengaruh variabel PNPM, pendidikan, dan pekerjaan umum terhadap indeks kedalaman kemiskinan pada tahun berjalan. Model ini menghasilkan pengaruh negatif PNPM terhadap indeks kedalaman kemiskinan pada tahun berjalan. Artinya kenaikan dana PNPM akan menurunkan indeks kedalaman kemiskinan pada tahun berjalan. Besarnya koefisien variabel PNPM pada model ini adalah -0,1433 yang berarti setiap kenaikan satu persen dana PNPM per kapita akan menurunkan indeks kedalaman kemiskinan tahun berikutnya sebesar 0,1433 persen. Sementara variabel pendidikan menunjukkan pengaruh negatif terhadap indeks kedalaman kemiskinan pada tahun berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan belanja pendidikan akan menurunkan indeks kedalaman kemiskinan pada tahun berjalan. Nilai koefisien dari variabel PEND adalah 0,0912 yang berarti setiap kenaikan satu persen belanja pendidikan per kapita akan menurunkan indeks kedalaman kemiskinan pada tahun berjalan sebesar 0,0912 persen.

Sementara variabel pekerjaan umum berpengaruh positif terhadap indeks kedalaman kemiskinan pada tahun berjalan. Artinya. Setiap kenaikan belanja pekerjaan umum per kapita menaikkan indeks kedalaman kemiskinan pada tahun berjalan. Besarnya koefisien variabel PU adalah 0,0933 yang berarti setiap kenaikan satu persen belanja pekerjaan umum per kapita akan menaikkan indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,0933 persen.

Belanja daerah di bidang pekerjaan umum berpengaruh positif terhadap gap antara garis kemiskinan dengan pengeluaran penduduk miskin di Jawa Timur. Hal ini diduga disebabkan oleh besarnya kenaikan garis kemiskinan lebih besar dari pada kenaikan pengeluaran penduduk miskin dengan asumsi bahwa kenaikan belanja pekerjaan umum yang program dan kegiatannya dilaksanakan dengan melibatkan penduduk miskin dan tidak miskin sehingga dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan tidak miskin. Kenaikkan pendapatan penduduk miskin dan tidak miskin ini akan meningkatkan pengeluaran mereka dan membuat garis kemiskinan regional Jawa Timur juga naik sesuai dengan grafik 2.1 mengenai perkembangan garis kemiskinan tahun 2007 sampai dengan 2009. Kenaikkan rata-rata garis kemiskinan di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur mencapai 10,64 persen pada tahun 2008 dan 13,31 persen pada tahun 2009. Dampak dari naiknya garis kemiskinan ini lebih besar dari pada naiknya pendapatan penduduk miskin sehingga dalam hasil regresi terlihat kenaikan belanja pekerjaan umum membuat naiknya gap antara garis kemiskinan dan pengeluaran penduduk miskin.

Untuk interpretasi model yang didapat maka model ketiga setelah menghilangkan variabel yang tidak signifikan adalah sebagai berikut:

$$\log(P2_{it}) = 2,8029 - 0,1704 \log(PNPM_{it}) - 0,1165 \log(PEND_{it})$$

Sementara model ketiga menjelaskan pengaruh variabel PNPM dan pendidikan terhadap indeks keparahan kemiskinan pada tahun berjalan. Model ini menghasilkan pengaruh negatif PNPM terhadap indeks keparahan kemiskinan pada tahun berjalan. Artinya kenaikan dana PNPM tahun ini akan menurunkan indeks kedalaman kemiskinan pada tahun berikutnya. Besarnya koefisien variabel PNPM pada model ini adalah -0,1704 yang berarti setiap kenaikan satu persen dana PNPM perkapita akan menurunkan indeks keparahan kemiskinan tahun berikutnya sebesar 0,1704 persen.

Sementara variabel pendidikan menunjukkan pengaruh negatif terhadap indeks keparahan kemiskinan pada tahun berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan belanja pendidikan akan menurunkan indeks keparahan kemiskinan pada tahun berjalan. Nilai koefisien dari variabel PEND adalah -

0,1165 yang berarti setiap kenaikan satu persen belanja pendidikan per kapita akan menurunkan indeks keparahan kemiskinan pada tahun berikutnya sebesar 0,1165 persen.

4.3.2 Evaluasi kebijakan

P0, P1, dan P2 adalah hal yang sangat penting sebagai indikator yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penanggulangan kemiskinan. P0 adalah Indeks Kemiskinan yang menunjukkan berapa persen penduduk yang miskin berdasarkan garis kemiskinan di suatu daerah. P1 adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan yang menunjukkan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan atau menunjukkan perbedaan atau gap antara penduduk miskin dengan yang tidak miskin. Sedangkan P2 adalah Indeks Keparahannya Kemiskinan yang menunjukkan kesenjangan distribusi di antara penduduk miskin.

Dari hasil penelitian ini, terlihat bahwa pada model dimana PNPM dijalankan bersama dengan anggaran daerah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum untuk mempengaruhi indikator-indikator kemiskinan menghasilkan kombinasi kebijakan yang dapat diambil. Dimana dari model tersebut kita dapat melihat untuk mempengaruhi indeks kemiskinan kebijakan yang diambil adalah dengan lebih meningkatkan dana PNPM dan belanja kesehatan daripada belanja pendidikan dan pekerjaan umum karena dalam model indeks kemiskinan, kedua variabel PNPM dan belanja kesehatan berpengaruh negatif terhadap indeks kemiskinan sedangkan belanja pendidikan dan pekerjaan umum tidak berpengaruh. Sehingga jika dana PNPM dan belanja kesehatan dinaikkan akan dapat menurunkan indeks kemiskinan.

Sedangkan untuk mempengaruhi indeks kedalaman kemiskinan kebijakan yang diambil adalah lebih meningkatkan dana PNPM dan belanja pendidikan daripada belanja pekerjaan umum. Hal ini dilakukan karena berdasarkan model indeks kedalaman kemiskinan, variabel PNPM dan belanja pendidikan berpengaruh negatif terhadap indeks kedalaman kemiskinan sedangkan belanja pekerjaan umum berpengaruh positif. Belanja daerah untuk pekerjaan umum berpengaruh positif diduga karena program belanja untuk pekerjaan umum di

Jawa Timur tidak *pro poor budget*. Sehingga peningkatan belanja untuk pekerjaan umum tidak berdampak mengurangi indeks kedalaman kemiskinan melainkan memperbesar indeks kedalaman kemiskinan di Jawa Timur.

Sementara untuk mempengaruhi indeks keparahan kemiskinan kebijakan yang diambil adalah lebih meningkatkan PNPM dan belanja pendidikan. Hal ini dilakukan karena berdasarkan model indeks keparahan kemiskinan variabel PNPM dan belanja pendidikan berpengaruh negatif terhadap indeks keparahan kemiskinan. Sehingga untuk menurunkan indeks keparahan kemiskinan dilakukan adalah menaikkan PNPM dan belanja daerah untuk pendidikan.

Dari hasil regresi diperoleh pula karakteristik kemiskinan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang tercermin dari masing-masing nilai intersepnya. Mengingat persamaan model berbentuk logaritma (log) maka guna memudahkan interpretasi nilai intersep dari masing-masing model diekspansi (di-antilog-kan). Pada model Indeks Kemiskinan yaitu persentase penduduk miskin, diperoleh nilai intersep sebagai berikut:

Tabel 4.7. Nilai Intercept Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur berdasarkan model Indeks Kemiskinan (P0)

No	Kabupaten/Kota	P0	No	Kabupaten/Kota	P0
1	Kota Malang	0,0659	19	Kab. Lumajang	1,1760
2	Kota Batu	0,0923	20	Kab. Madiun	1,2722
3	Kab. Sidoarjo	0,2483	21	Kab. Ngawi	1,4926
4	Kota Blitar	0,3855	22	Kab. Nganjuk	1,5926
5	Kota Mojokerto	0,4272	23	Kab. Trenggalek	1,6048
6	Kab. Malang	0,4903	24	Kab. Gresik	1,6612
7	Kota Pasuruan	0,5107	25	Kab. Pacitan	1,7228
8	Kab. Banyuwangi	0,5398	26	Kab. Lamongan	1,8108
9	Kab. Mojokerto	0,5526	27	Kab. Bojonegoro	1,8599
10	Kab. Tulungagung	0,5820	28	Kota Probolinggo	1,8663
11	Kab. Blitar	0,7003	29	Kab. Bondowoso	1,9963
12	Kab. Jember	0,8215	30	Kab. Tuban	2,1342

(lanjutan Tabel 4.7)

No	Kabupaten/Kota	P0	No	Kabupaten/Kota	P0
13	Kab. Situbondo	0,8938	31	Kab. Pamekasan	2,2966
14	Kab. Magetan	0,9255	32	Kab. Probolinggo	2,9521
15	Kab. Kediri	0,9608	33	Kab. Bangkalan	3,5152
16	Kab. Jombang	1,0105	34	Kab. Sumenep	3,6406
17	Kab. Ponorogo	1,0361	35	Kab. Sampang	4,8816
18	Kab. Pasuruan	1,0414			

Dari tabel 4.7 begitu variasinya nilai intercept dari masing-masing kabupaten/ kota di Jawa Timur yang menunjukkan kondisi berdasarkan model indeks kemiskinan ketika semua variabel yang mempengaruhi model dikeluarkan maka nilai intercept antara 0,0659 sampai 4,8816. Nilai intercept terendah adalah Kota Malang dan nilai terendah adalah Kabupaten Sampang. Dari kedua daerah ini terlihat begitu kontras kondisi awal daerah ketika belum ada program pengentasan kemiskinan disana. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tidak ada dana PNPM dan belanja daerah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum di Kota Malang, nilai indeks kemiskinan atau persentase penduduk miskin di Kota Malang mencapai 0,0659 persen artinya 0,0659 persen indeks kemiskinan disebabkan oleh faktor lain. Sedangkan di Kabupaten Sampang mencapai 4,8816 persen artinya 4,8816 persen indeks kemiskinan di Kabupaten Sampang disebabkan oleh faktor lain.

Tabel 4.8. Nilai Intercept Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur berdasarkan model Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

No	Kabupaten/Kota	P1	No	Kabupaten/Kota	P1
1	Kota Batu	0,0933	19	Kab. Madiun	1,2167
2	Kota Malang	0,1084	20	Kota Probolinggo	1,2858
3	Kota Mojokerto	0,1301	21	Kab. Lumajang	1,4358
4	Kab. Sidoarjo	0,1884	22	Kab. Nganjuk	1,4649
5	Kota Blitar	0,2564	23	Kab. Ngawi	1,7298

(lanjutan Tabel 4.8)

No	Kabupaten/Kota	P1	No	Kabupaten/Kota	P1
6	Kota Pasuruan	0,2946	24	Kab. Bondowoso	1,9821
7	Kab. Tulungagung	0,4904	25	Kab. Lamongan	2,0173
8	Kab. Mojokerto	0,5215	26	Kab. Gresik	2,1315
9	Kab. Banyuwangi	0,5292	27	Kab. Trenggalek	2,1683
10	Kab. Jombang	0,7933	28	Kab. Bojonegoro	2,3211
11	Kab. Malang	0,8100	29	Kab. Tuban	2,3823
12	Kab. Magetan	0,8152	30	Kab. Pacitan	2,3845
13	Kab. Blitar	0,8231	31	Kab. Pamekasan	2,7990
14	Kab. Jember	0,9029	32	Kab. Probolinggo	2,9281
15	Kab. Ponorogo	0,9330	33	Kab. Sumenep	3,4183
16	Kab. Kediri	0,9863	34	Kab. Bangkalan	5,2950
17	Kab. Situbondo	0,9894	35	Kab. Sampang	5,3041
18	Kab. Pasuruan	1,0202			

Dari tabel 4.9 begitu variasinya nilai intercept dari masing-masing kabupaten/ kota di Jawa Timur yang menunjukkan kondisi berdasarkan model indeks kedalaman kemiskinan ketika semua variabel yang mempengaruhi model dikeluarkan maka nilai intercept antara 0,0933 sampai 5,3041. Nilai intercept terendah adalah Kota Batu dan nilai terendah adalah Kabupaten Sampang. Dari kedua daerah ini terlihat begitu kontras kondisi awal daerah ketika belum ada program pengentasan kemiskinan disana. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tidak ada dana PNPM dan belanja daerah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum di Kota Malang, nilai indeks kedalaman kemiskinan di Kota Batu mencapai 0,0933 yang artinya 0,0933 indeks kedalaman kemiskinan di Kota Batu disebabkan oleh faktor lain. Sedangkan di Kabupaten Sampang mencapai 5,3041 yang artinya 5,3041 indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Sampang disebabkan oleh faktor lain.

Tabel 4.9. Nilai Intercept Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur berdasarkan model Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

No	Kabupaten/Kota	P2	No	Kabupaten/Kota	P2
1	Kota Mojokerto	0,1159	19	Kab. Kediri	1,0910
2	Kota Malang	0,1205	20	Kab. Lumajang	1,2657
3	Kota Batu	0,1328	21	Kab. Madiun	1,3163
4	Kab. Sidoarjo	0,2221	22	Kab. Nganjuk	1,5025
5	Kab. Tulungagung	0,3589	23	Kab. Lamongan	1,6817
6	Kota Blitar	0,3789	24	Kota Probolinggo	1,8818
7	Kab. Mojokerto	0,3994	25	Kab. Pamekasan	1,9798
8	Kota Pasuruan	0,4632	26	Kab. Bondowoso	2,0597
9	Kab. Banyuwangi	0,5350	27	Kab. Bojonegoro	2,2473
10	Kab. Jombang	0,6662	28	Kab. Gresik	2,3216
11	Kab. Magetan	0,6736	29	Kab. Probolinggo	2,5362
12	Kab. Ponorogo	0,7232	30	Kab. Tuban	2,6226
13	Kab. Jember	0,7315	31	Kab. Pacitan	2,9700
14	Kab. Malang	0,7858	32	Kab. Trenggalek	3,0539
15	Kab. Pasuruan	0,8262	33	Kab. Sumenep	3,5388
16	Kab. Situbondo	0,8664	34	Kab. Sampang	4,4389
17	Kab. Ngawi	0,9710	35	Kab. Bangkalan	7,5544
18	Kab. Blitar	1,0557			

Dari tabel 4.10 begitu variasinya nilai intercept dari masing-masing kabupaten/ kota di Jawa Timur yang menunjukkan kondisi berdasarkan model indeks keparahan kemiskinan ketika semua variabel yang mempengaruhi model dikeluarkan maka nilai intercept antara 0,1159 sampai 7,5544. Nilai intercept tertinggi adalah Kota Mojokerto dan nilai terendah adalah Kabupaten Bangkalan. Dari kedua daerah ini terlihat begitu kontras kondisi awal daerah ketika belum ada program pengentasan kemiskinan disana. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tidak ada dana PNPM dan belanja daerah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum di Kota Mojokerto, nilai indeks keparahan kemiskinan di

Kota Mojokerto mencapai 0.1159 yang artinya 0,1159 indeks kedalaman kemiskinan di Kota Mojokerto disebabkan oleh faktor lain. Sedangkan di Kabupaten Bangkalan mencapai 7,5544 yang artinya 7,5544 indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Bangkalan disebabkan oleh faktor lain.

Tabel 4.10. Perbandingan Karakteristik Kota Malang, Kabupaten Sampang, Kota Batu, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Bangkalan Tahun 2009

	Kab. Bangkalan	Kab. Sampang	Kota Malang	Kota Mojokerto	Kota Batu
Melek Huruf	75,71	72,24	94,80	100,00	98,59
APS	57,95	60,01	90,00	87,50	94,59
Peserta KB	59,83	55,37	69,72	69,43	66,10
Pengguna Air Bersih	64,85	58,21	59,25	42,88	76,22
Jenis Pekerjaan					
Pertanian	69,09	77,72	4,29	4,69	40,00
Non Pertanian	29,51	22,28	87,14	81,25	50,97
PDRB per kapita (juta Rp)	3,46	2,80	15,98	10,55	6,75

Faktor lain yang diduga mempengaruhi karakteristik intersept indeks kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan adalah karakteristik daerah tersebut. Berdasarkan tabel 4.10 yang menggambarkan kondisi daerah di Kota Malang, Kabupaten Sampang, Kota Batu, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa daerah yang memiliki intersept indeks kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan rendah yaitu Kota Malang, Kota Batu, dan Kota Mojokerto memiliki indikator pendidikan yaitu angka melek huruf dan angka partisipasi sekolah dan indikator kesehatan yaitu angka peserta KB yang tinggi dibandingkan daerah yang memiliki nilai rendah yaitu Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan. Daerah dengan nilai intersept indikator kemiskinan rendah memiliki angka melek huruf daerah diatas 90 persen dan angka partisipasi sekolah diatas 80 persen sedangkan daerah dengan nilai intersept indikator kemiskinan tinggi memiliki

angka melek huruf daerah sekitar 70 persen dan angka partisipasi sekolah sekitar 60 persen. sementara untuk indikator kesehatan daerah dengan intercept indikator kemiskinan rendah memiliki jumlah peserta KB di atas 65 persen sedangkan daerah dengan intercept tinggi memiliki jumlah peserta KB di bawah 60 persen. Hal ini sesuai dengan hasil model yang menunjukkan anggaran belanja untuk pendidikan dan kesehatan yang berpengaruh terhadap indikator kemiskinan di Jawa Timur.

Sedangkan berdasarkan indikator pekerjaan umum yaitu jumlah pengguna air bersih ternyata tidak dapat memperlihatkan kondisi kemiskinan daerah-daerah tersebut hal ini juga sesuai dengan hasil model yang menunjukkan bahwa anggaran belanja daerah untuk pekerjaan umum berpengaruh positif terhadap indikator kemiskinan di Jawa Timur.

Faktor lain yang diduga mempengaruhi karakteristik intercept adalah jenis pekerjaan dan jumlah PDRB per kapita. Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa daerah yang memiliki nilai intercept indikator kemiskinan rendah adalah daerah yang sebagian besar penduduknya mempunyai pekerjaan non pertanian dan jumlah PDRB per kapitanya lebih tinggi daripada daerah yang nilai interceptnya tinggi. Kota Malang, Kota Mojokerto, dan Kota Batu masing-masing mempunyai PDRB per kapita sebesar Rp.15,98 juta, Rp.10,55 juta, dan Rp.6,75 juta, sedangkan Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang memiliki PDRB per kapita lebih kecil yaitu sebesar Rp.3,46 juta dan Rp.2,80.

Selain itu hasil model indikator kemiskinan yang diperoleh juga dapat dikaitkan dengan program-program yang dilakukan dalam dinas-dinas yang berhubungan dengan belanja daerah untuk pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Berdasarkan lampiran 8 yang menampilkan program-program yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan tiga daerah yang mewakili kabupaten/kota di Jawa Timur yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Bangkalan, dan Kota Mojokerto dapat diduga bahwa untuk bidang pekerjaan umum hampir lebih dari 60 persen anggarannya adalah belanja modal. Dari angka ini seharusnya pekerjaan umum mempunyai pengaruh terhadap indikator kemiskinan di Jawa Timur namun ternyata berdasarkan model bidang

pekerjaan umum tidak berpengaruh terhadap indikator kemiskinan. Hal ini diduga terjadi karena program dinas pekerjaan umum ini tidak banyak melibatkan penduduk miskin dalam pelaksanaannya.

Sedangkan untuk bidang pendidikan, belanja pendidikan untuk Dinas Pendidikan di Kabupaten Jember dan Bangkalan mengalokasikan belanja modal lebih dari 60 persen sedangkan Kota Mojokerto kurang dari 50 persen. Dengan besarnya alokasi belanja pendidikan untuk belanja modal diduga menjadi salah satu alasan belanja pendidikan berpengaruh negatif terhadap indikator kemiskinan. Sementara untuk bidang kesehatan, realisasi belanja modal di Dinas Kesehatan di tiga daerah tersebut menunjukkan angka sekitar 50 persen hal ini yang diduga menjadi salah satu alasan belanja kesehatan berpengaruh negatif terhadap indikator kemiskinan. Belanja modal digunakan sebagai indikator belanja pro kemiskinan karena diasumsikan belanja modal akan digunakan untuk program yang menghasilkan barang fisik yang dapat dirasakan atau digunakan langsung oleh masyarakat.

Selain memperhatikan jenis program yang dilaksanakan oleh ketiga daerah tersebut berdasarkan realisasi APBD Tahun 2008, berdasarkan lampiran 9 yang menjelaskan mengenai alokasi belanja per urusan dari ketiga daerah tersebut dengan melihat jenis belanja langsung dan tidak langsung. Dari ketiga daerah tersebut terlihat bahwa persentase belanja langsung dan tidak langsung untuk masing-masing urusan sangat berbeda. Untuk bidang pendidikan hanya 27,26 persen adalah belanja langsung sedangkan belanja tidak langsungnya adalah 72,74 persen. Sedangkan bidang kesehatan sebesar 73,86 persen adalah belanja langsung sedangkan 26,14 persen adalah belanja tidak langsung. Sementara bidang pekerjaan umum sebesar 94,03 persen adalah belanja langsung sedangkan 5,97 persen adalah belanja tidak langsung. Dari data tersebut menunjukkan untuk pendidikan lebih besar alokasi untuk belanja tidak langsung yaitu gaji guru sedangkan bidang kesehatan dan pekerjaan umum lebih besar pada belanja langsung yaitu belanja program dan kegiatan.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian model yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa untuk penanggulangan kemiskinan dapat berhasil dilakukan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan daerah. Hal ini dapat dilihat dengan ketiga model yang dibahas di atas akan diperoleh suatu kebijakan terpadu mengenai penanggulangan kemiskinan. Hasil dari ketiga model tersebut adalah:

1. Indeks kemiskinan adalah indeks yang menunjukkan persentase jumlah penduduk yang miskin berdasarkan garis kemiskinan di suatu daerah. Faktor yang signifikan mempengaruhi penurunan persentase jumlah penduduk miskin adalah PNPM dan alokasi belanja daerah bidang kesehatan. Kenaikkan satu persen PNPM dapat menurunkan persentase jumlah penduduk miskin sebesar 0,0965 persen. sedangkan kenaikan satu persen alokasi belanja daerah untuk kesehatan akan menurunkan persentase jumlah penduduk miskin sebesar 13,76 persen. Belanja pendidikan dan pekerjaan umum tidak berpengaruh terhadap indeks kemiskinan diduga karena tidak berdampak langsung terhadap pendapatan penduduk miskin namun dapat membantu mempertahankan dan meningkatkan pendapatan yang diperolehnya tapi tidak terlalu besar sehingga tidak dapat membantu keluar dari garis kemiskinan.
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah indeks yang menunjukkan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan atau menunjukkan perbedaan atau gap antara penduduk miskin dengan yang tidak miskin. Faktor yang signifikan mempengaruhi kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan adalah PNPM dan belanja daerah untuk pendidikan. Setiap kenaikan satu persen dari PNPM akan mendekatkan jarak kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan 13,62 persen sedangkan kenaikan belanja pendidikan satu persen akan dapat menurunkan jarak atau kesenjangan sebesar 14,33 persen. Sementara ketika alokasi belanja

daerah bidang pekerjaan umum dinaikkan satu persen maka akan memperlebar jarak antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan sebesar 9,33 persen. Bidang pekerjaan umum berpengaruh positif terhadap indeks kedalaman kemiskinan di Jawa Timur dapat disebabkan oleh beberapa hal. Diduga program dan kegiatan yang dilaksanakan di sana melibatkan semua masyarakat yaitu penduduk miskin dan penduduk yang tidak miskin. Hal ini akan membantu meningkatkan pengeluaran mereka dan membuat garis kemiskinan regional Jawa Timur juga naik sesuai dengan grafik 2.1 mengenai perkembangan garis kemiskinan tahun 2007 sampai dengan 2009. Kenaikan rata-rata garis kemiskinan di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur mencapai 10,64 persen pada tahun 2008 dan 13,31 persen pada tahun 2009. Tentu hal ini sangat baik dengan perkembangan ekonomi di Jawa Timur namun kenaikan garis kemiskinan ini akan membuat jarak pengeluaran penduduk miskin yang kenaikannya tidak sejauh atau sebesar kenaikan garis kemiskinan menjadi semakin besar.

3. Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan kesenjangan distribusi di antara penduduk miskin. Faktor yang signifikan terhadap kesenjangan distribusi di antara penduduk miskin adalah PNPM dan belanja di bidang pendidikan. Setiap kenaikan alokasi PNPM akan dapat menurunkan kesenjangan distribusi di antara penduduk miskin sebesar 17,04 persen dan kenaikan alokasi belanja daerah bidang pendidikan akan dapat menurunkan kesenjangan distribusi di antara penduduk miskin sebesar 11,65 persen. Belanja pendidikan dan pekerjaan umum tidak berpengaruh terhadap distribusi pendapatan penduduk miskin diduga karena tidak berdampak langsung terhadap distribusi pendapatan penduduk miskin namun dapat membantu mempertahankan dan meningkatkan pendapatan yang diperolehnya tapi tidak merata sehingga tidak dapat membantu memperbaiki distribusi pendapatan penduduk miskin.

5.2 Saran dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil identifikasi pengaruh PNPM dan anggaran belanja daerah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum untuk penanggulangan

kemiskinan terhadap kemiskinan dalam penelitian ini, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menurunkan persentase jumlah penduduk miskin dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur dapat dilakukan dengan lebih meningkatkan alokasi anggaran PNPM yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat sedangkan Pemerintah Daerah dengan meningkatkan alokasi belanja kesehatan.
2. Untuk mempersempit jarak antara pendapatan penduduk miskin dengan garis kemiskinan dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur dapat dilakukan dengan lebih meningkatkan alokasi anggaran PNPM yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat sedangkan Pemerintah Daerah dengan meningkatkan alokasi belanja pendidikan dan lebih menitikberatkan program pekerjaan umum dalam program yang *pro poor*.
3. Untuk memperkecil ketimpangan distribusi pendapatan penduduk miskin dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur dapat dilakukan dengan lebih meningkatkan alokasi anggaran PNPM yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat sedangkan Pemerintah Daerah dengan meningkatkan alokasi belanja pendidikan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan penelitian yang dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan itu antara lain penelitian ini dibatasi oleh data kemiskinan yang terakhir pada tahun 2009, sehingga dengan *time series* yang lebih lama diharapkan diperoleh analisa yang lebih baik dan akurat untuk menunjang penelitian ini. Selain itu juga dapat dilakukan penambahan variabel independen yang lain yang relevan dengan penelitian ini sehingga dapat diperoleh R square yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSAKA

- Alam, Jaoharul. Disparitas Pendapatan dan Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bekasi. Universitas Indonesia. 2006
- Alawi, Nadif. Pengaruh Anggaran Belanja Pembangunan Daerah terhadap Kemiskinan Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2002-2004. Universitas Indonesia. Jakarta. 2006
- Andika, Muhammad Nova. Pengaruh Anggaran Belanja Pemerintah Daerah DKI Jakarta terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Kota. Universitas Indonesia. 2004.
- Aritenang, Adiwana F. A Study on Indonesia Regions Disparity: Post Decentralization. 2008
- Dethier, Jean-Jacques. Decentralisation And Poverty Reduction: Exploring The Linkages. 2004
- Hendra, Roy. Determinan Kemiskinan Absolut Di Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2007. Universitas Indonesia. Jakarta. 2010
- Hendraso, Tatot. Pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Regional Riau. Universitas Indonesia. 2003
- Hestiana, Agustri. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus PNPM P2KP di Desa Batu Kuning dan Desa Tebat Kubu Kabupaten Bengkulu Selatan)
- Jasmina, T., A. Bayhaqi, L. Trialdi dan Usman. 2001. Analisa Peringkat Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia, 49 (4) : 423-451.
- Ladjin, Nurjanna. Analisis Kemandirian Fiskal Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Propinsi Sulawesi Tengah). Universitas Diponegoro. 2008.

Nachrowi, Djalal dan Usman., 2006, Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. Panduan Penanggulangan Kemiskinan, Buku Panduan Resmi TPKP Daerah. TNP2K. Jakarta. 2011

Sepulveda, Cristian F. *The Consequences of Fiscal Decentralization on Poverty and Inequality*. Georgia State University. 2010.

Siagian, James Erik. Analisis Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Kecamatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Deli Serdang. Universitas Sumatera Utara. Medan. 2007

Skira, Meghan. *Fiscal Decentralization and Poverty*. Georgia State University. 2006

Todaro, Michael P., 2006, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Usman, Bonar M. Sinaga, dan Hermanto Siregar. Analisis Determinan Kemiskinan sebelum dan Sesudah Desentralisasi Fiskal, Fakultas Ekonomi : Intituti Pertanian Bogor. 2009

Wijayanti, Sri Wahyu. Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Tingkat Kesenjangan Regional di Indonesia (Analisis Data Panel Provinsi Tahun 2001-2004). Universitas Indonesia. 2006

Winarto, Victor. Analisis Disparitas Pendapatan di Kabupaten Klaten. Universitas Indonesia. 2005

Yao, Guevera Assamoi. *Fiscal Decentralization and Poverty Reduction Outcomes: Theory and Evidence*. Georgia State University. 2007

Dokumen:

BPS dan Bappeda Provinsi Jawa Timur, beberapa tahun, Jawa Timur Dalam Angka.

BPS, Angka dan Informasi Data Kemiskinan 2007, 2008, dan 2009.

Lampiran 1. Data untuk Regresi Data Panel

Tahun	Daerah	P0	P1	P2	PNPM (Rp)	PEND (Rp)	KES (Rp)	PU (Rp)
2007	Kab. Bangkalan	31,5617	6,5400	1,9500	5.253,95	54.749,31	51.672,37	111.587,60
2008	Kab. Bangkalan	32,7000	8,4300	2,7900	11.401,97	254.989,30	57.449,92	156.104,70
2009	Kab. Bangkalan	30,4487	5,3435	1,4148	30.367,41	307.091,10	53.868,37	98.765,06
2007	Kab. Banyuwangi	15,3316	2,1300	0,5100	12.059,78	258.818,50	53.508,65	99.654,91
2008	Kab. Banyuwangi	13,9100	2,9200	0,8100	9.914,57	287.809,80	54.646,53	91.468,95
2009	Kab. Banyuwangi	12,1613	1,9391	0,4828	25.943,41	151.355,90	55.466,90	136.477,70
2007	Kab. Blitar	16,4692	2,4900	0,6200	12.040,75	348.301,20	58.253,21	110.926,50
2008	Kab. Blitar	14,5300	3,5300	1,1300	17.488,03	384.635,80	64.039,15	162.939,50
2009	Kab. Blitar	13,1866	2,0205	0,5202	24.780,35	445.250,80	85.335,27	103.295,80
2007	Kab. Bojonegoro	26,3700	4,0600	0,9000	8.334,40	210.683,00	26.257,72	68.163,00
2008	Kab. Bojonegoro	23,8700	4,9800	1,3800	16.261,28	304.989,60	33.749,58	101.694,10
2009	Kab. Bojonegoro	21,2716	3,4942	0,8793	44.628,34	283.234,40	92.299,01	146.362,20
2007	Kab. Bondowoso	24,2342	3,9700	1,0600	10.764,94	274.313,20	75.591,81	53.363,54
2008	Kab. Bondowoso	22,2300	4,4400	1,2900	12.965,07	279.121,70	86.876,12	54.358,17
2009	Kab. Bondowoso	20,1835	2,7579	0,6564	49.703,98	395.160,40	100.355,20	117.055,90
2007	Kab. Gresik	23,9846	3,4300	0,8100	8.519,89	160.849,90	60.437,98	56.908,58
2008	Kab. Gresik	21,4300	6,8800	2,3900	10.396,31	197.543,60	82.041,86	75.274,50
2009	Kab. Gresik	19,1429	3,1285	0,7917	20.891,75	253.997,30	121.914,50	91.331,35
2007	Kab. Jember	18,5694	2,6000	0,5500	3.562,28	176.151,60	59.079,13	63.189,19
2008	Kab. Jember	17,7400	4,6800	1,4000	5.506,28	209.166,40	59.968,22	57.774,85
2009	Kab. Jember	15,4287	2,3328	0,5449	27.134,96	224.997,30	63.246,61	93.353,61
2007	Kab. Jombang	21,2109	3,4700	0,8200	16.637,54	223.301,10	62.916,88	88.214,59
2008	Kab. Jombang	16,4600	2,6700	0,6700	16.924,34	246.518,00	77.290,65	81.430,80
2009	Kab. Jombang	14,4586	2,0919	0,4897	24.674,81	56.026,64	56.696,36	95.302,96
2007	Kab. Kediri	18,9768	2,9400	0,7200	9.366,04	212.823,10	48.156,81	161.916,70
2008	Kab. Kediri	18,8500	4,0300	1,1100	19.204,99	19.523,17	15.558,43	190.110,00
2009	Kab. Kediri	17,0535	2,8160	0,7255	34.310,94	301.277,40	62.677,30	123.866,60
2007	Kab. Lamongan	25,7934	4,1700	1,0200	8.423,25	247.738,00	59.016,45	73.201,11
2008	Kab. Lamongan	22,5100	4,6800	1,1200	13.166,23	280.113,10	63.135,19	95.436,30
2009	Kab. Lamongan	20,4693	2,9352	0,7098	27.874,73	352.289,10	64.894,02	51.784,38
2007	Kab. Lumajang	20,0864	2,6800	0,5300	8.600,79	225.374,20	74.016,46	78.072,85
2008	Kab. Lumajang	18,1700	5,7300	2,0100	12.750,17	240.801,60	72.368,83	102.254,00
2009	Kab. Lumajang	15,8338	2,2232	0,4936	48.947,83	345.096,30	97.120,42	36.683,66
2007	Kab. Madiun	20,9815	2,6100	0,5800	7.391,81	338.725,50	66.695,51	123.684,90
2008	Kab. Madiun	18,5000	4,3000	1,2800	13.156,98	436.266,50	96.818,42	122.988,90

Tahun	Daerah	P0	P1	P2	PNPM (Rp)	PEND (Rp)	KES (Rp)	PU (Rp)
2009	Kab. Madiun	16,9689	2,7818	0,6991	34.312,29	440.074,40	91.434,74	121.204,10
2007	Kab. Magetan	16,8744	2,4100	0,5100	6.601,34	387.441,70	98.547,99	139.538,30
2008	Kab. Magetan	15,6700	3,3100	0,8700	20.102,42	489.577,60	118.138,90	93.017,05
2009	Kab. Magetan	13,9685	1,9446	0,4218	41.210,94	588.819,70	118.058,80	76.705,32
2007	Kab. Malang	15,6570	2,6900	0,6600	5.833,78	158.156,80	21.196,97	46.516,69
2008	Kab. Malang	15,0800	4,0700	1,2700	7.881,47	228.317,80	37.559,84	74.363,47
2009	Kab. Malang	13,5684	2,0023	0,4864	21.580,30	262.845,40	39.300,93	83.694,37
2007	Kab. Mojokerto	14,8615	1,9200	0,3900	9.795,93	203.677,20	30.414,53	48.851,71
2008	Kab. Mojokerto	14,6100	2,4000	0,6000	13.759,63	282.713,60	52.325,02	76.625,96
2009	Kab. Mojokerto	13,2372	2,1338	0,5523	20.214,08	373.349,70	66.079,05	70.344,38
2007	Kab. Nganjuk	23,7944	3,9200	0,9800	8.877,78	298.038,90	75.011,60	88.879,36
2008	Kab. Nganjuk	19,7700	3,2100	0,7900	19.162,17	357.102,70	97.660,44	78.955,72
2009	Kab. Nganjuk	17,2206	2,9246	0,7946	25.256,28	431.178,10	125.882,80	120.211,40
2007	Kab. Ngawi	23,3308	3,6800	0,8800	8.408,64	273.577,60	57.773,80	24.387,30
2008	Kab. Ngawi	20,8600	3,3800	0,7700	19.749,11	21.857,45	39.736,22	19.554,11
2009	Kab. Ngawi	19,0082	3,2750	0,8408	42.424,88	54.445,09	58.569,83	8.770,44
2007	Kab. Pacitan	23,3059	3,6900	0,8900	9.648,07	361.017,60	69.828,24	103.427,20
2008	Kab. Pacitan	21,1700	5,9400	2,0000	13.693,88	85.298,22	85.327,62	120.302,00
2009	Kab. Pacitan	19,0134	3,4758	0,8965	44.864,37	531.043,90	89.503,01	109.676,40
2007	Kab. Pamekasan	32,4299	5,6700	1,4300	8.820,58	73.303,40	48.843,34	55.544,01
2008	Kab. Pamekasan	26,3200	5,3400	1,4000	16.049,53	88.124,42	25.924,25	23.710,48
2009	Kab. Pamekasan	24,3173	3,5102	0,7905	23.743,47	66.754,24	29.717,55	46.997,77
2007	Kab. Pasuruan	19,8841	2,9600	0,6900	7.762,70	196.145,70	43.422,04	82.606,53
2008	Kab. Pasuruan	18,0400	3,1600	0,7500	16.488,63	236.937,40	71.943,61	54.753,27
2009	Kab. Pasuruan	15,5836	2,5426	0,6459	30.176,82	269.664,30	84.458,99	64.661,04
2007	Kab. Ponorogo	18,2331	2,2400	0,4500	9.976,79	289.483,60	67.915,16	94.071,14
2008	Kab. Ponorogo	16,6200	4,3800	1,3400	15.740,12	51.717,70	145.342,90	74.884,28
2009	Kab. Ponorogo	14,6347	2,0479	0,4551	44.429,65	433.039,00	90.447,43	30.910,93
2007	Kab. Probolinggo	27,4167	4,1100	0,9800	10.406,81	189.178,50	40.073,82	100.651,60
2008	Kab. Probolinggo	30,1300	4,7800	1,1100	14.191,02	232.191,30	50.028,23	73.728,20
2009	Kab. Probolinggo	27,6853	4,7356	1,2063	46.509,97	275.086,00	60.525,37	82.992,05
2007	Kab. Sampang	39,4234	6,1500	1,3600	8.841,13	104.138,00	59.407,27	61.917,31
2008	Kab. Sampang	34,5300	7,4400	2,1200	7.298,28	276.566,10	71.432,31	63.877,59
2009	Kab. Sampang	31,9423	5,6698	1,3522	34.966,29	97.504,65	68.523,68	100.136,30
2007	Kab. Sidoarjo	13,0527	2,1500	0,5200	13.585,86	33.000,89	81.347,39	88.540,85
2008	Kab. Sidoarjo	8,3500	2,0300	0,8600	8.089,97	35.995,95	89.850,37	92.223,45

Tahun	Daerah	P0	P1	P2	PNPM (Rp)	PEND (Rp)	KES (Rp)	PU (Rp)
2009	Kab. Sidoarjo	6,9123	0,9557	0,2215	24.811,97	250.225,00	124.186,10	75.016,81
2007	Kab. Situbondo	15,5990	2,2000	0,4400	17.652,40	286.110,30	50.244,53	90.195,32
2008	Kab. Situbondo	18,0200	3,5100	1,0100	17.970,36	334.118,90	60.025,33	77.849,51
2009	Kab. Situbondo	15,9881	2,7636	0,7187	34.850,21	70.849,22	48.073,54	55.202,14
2007	Kab. Sumenep	32,9820	5,7200	1,4600	7.538,09	220.950,50	54.633,36	216.135,60
2008	Kab. Sumenep	29,4600	5,5400	1,4400	16.940,01	285.818,40	72.941,50	91.213,51
2009	Kab. Sumenep	26,8879	3,8908	0,9113	51.450,55	328.960,60	86.910,83	116.669,20
2007	Kab. Trenggalek	22,7942	3,2300	0,8400	10.168,38	390.174,70	77.422,99	80.794,42
2008	Kab. Trenggalek	20,6400	5,3700	1,7500	16.487,57	416.328,40	81.528,74	141.722,40
2009	Kab. Trenggalek	18,2658	3,4384	0,9776	28.151,80	471.233,80	95.730,30	103.785,90
2007	Kab. Tuban	28,5106	4,9300	1,3000	6.968,82	39.993,24	22.235,39	108.025,90
2008	Kab. Tuban	25,8400	5,6400	1,6900	12.819,70	271.545,70	55.685,24	128.609,90
2009	Kab. Tuban	23,0061	3,4693	0,8035	40.509,58	323.959,70	62.823,56	130.257,50
2007	Kab. Tulungagung	17,8345	2,4000	0,5300	15.436,00	261.655,50	46.267,35	63.900,19
2008	Kab. Tulungagung	12,4100	1,8300	0,3700	23.043,42	310.486,70	76.713,59	115.478,70
2009	Kab. Tulungagung	10,6046	1,8104	0,4533	21.755,77	432.386,50	101.355,80	69.461,02
2007	Kota Blitar	12,0230	1,8600	0,4500	24.666,13	198.985,00	146.096,60	271.060,80
2008	Kota Blitar	9,3400	1,6700	0,5100	17.979,50	240.927,40	167.384,30	217.987,70
2009	Kota Blitar	7,5606	1,3994	0,4106	17.589,03	804.482,30	479.182,40	127.062,00
2007	Kota Malang	7,1944	1,0700	0,2500	13.260,13	261.542,40	17.256,62	82.938,42
2008	Kota Malang	7,2200	1,5400	0,4400	15.374,06	111.536,80	19.509,72	106.527,10
2009	Kota Malang	5,5763	1,1411	0,3336	10.557,83	77.792,64	11.654,53	154.274,30
2007	Kota Mojokerto	10,4596	1,5400	0,3400	21.514,18	204.709,00	218.136,60	213.047,90
2008	Kota Mojokerto	8,8800	1,3500	0,3100	25.054,29	742.722,10	684.492,40	269.702,00
2009	Kota Mojokerto	7,1873	0,8107	0,1667	15.072,17	766.454,30	1.157.455,00	206.726,80
2007	Kota Pasuruan	12,6100	1,7100	0,4000	17.937,19	481.780,60	156.417,40	230.559,80
2008	Kota Pasuruan	11,2000	2,4100	0,8500	20.829,63	148.363,20	165.687,50	266.866,30
2009	Kota Pasuruan	9,3367	1,5454	0,4301	15.288,62	185.116,50	329.089,00	229.490,50
2007	Kota Probolinggo	16,1915	2,6900	0,6700	12.666,46	394.408,50	181.102,40	275.894,90
2008	Kota Probolinggo	23,2900	5,1400	1,7100	14.459,78	434.905,80	183.401,20	277.014,50
2009	Kota Probolinggo	21,0557	3,0304	0,7277	13.215,98	564.375,50	215.609,90	234.992,30
2007	Kota Batu	9,7144	1,5800	0,4300	6.901,57	304.771,40	64.667,53	317.177,40
2008	Kota Batu	6,1800	1,6100	0,4700	7.848,05	335.719,50	68.733,85	258.726,50
2009	Kota Batu	4,8096	0,7785	0,2062	11.994,06	127.721,80	50.798,90	208.339,50

Lampiran 2. Estimasi model Indeks Kemiskinan (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dengan Metode *Common Effect*

Dependent Variable: LOG(P0)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/20/11 Time: 11:10
 Sample: 2007 2009
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PNPM)	0.162774	0.069190	2.352560	0.0206
LOG(PEND)	0.134085	0.069372	1.932850	0.0561
LOG(KES)	-0.067205	0.081891	-0.820665	0.4138
LOG(PU)	0.031607	0.070501	0.448321	0.6549
R-squared	-0.159285	Mean dependent var		2.843808
Adjusted R-squared	-0.193719	S.D. dependent var		0.425383
S.E. of regression	0.464762	Akaike info criterion		1.342770
Sum squared resid	21.81641	Schwarz criterion		1.443873
Log likelihood	-66.49540	Hannan-Quinn criter.		1.383739
Durbin-Watson stat	0.332807			

Dependent Variable: LOG(P0)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/20/11 Time: 11:29
 Sample (adjusted): 2008 2009
 Periods included: 2
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 70

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PNPM(-1))	0.160426	0.121927	1.315753	0.1928
LOG(PEND(-1))	0.167347	0.082253	2.034544	0.0459
LOG(KES(-1))	0.009176	0.116547	0.078736	0.9375
LOG(PU(-1))	-0.076188	0.108151	-0.704454	0.4836
R-squared	-0.148532	Mean dependent var		2.787065
Adjusted R-squared	-0.200738	S.D. dependent var		0.441389
S.E. of regression	0.483666	Akaike info criterion		1.440601
Sum squared resid	15.43956	Schwarz criterion		1.569086
Log likelihood	-46.42103	Hannan-Quinn criter.		1.491637
Durbin-Watson stat	0.257237			

Dependent Variable: LOG(P1)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/20/11 Time: 11:11
 Sample: 2007 2009

Periods included: 3
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PNPM)	0.076614	0.075080	1.020425	0.3100
LOG(PEND)	0.059836	0.075277	0.794875	0.4286
LOG(KES)	-0.083405	0.088863	-0.938586	0.3502
LOG(PU)	0.046505	0.076503	0.607891	0.5446
R-squared	-0.044493	Mean dependent var		1.085214
Adjusted R-squared	-0.075518	S.D. dependent var		0.486300
S.E. of regression	0.504328	Akaike info criterion		1.506170
Sum squared resid	25.68899	Schwarz criterion		1.607273
Log likelihood	-75.07391	Hannan-Quinn criter.		1.547139
Durbin-Watson stat	0.845758			

Dependent Variable: LOG(P1)
Method: Panel Least Squares
Date: 07/20/11 Time: 11:29
Sample (adjusted): 2008 2009
Periods included: 2
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 70

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PNPM(-1))	-0.060510	0.135152	-0.447720	0.6558
LOG(PEND(-1))	0.171188	0.091174	1.877590	0.0649
LOG(KES(-1))	-0.044022	0.129189	-0.340758	0.7344
LOG(PU(-1))	0.003596	0.119882	0.029996	0.9762
R-squared	-0.022230	Mean dependent var		1.090571
Adjusted R-squared	-0.068695	S.D. dependent var		0.518611
S.E. of regression	0.536128	Akaike info criterion		1.646557
Sum squared resid	18.97059	Schwarz criterion		1.775043
Log likelihood	-53.62950	Hannan-Quinn criter.		1.697593
Durbin-Watson stat	0.853363			

Dependent Variable: LOG(P2)
Method: Panel Least Squares
Date: 07/20/11 Time: 11:12
Sample: 2007 2009
Periods included: 3
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PNPM)	-0.186696	0.080709	-2.313188	0.0227
LOG(PEND)	-0.232024	0.080921	-2.867287	0.0050
LOG(KES)	0.302547	0.095525	3.167198	0.0020
LOG(PU)	0.082760	0.082239	1.006336	0.3167

R-squared	0.154414	Mean dependent var	-0.329019
Adjusted R-squared	0.129298	S.D. dependent var	0.581000
S.E. of regression	0.542139	Akaike info criterion	1.650763
Sum squared resid	29.68543	Schwarz criterion	1.751867
Log likelihood	-82.66508	Hannan-Quinn criter.	1.691732
Durbin-Watson stat	1.952881		

Dependent Variable: LOG(P2)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/20/11 Time: 11:28
 Sample (adjusted): 2008 2009
 Periods included: 2
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 70

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PNPM(-1))	-0.186061	0.145789	-1.276236	0.2063
LOG(PEND(-1))	0.128630	0.098350	1.307884	0.1954
LOG(KES(-1))	-0.062685	0.139355	-0.449822	0.6543
LOG(PU(-1))	0.054303	0.129317	0.419923	0.6759

R-squared	0.054610	Mean dependent var	-0.232520
Adjusted R-squared	0.011638	S.D. dependent var	0.581715
S.E. of regression	0.578320	Akaike info criterion	1.798066
Sum squared resid	22.07396	Schwarz criterion	1.926552
Log likelihood	-58.93231	Hannan-Quinn criter.	1.849102
Durbin-Watson stat	1.296256		

Lampiran 3. Estimasi model Indeks Kemiskinan (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dengan *Metode Fixed Effect*

Dependent Variable: LOG(P0)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/20/11 Time: 11:21
 Sample: 2007 2009
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.771636	0.744798	6.406617	0.0000
LOG(PNPM)	-0.095011	0.024218	-3.923132	0.0002
LOG(PEND)	0.029628	0.026906	1.101190	0.2748
LOG(KES)	-0.167931	0.052264	-3.213139	0.0020
LOG(PU)	0.043764	0.049441	0.885180	0.3793

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.947852	Mean dependent var	2.843808
Adjusted R-squared	0.917827	S.D. dependent var	0.425383
S.E. of regression	0.121939	Akaike info criterion	-1.092036
Sum squared resid	0.981366	Schwarz criterion	-0.106279
Log likelihood	96.33188	Hannan-Quinn criter.	-0.692588
F-statistic	31.56914	Durbin-Watson stat	2.037117
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dependent Variable: LOG(P1)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/20/11 Time: 11:20
 Sample: 2007 2009
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.835143	1.542810	1.189481	0.2385
LOG(PNPM)	-0.148247	0.050167	-2.955103	0.0043
LOG(PEND)	-0.081965	0.055734	-1.470654	0.1461
LOG(KES)	0.013501	0.108262	0.124707	0.9011
LOG(PU)	0.134360	0.102415	1.311925	0.1941

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.828787	Mean dependent var	1.085214
-----------	----------	--------------------	----------

Adjusted R-squared	0.730210	S.D. dependent var	0.486300
S.E. of regression	0.252591	Akaike info criterion	0.364459
Sum squared resid	4.210937	Schwarz criterion	1.350216
Log likelihood	19.86590	Hannan-Quinn criter.	0.763907
F-statistic	8.407482	Durbin-Watson stat	3.547380
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dependent Variable: LOG(P2)
Method: Panel Least Squares
Date: 07/20/11 Time: 11:19
Sample: 2007 2009
Periods included: 3
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.290817	2.258956	-0.128739	0.8980
LOG(PNPM)	-0.177445	0.073453	-2.415760	0.0185
LOG(PEND)	-0.157207	0.081604	-1.926459	0.0584
LOG(KES)	0.156351	0.158515	0.986348	0.3276
LOG(PU)	0.167067	0.149954	1.114122	0.2693

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.710047	Mean dependent var	-0.277997
Adjusted R-squared	0.543105	S.D. dependent var	0.547148
S.E. of regression	0.369839	Akaike info criterion	1.127054
Sum squared resid	9.027543	Schwarz criterion	2.112811
Log likelihood	-20.17034	Hannan-Quinn criter.	1.526502
F-statistic	4.253246	Durbin-Watson stat	3.792669
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 4. Estimasi model Indeks Kemiskinan (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dengan Metode *Random Effect*

Dependent Variable: LOG(P0)
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 07/20/11 Time: 11:22
 Sample: 2007 2009
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 105
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.139609	0.684944	7.503687	0.0000
LOG(PNPM)	-0.094210	0.024027	-3.921054	0.0002
LOG(PEND)	0.026107	0.026274	0.993640	0.3228
LOG(KES)	-0.161579	0.048288	-3.346120	0.0012
LOG(PU)	0.008599	0.046155	0.186312	0.8526

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.389158	0.9106
Idiosyncratic random		0.121939	0.0894

Weighted Statistics			
R-squared	0.283506	Mean dependent var	0.506250
Adjusted R-squared	0.254846	S.D. dependent var	0.143197
S.E. of regression	0.123611	Sum squared resid	1.527974
F-statistic	9.892111	Durbin-Watson stat	1.310147
Prob(F-statistic)	0.000001		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.043925	Mean dependent var	2.843808
Sum squared resid	17.99223	Durbin-Watson stat	0.111263

Dependent Variable: LOG(P1)
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 07/20/11 Time: 11:23
 Sample: 2007 2009
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 105
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.763361	1.194439	3.150734	0.0021
LOG(PNPM)	-0.136783	0.048989	-2.792150	0.0063
LOG(PEND)	-0.071622	0.051652	-1.386618	0.1686
LOG(KES)	-0.054445	0.085219	-0.638879	0.5244

LOG(PU)	0.011689	0.083033	0.140773	0.8883
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.400828	0.7158
Idiosyncratic random			0.252591	0.2842
Weighted Statistics				
R-squared	0.139216	Mean dependent var		0.371039
Adjusted R-squared	0.104785	S.D. dependent var		0.270332
S.E. of regression	0.255776	Sum squared resid		6.542160
F-statistic	4.043307	Durbin-Watson stat		2.411067
Prob(F-statistic)	0.004422			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.057801	Mean dependent var		1.085214
Sum squared resid	23.17310	Durbin-Watson stat		0.680685

Dependent Variable: LOG(P2)
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 07/20/11 Time: 11:24
Sample: 2007 2009
Periods included: 3
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 105
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.818733	1.515896	1.859450	0.0659
LOG(PNPM)	-0.152772	0.070646	-2.162517	0.0330
LOG(PEND)	-0.120160	0.071749	-1.674733	0.0971
LOG(KES)	-0.014258	0.107809	-0.132249	0.8951
LOG(PU)	0.001632	0.106740	0.015286	0.9878
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.395138	0.5330
Idiosyncratic random			0.369839	0.4670
Weighted Statistics				
R-squared	0.099161	Mean dependent var		-0.132163
Adjusted R-squared	0.063127	S.D. dependent var		0.384989
S.E. of regression	0.372639	Sum squared resid		13.88598
F-statistic	2.751892	Durbin-Watson stat		2.621876
Prob(F-statistic)	0.032172			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.059921	Mean dependent var		-0.277997
Sum squared resid	29.26893	Durbin-Watson stat		1.243889

Lampiran 5. Uji Chow untuk memilih teknik estimasi yang cocok antara Model *Common Effect* dengan Model *Fixed Effect*.

Diketahui:

Indeks Kemiskinan (P0)

$RSS_1 = Residual Sum of Squares$ dari Model *Common Effect* : 21,8164

$RSS_2 = Residual Sum of Squares$ dari Model *Fixed Effect* : 0,9814

$m =$ Jumlah restriksi dari Model *Common Effect* : 5

$n =$ Jumlah observasi : 105

$k =$ Jumlah Parameter dalam Model *Fixed Effect* : 4

Uji Hipotesis

H_0 : Model *Common Effect*

H_1 : Model *Fixed Effect*

Statistik Uji

$$F_{stat} = \frac{(RSS_1 - RSS_2) / m}{(RSS_2) / (n - k)}$$

$$F_{stat} = \frac{(21,8164 - 0,9814) / 5}{(0,9814) / (105 - 4)}$$

$$F_{stat} = 428,8593$$

Statistik Tabel

$$F_{(0,05;5;101)} = 2,304$$

Karena

$$F_{stat} > F_{(0,05;5;101)}$$

Maka H_0 ditolak, dengan demikian Model *Fixed Effect* lebih baik daripada Model *Common Effect*

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

$RSS_1 = Residual Sum of Squares$ dari Model *Common Effect* : 25,6890

$RSS_2 = Residual Sum of Squares$ dari Model *Fixed Effect* : 4,2109

$m =$ Jumlah restriksi dari Model *Common Effect* : 5

$n =$ Jumlah observasi : 105

$k =$ Jumlah Parameter dalam Model *Fixed Effect* : 4

Uji Hipotesis

H_0 : Model *Common Effect*

H_1 : Model *Fixed Effect*

Statistik Uji

$$F_{stat} = \frac{(RSS_1 - RSS_2) / m}{(RSS_2) / (n - k)}$$

$$F_{stat} = \frac{(25,6890 - 4,2109) / 5}{(4,2109) / (105 - 4)}$$

$$F_{stat} = 103,0309$$

Statistik Tabel

$$F_{(0,05;5;101)} = 2,304$$

Karena

$$F_{stat} > F_{(0,05;5;101)}$$

Maka H_0 ditolak, dengan demikian Model *Fixed Effect* lebih baik daripada Model *Common Effect*

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

RSS_1 = *Residual Sum of Squares* dari Model *Common Effect* : 30,5808

RSS_2 = *Residual Sum of Squares* dari Model *Fixed Effect* : 9,0275

m = Jumlah restriksi dari Model *Common Effect* : 5

n = Jumlah observasi : 105

k = Jumlah Parameter dalam Model *Fixed Effect* : 4

Uji Hipotesis

H_0 : Model *Common Effect*

H_1 : Model *Fixed Effect*

Statistik Uji

$$F_{stat} = \frac{(RSS_1 - RSS_2) / m}{(RSS_2) / (n - k)}$$

$$F_{stat} = \frac{(30,5808 - 9,0275) / 5}{(9,0275) / (105 - 4)}$$

$$F_{stat} = 48,2276$$

Statistik Tabel

$$F_{(0,05;5;101)} = 2,304$$

Karena

$$F_{stat} > F_{(0,05;5;101)}$$

Maka H_0 ditolak, dengan demikian Model *Fixed Effect* lebih baik daripada Model *Common Effect*



Lampiran 6. Uji Hausman untuk memilih teknik estimasi yang cocok antara Model *Fixed Effect* dengan Model *Random Effect*.

Uji Hipotesis

H_0 : Model *Random Effect*

H_1 : Model *Fixed Effect*

Statistik Uji

$$m = \chi^2_{stat} = \hat{q}'Var(\hat{q})^{-1}\hat{q}$$

Kemudian dibandingkan dengan $\chi^2_{(0,05;4)}$ (nilai kritis *chi-square* tabel dengan *degree of freedom* sebanyak 4 pada $\alpha = 5\%$).

Dengan menggunakan program Eviews maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Model	$X2_{stat}$	$X2_{tabel}$	Keputusan	Model dipilih
Indeks Kemiskinan (P0)	6,731	9,487	H0 diterima	Random Effect
Indeks Kedalaman (P1)	2,275	9,487	H0 diterima	Random Effect
Indeks Keparahan (P2)	1,281	9,487	H0 diterima	Random Effect

Keterangan :

Perhitungan uji Hausman untuk pemilihan model *Fixed Effect* atau *Random Effect* tidak secara langsung bisa didapatkan didalam window Eviews tetapi melalui **Command Eviews** yang bisa dituliskan perintahnya di bawah menu utama windows.

Adapun perintahnya sebagai berikut:

Indeks Kemiskinan (P0)

Estimasi dengan metode *Fixed Effect*

```
no_lag.ls(F) log(p0) log(pnpm) log(pend) log(kes) log(pu)
vector beta= no_lag.@coefs
matrix covar= no_lag.@cov
vector b_fixed=@subextract(beta,1,1,4,1)
matrix cov_fixed=@subextract(covar,1,1,4,4)
```

Estimasi dengan metode *Random Effect*

```
no_lag.ls(R) log(p0) log(pnpm) log(pend) log(kes) log(pu)
vector beta= no_lag.@coefs
matrix covar= no_lag.@cov
vector b_gls=@subextract(beta,2,1,5,1)
matrix cov_gls=@subextract(covar,2,2,5,5)
```

Perhitungan Hausman

```
matrix b_diff=b_fixed-b_gls
matrix v_diff=cov_fixed-cov_gls
matrix h=@transpose(b_diff)*@inverse(v_diff)*b_diff
```

Hasil uji statistik Hausman diperoleh nilai sebesar $m = X^2_{stat} = 6,731$

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Estimasi dengan metode *Fixed Effect*

```
no_lag.ls(F) log(p1) log(pnpm) log(pend) log(kes) log(pu)
vector beta= no_lag.@coefs
matrix covar= no_lag.@cov
vector b_fixed=@subextract(beta,1,1,3,1)
matrix cov_fixed=@subextract(covar,1,1,3,3)
```

Estimasi dengan metode *Random Effect*

```
no_lag.ls(R) log(p1) log(pnpm) log(pend) log(kes) log(pu)
vector beta= no_lag.@coefs
matrix covar= no_lag.@cov
vector b_gls=@subextract(beta,2,1,4,1)
matrix cov_gls=@subextract(covar,2,2,4,4)
```

Perhitungan Hausman

```
matrix b_diff=b_fixed-b_gls
matrix v_diff=cov_fixed-cov_gls
matrix h=@transpose(b_diff)*@inverse(v_diff)*b_diff
```

Hasil uji statistik Hausman diperoleh nilai sebesar $m = X^2_{stat} = 2,275$

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2)

Estimasi dengan metode *Fixed Effect*

```
no_lag.ls(F) log(p2) log(pnpm) log(pend) log(kes) log(pu)
```

```
vector beta= no_lag.@coefs  
matrix covar= no_lag.@cov  
vector b_fixed=@subextract(beta,1,1,4,1)  
matrix cov_fixed=@subextract(covar,1,1,4,4)
```

Estimasi dengan metode *Random Effect*

```
no_lag.ls(R) log(p2) log(pnpm) log(pend) log(kes) log(pu)  
vector beta= no_lag.@coefs  
matrix covar= no_lag.@cov  
vector b_gls=@subextract(beta,2,1,5,1)  
matrix cov_gls=@subextract(covar,2,2,5,5)
```

Perhitungan Hausman

```
matrix b_diff=b_fixed-b_gls  
matrix v_diff=cov_fixed-cov_gls  
matrix h=@transpose(b_diff)*@inverse(v_diff)*b_diff
```

Hasil uji statistik Hausman diperoleh nilai sebesar $m = X^2_{stat} = 1,281$

Lampiran 7. Estimasi model Indeks Kemiskinan (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keperahan Kemiskinan (P2) dengan menggunakan Metode *Fixed Effect* yang telah disembuhkan dari multikolinearitas

Dependent Variable: LOG(P0?)
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 07/19/11 Time: 11:08
 Sample: 2007 2009
 Included observations: 3
 Cross-sections included: 35
 Total pool (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.314627	0.474471	11.20115	0.0000
LOG(PNPM?)	-0.096554	0.024054	-4.014043	0.0002
LOG(KES?)	-0.137613	0.045133	-3.049066	0.0033
Fixed Effects (Cross)				
_BANGKALANKAB--C	0.545955			
_BANYUWANGIKAB--C	-0.267748			
_BLITARKAB--C	-0.154699			
_BOJONEGOROKAB--C	0.269489			
_BONDOWOSOKAB--C	0.300232			
_GRESIKKAB--C	0.220427			
_JEMBERKAB--C	-0.085393			
_JOMBANGKAB--C	0.004529			
_KEDIRIKAB--C	-0.017363			
_LAMONGANKAB--C	0.257867			
_LUMAJANGKAB--C	0.070422			
_MADIUNKAB--C	0.104542			
_MAGETANKAB--C	-0.033612			
_MALANGKAB--C	-0.309496			
_MOJOKERTOKAB--C	-0.257555			
_NGANJUKKAB--C	0.202106			
_NGAWIKAB--C	0.173951			
_PACITANKAB--C	0.236244			
_PAMEKASANKAB--C	0.361091			
_PASURUANKAB--C	0.017614			
_PONOROGOKAB--C	0.015398			
_PROBOLINGGOKAB--C	0.470125			
_SAMPANGKAB--C	0.688565			
_SIDOARJOKAB--C	-0.604973			
_SITUBONDOKAB--C	-0.048739			
_SUMENEPKAB--C	0.561170			
_TRENGGALEKKAB--C	0.205422			
_TUBANKAB--C	0.329234			
_TULUNGAGUNGKAB--C	-0.235068			
_BLITARKOT--C	-0.413973			
_MALANGKOT--C	-1.180929			
_MOJOKERTOKOT--C	-0.369365			
_PASURUANKOT--C	-0.291810			
_PROBOLINGGOKOT--C	0.270979			
_BATUKOT--C	-1.034636			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.946463	Mean dependent var	2.843808
Adjusted R-squared	0.918121	S.D. dependent var	0.425383
S.E. of regression	0.121721	Akaike info criterion	-1.103853
Sum squared resid	1.007496	Schwarz criterion	-0.168648
Log likelihood	94.95230	Hannan-Quinn criter.	-0.724890
F-statistic	33.39337	Durbin-Watson stat	2.006960
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dependent Variable: LOG(P1?)

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)

Date: 07/20/11 Time: 20:53

Sample: 2007 2009

Included observations: 3

Cross-sections included: 35

Total pool (balanced) observations: 105

Linear estimation after one-step weighting matrix

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.522673	1.230206	2.050610	0.0442
LOG(PNPM?)	-0.143340	0.071974	-1.991556	0.0505
LOG(PEND?)	-0.091196	0.018631	-4.894947	0.0000
LOG(PU?)	0.093354	0.042885	2.176849	0.0330
Fixed Effects (Cross)				
_BANGKALANKAB--C	0.723864			
_BANYUWANGIKAB--C	-0.276379			
_BLITARKAB--C	-0.084537			
_BOJONEGOROKAB--C	0.365687			
_BONDOWOSOKAB--C	0.297132			
_GRESIKKAB--C	0.328695			
_JEMBERKAB--C	-0.044345			
_JOMBANGKAB--C	-0.100555			
_KEDIRIKAB--C	-0.006002			
_LAMONGANKAB--C	0.304761			
_LUMAJANGKAB--C	0.157107			
_MADIUNKAB--C	0.085174			
_MAGETANKAB--C	-0.088759			
_MALANGKAB--C	-0.091534			
_MOJOKERTOKAB--C	-0.282724			
_NGANJUKKAB--C	0.165803			
_NGAWIKAB--C	0.238001			
_PACITANKAB--C	0.377390			
_PAMEKASANKAB--C	0.447002			
_PASURUANKAB--C	0.008700			
_PONOROGOKAB--C	-0.030105			
_PROBOLINGGOKAB--C				
C	0.466590			
_SAMPANGKAB--C	0.724614			
_SIDOARJOKAB--C	-0.724919			
_SITUBONDOKAB--C	-0.004641			

_SUMENEPKAB--C	0.533804
_TRENGGALEKKAB--C	0.336112
_TUBANKAB--C	0.376999
_TULUNGAGUNGKAB--C	-0.309429
_BLITARKOT--C	-0.591051
_MALANGKOT--C	-0.964915
_MOJOKERTOKOT--C	-0.885569
_PASURUANKOT--C	-0.530784
_PROBOLINGGOKOT--C	0.109161
_BATUKOT--C	-1.030345

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.914006	Mean dependent var	1.455309
Adjusted R-squared	0.866517	S.D. dependent var	0.951841
S.E. of regression	0.249847	Sum squared resid	4.182364
F-statistic	19.24657	Durbin-Watson stat	3.476747
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.828163	Mean dependent var	1.085215
Sum squared resid	4.226261	Durbin-Watson stat	3.579792

Dependent Variable: LOG(P2?)
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 07/20/11 Time: 20:57
Sample: 2007 2009
Included observations: 3
Cross-sections included: 35
Total pool (balanced) observations: 105
Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.802865	0.499007	5.616880	0.0000
LOG(PNPM?)	-0.170385	0.034949	-4.875258	0.0000
LOG(PEND?)	-0.116476	0.032943	-3.535735	0.0007
Fixed Effects (Cross)				
_BANGKALANKAB--C	0.878198			
_BANYUWANGIKAB--C	-0.271621			
_BLITARKAB--C	0.023539			
_BOJONEGOROKAB--C	0.351669			
_BONDOWOSOKAB--C	0.313794			
_GRESIKKAB--C	0.365781			
_JEMBERKAB--C	-0.135804			
_JOMBANGKAB--C	-0.176365			
_KEDIRIKAB--C	0.037810			
_LAMONGANKAB--C	0.225757			
_LUMAJANGKAB--C	0.102336			
_MADIUNKAB--C	0.119361			

_MAGETANKAB--C	-0.171598
_MALANGKAB--C	-0.104707
_MOJOKERTOKAB--C	-0.398568
_NGANJUKKAB--C	0.176823
_NGAWIKAB--C	-0.012782
_PACITANKAB--C	0.472762
_PAMEKASANKAB--C	0.296624
_PASURUANKAB--C	-0.082932
_PONOROGOKAB--C	-0.140728
_PROBOLINGGOKAB-- C	0.404176
_SAMPANGKAB--C	0.647274
_SIDOARJOKAB--C	-0.653358
_SITUBONDOKAB--C	-0.062303
_SUMENEPKAB--C	0.548859
_TRENGGALEKKAB--C	0.484849
_TUBANKAB--C	0.418734
_TULUNGAGUNGKAB-- C	-0.444976
_BLITARKOT--C	-0.421441
_MALANGKOT--C	-0.918890
_MOJOKERTOKOT--C	-0.936006
_PASURUANKOT--C	-0.334190
_PROBOLINGGOKOT-- C	0.274570
_BATUKOT--C	-0.876647

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.895532	Mean dependent var	-0.504524
Adjusted R-squared	0.840226	S.D. dependent var	1.145231
S.E. of regression	0.370793	Sum squared resid	9.349156
F-statistic	16.19219	Durbin-Watson stat	3.697185
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.699000	Mean dependent var	-0.277998
Sum squared resid	9.371435	Durbin-Watson stat	3.852049

Lampiran 8. Realisasi APBD Kabupaten Jember, Kabupaten Bangkalan, dan Kota Mojokerto Tahun 2008 berdasarkan Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan menurut jenis belanja per program.

Program (realisasi dalam ribu rupiah)	Pegawai	Barang Jasa	Modal	Total
Kabupaten Jember Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.328.994	525.621	273.199	2.127.814
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	85.951	142.430	792.200	1.020.580
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	182.492	0	182.492
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	53.770	48.974	0	102.744
Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	560.394	1.385.873	51.030.135	52.976.402
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	58.656	107.563	4.294.441	4.460.660
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	1.601.321	8.223.190	8.794.341	18.618.852
Program Tanggap Darurat Jalan Dan Jembatan	2.625	93.685	1.685.992	1.782.302
Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan	1.800	93.971	0	95.771
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	65.570	296.688	1.610.606	1.972.864
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	119.946	130.394	6.291.439	6.541.779
Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan	10.800	52.495	0	63.295
Program Pengembangan Perumahan	0	197.004	0	197.004
Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	84.395	886.248	0	970.643
Jumlah	3.974.222	12.366.627	74.772.352	91.113.201
Kabupaten Jember Belanja Langsung Dinas Pendidikan				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.099.281	2.454.037	162.606	10.715.924
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	4.800	1.595.656	1.056.030	2.656.486
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	27.900	648.355	0	676.255
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	337.375	108.522	0	445.897

Program (realisasi dalam ribu rupiah)	Pegawai	Barang Jasa	Modal	Total
Program Pendidikan Anak Usia Dini	53.120	656.770	593.148	1.303.038
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1.340.970	2.393.864	39.979.041	43.713.875
Program Pendidikan Menengah	587.305	675.141	3.636.510	4.898.956
Program Pendidikan Non Formal	540.050	550.442	140.346	1.230.838
Program Pendidikan Luar Biasa	12.650	150.390	3.123.687	3.286.726
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	224.020	2.368.719	71.760	2.664.499
Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	119.340	189.505	290.934	599.779
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	322.565	643.920	263.850	1.230.335
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	13.200	11.800	0	25.000
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	114.065	371.430	0	485.495
Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda	0	33.275	173.055	206.330
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	74.670	310.826	0	385.496
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	14.695	18.407	0	33.102
Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olah Raga	579.565	434.597	0	1.014.162
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga	0	8.701	938.855	947.556
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	840.395	0	0	840.395
Jumlah	13.305.966	13.624.357	50.429.823	77.360.146
Kabupaten Jember Belanja Langsung Dinas Kesehatan				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.704.699	3.234.471	377.112	5.316.282
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	0	1.024.130	1.276.171	2.300.301
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	95.707	0	95.707
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	64.950	147.763	47.760	260.473
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	1.143.341	32.022	77.108	1.252.471
Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	4.800	2.338.338	11.300	2.354.438
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	177.900	1.579.826	7.245.133	9.002.859
Program Pengawasan Obat Dan Makanan	23.375	102.945	0	126.320

Program (realisasi dalam ribu rupiah)	Pegawai	Barang Jasa	Modal	Total
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	2.967.020	1.774.373	441.228	5.182.621
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	13.200	452.779	2.902	468.881
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	359.360	904.326	445.984	1.709.670
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	325.869	866.093	1.422.025	2.613.987
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	85.400	637.307	17.700	740.407
Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	8.400	47.783	6.048.251	6.104.434
Jumlah	6.878.313	13.237.862	17.412.674	37.528.849
Kabupaten Bangkalan Dinas Pu Bina Marga Dan Pengairan				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0	0	55.977	55.977
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	7.775	2.822	44.895	55.492
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	15.491	12.947	0	28.437
Program Peningkatan Dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	938.838	687.482	0	1.626.319
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	31.900	48.777	0	80.677
Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	59.450	659.654	23.892.762	24.611.866
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	25.000	8.205.512	0	8.230.512
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	45.890	565.874	7.317.315	7.929.079
Program Pengembangan, Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Serta Jaringan Pengairan Lainnya	257.153	3.924.276	11.775	4.193.204
Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku	16.680	44.359	128.403	189.442
Program Pengembangan, Pengelolaan, Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya	8.880	368.362	348.898	726.140
Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	72.915	27.085	0	100.000
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	64.270	364.748	9.547.518	9.976.536
Jumlah	1.544.241	14.911.900	41.347.543	57.803.683

Program (realisasi dalam ribu rupiah)	Pegawai	Barang Jasa	Modal	Total
Kabupaten Bangkalan Belanja Langsung Dinas Pendidikan				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.115	17.181	222.501	244.797
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	8.950	39.236	567.078	615.264
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	0	45.000	0	45.000
Program Peningkatan Dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	7.768.708	4.213.718	0	11.982.426
Program Pendidikan Anak Usia Dini	30.600	290.102	162.553	483.255
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	524.142	4.997.995	29.631.710	35.153.847
Program Pendidikan Menengah	285.267	2.912.294	3.657.078	6.854.639
Program Pendidikan Non Formal	7.670	112.586	0	120.256
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	423.141	891.672	0	1.314.812
Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	4.800	97.753	0	102.553
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	141.695	1.527.198	44.215	1.713.108
Jumlah	9.200.088	15.144.735	34.285.136	58.629.958
Kabupaten Bangkalan Belanja Langsung Dinas Kesehatan				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0	32.128	142.448	174.576
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	0	22.468	494.274	516.742
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	3.244	25.484	0	28.728
Program Peningkatan Dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	3.429.969	790.499	0	4.220.468
Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	53.420	1.319.390	0	1.372.810
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	100.330	800.081	1.644.661	2.545.072
Program Pengawasan Obat Dan Makanan	0	18.000	0	18.000
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	0	58.697	0	58.697
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	36.975	98.544	0	135.519
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	330.985	459.350	49.500	839.835
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	22.000	68.195	0	90.195

Program (realisasi dalam ribu rupiah)	Pegawai	Barang Jasa	Modal	Total
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	0	88.000	0	88.000
Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu Dan Jaringannya	83.500	350.187	7.385.589	7.819.276
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	37.500	120.856	0	158.356
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	0	17.707	0	17.707
Jumlah	4.097.923	4.269.584	9.716.472	18.083.979
Kota Mojokerto Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	54.844	175.651	0	230.495
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	2.000	478.204	286.382	766.586
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	11.000	0	11.000
Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	0	178.673	8.653.252	8.831.925
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	2.000	32.321	665.245	699.566
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	37.350	1.291.177	4.937.563	6.266.090
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	0	149.484	0	149.484
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	20.500	62.648	971.272	1.054.420
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	4.000	72.260	2.116.762	2.193.022
Program Pengendalian Banjir	24.400	1.192.896	2.862.191	4.079.487
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	43.200	2.645.565	465.813	3.154.578
Jumlah	188.294	6.289.877	20.958.480	27.436.651
Kota Mojokerto Belanja Langsung Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.005.822	151.400	0	4.157.222
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	0	41.800	0	41.800
Program Pendidikan Anak Usia Dini	37.445	842.692	92.400	972.537

Program (realisasi dalam ribu rupiah)	Pegawai	Barang Jasa	Modal	Total
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	586.675	8.094.158	12.356.597	21.037.431
Program Pendidikan Menengah	248.140	3.732.184	1.211.327	5.191.651
Program Pendidikan Non Formal	7.200	16.476	0	23.676
Program Pendidikan Luar Biasa	2.700	14.799	0	17.499
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	119.880	85.616	0	205.496
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	0	48.871	0	48.871
Jumlah	5.007.862	13.027.995	13.660.324	31.696.181
Kota Mojokerto				
Belanja Langsung Dinas Kesehatan				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	74.772	369.444	0	444.216
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	204.930	113.992	99.226	418.148
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.700	14.300	0	20.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	5.100	8.400	0	13.500
Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	20.050	782.428	0	802.478
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	233.650	960.350	28.300	1.222.300
Program Pengawasan Obat Dan Makanan	0	17.090	0	17.090
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	173.435	960.909	0	1.134.344
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	12.650	78.525	0	91.175
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	0	98.935	0	98.935
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	499.950	579.638	0	1.079.588
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	132.400	98.982	0	231.382
Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu Dan Jaringannya	49.400	320.292	4.107.492	4.477.185
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	25.500	27.300	0	52.800
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	7.200	44.373	29.700	81.273
Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan	2.000	21.550	0	23.550
Jumlah	1.446.737	4.496.508	4.264.718	10.207.963

Lampiran 9. Realisasi APBD Kabupaten Jember, Kabupaten Bangkalan, dan Kota Mojokerto Tahun 2007 berdasarkan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan menurut jenis belanja langsung dan tidak langsung.

Daerah/Dinas	Urusan (juta rupiah)								
	Kesehatan			Pekerjaan Umum			Pendidikan		
	BL	BTL	Jumlah	BL	BTL	Jumlah	BL	BTL	Jumlah
Kab. Bangkalan	58.299	20.042	78.341	211.356	4.717	216.073	103.389	159.519	262.908
Dinas Kesehatan	31.134	0	31.134						
Dinas Pekerjaan Umum				114.127	0	114.127			
Dinas Pendidikan							53.370	0	53.370
Pemda	27.165	20.042	47.208	97.229	4.717	101.946	50.019	159.519	209.538
Kab. Jember	196.978	74.270	271.248	250.922	26.026	276.947	167.892	658.373	826.265
Dinas Kesehatan	143.488	47.025	190.513						
Dinas Pekerjaan Umum				191.678	14.159	205.838			
Dinas Pendidikan							167.892	658.373	826.265
Dinas Pengairan				59.243	11.866	71.110			
Rumah Sakit Daerah	53.491	27.245	80.735						
Kota Mojokerto	46.387	12.453	58.840	45.052	1.476	46.528	48.308	34.753	83.061
Dinas Kesehatan	28.169	5.491	33.660						
Dinas Pekerjaan Umum				45.052	1.476	46.528			
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							48.125	34.753	82.878
Kecamatan							2	0	2
Rumah Sakit Daerah	18.218	6.962	25.180						
Sekretariat Daerah							180	0	180